



JATUHNYA
SOEHARTO

Dan Transisi Demokrasi Indonesia



DENNY J. A.

LKIS

Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia

Denny J, A

© Denny J, A

X+ 146 Halaman: 14, 5 X 21 cm

1. Ilmu Politik
2. ISBN: 979-25-5239-1

Editor: Fransisku surdiasi

Rancangan sampul: Imam syahirul Alim

Setting/Layout: Santo

Penerbit

LKIS Yogyakarta

Salakan Baru No, 1 Sewon Bantul

Jl, Parangtritis Km, 4, 4 Yogyakarta

Tlp, (024) 3871947 – 7472110

Faks, (021) -417762

Cetakan I: Agustus 2006

JATUHNYA SOEHARTO
DAN TRANSISI DEMOKRASI
INDONESIA

DENNY J.A

Sanksi Pelanggaran Pasal 44
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.-(Seratus Juta Rupiah). Barangsiapa Dengan sengaja menyiarkan atau mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dipidana dengan penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50. 000. 000.-(Lima puluh Juta Rupiah)

Untuk Tiga Matahari:

Mulia Jayaputri Istriku

Rafi dan Ramy Anakku

DENNY J.A

SEKAPUR SIRIH REFORMASI, REVOLUSI ATAU KEMBALI KE STATUS QUO?

TRANSISI sebuah negara ke demokrasi bukanlah pesta malam, Jalan menuju sistem itu berliku, tidak pasti, tidak jarang pula berdarah, Sebuah negara, seperti Indonesia, sungguh pun telah mejatuhkan pimpinan dari rejim otoritarian, tidak secara otomatis berjalan menuju demokarasi, Selalu ada kemungkinan, jalan itu menelikung dan kembali ke sistem semula(Status Quo) yang otoritarian.

Setelah Jatuhnya Soeharto, kemanakah negara kita akan menuju? Berdasarkan masa transisi yang terjadi di negara lain, ada tiga kemungkinan politik yang akan terjadi di Indonesia, Pertama, berlanjutnya reformasi, Kedua, terjadinya revolusi Ketiga, berlangsungnya involusi, Reformasi berarti perubahan sistem politik(demokratisasi), baik secara cepat ataupun gradual, melalui cara-cara konstitusional dan melalui lembaga pemerintahan yang ada, Revolusi juga berarti perubahan sistem politik, namun secara cepat dan total, melalui cara-cara di luar konstitusi dan pengingkaran atas lembaga pemerintahan, Sedangkan involusi berarti terjadinya berbagai perumitan aksi dan manuver politik, namun tidak berujung pada perubahan sistem politik yang substansial, alias status quo.

Konflik dan konsensus antara para elit akan sangat menentukan apakah reformasi, revolusi atau involusi yang menjadi hasil akhir politik, Dalam masa transisi seperti di Indonesia saat ini, elit mulai menunjukkan keberagamannya, Masing-masing kelompok elit memiliki program politik, strategi dan aliansinya tersendiri, Secara garis besar mereka dapat dibedakan berdasarkan program politik(status quo, perubahan moderat, dan perubahan radikal), Mereka dapat dibedakan juga berdasarkan strategi politik(menggunakan versus mengingkari mekanisme konstitusi).

Berbagai teoritisi elit, misalnya, membagi struktur elite ke dalam empat kategori, Pertama adalah elite di tubuh pemerintahan yang bergaris keras(hardliners), Kedua, elite di tubuh pemerintahan yang menginginkan perubahan(softliners), Ketiga, oposisi yang menginginkan perubahan moderat, Dan keempat, oposisi yang menginginkan perubahan Radikal.

Garis keras di pemerintahan(hardliners) adalah pendukung utama status quo, Mereka menganggap sistem lama yang otoritarian bukan saja masih mungkin diterapkan(possible), namun masih ideal(desirable) berdasarkan berbagai pertimbangan, Garis keras ini sangat kukuh dalam pendiriannya walau dalam era krisis, Seandainya pun secara publik mereka tidak menampilkan diri sekeras sebelumnya, itu hanya bagian dari retorika dan strategi untuk menutupi program politik mereka yang sebenarnya, Dalam aneka kesempatan, garis keras ini selalu mencari cara untuk memperlambat perubahan, atau mengembalikan status quo.

Garis lunak di pemerintahan(softliners) adalah pendukung perubahan. Dukungan ini mungkin karena alasan ideologis, Mereka mulai meyakini bahwa demokrasi lebih baik bagi masa depan bangsa dibandingkan sistem lama yang otoritarian. Dapat juga dukungan mereka bersifat pragmatis belaka, Sacara ideologis mereka tidak meyakini demokrasi, namun sistem demokrasi dipilih karena mereka melihat dukungan atas sistem otoritarian sudah melemah, Berdasarkan konstelasi kekuatan politik yang ada, mereka menganggap lebih rasional dan menguntungkan jika kini mereka mendukung perubahan ke arah demokrasi.

Kelompok moderat di kalangan oposisi bersifat kompromis atas perubahan, dalam hal agenda namun tidak dalam strategi, Mereka dapat menyetujui baik perubahan yang moderat, ataupun perubahan yang total secara gradual, Namun mereka tidak mendukung cara-

¹Untuk membaca lebih detail tentang manuver elit dari empat katagori itu dapat dibaca Guillermo O'Donnel and Philippe C, Schmitter: Tansition from Authorian Rule, Tentative Conclusion about uncertain Democracies(the John Hopkins University Press, 1991)

cara perubahan di luar mekanisme yang digariskan konstitusi yang ada. Alasannya sederhana, Mereka menginginkan perubahan dengan korban sekecil mungkin, Dalam pandangan mereka, hal ini hanya dapat dilakukan dengan melakukan kompromi dan tetap mengakui lembaga pemerintahan serta konstitusi yang ada.

Kelompok radikal di kalangan oposisi adalah penuntut perubahan yang paling keras, baik dalam hal agenda ataupun strategi, Mereka menghendaki perubahan setotal mungkin dari prinsip sistem otoriter menuju sistem demokrasi, Jika perubahan ini dapat dilakukan saat ini juga tidak ada alasan menundanya esok hari, Mereka pun dapat memilih strategi revolusi, perubahan melalui pengingkaran atas mekanisme konstitusi ataupun lembaga pemerintahan yang ada.

Alasan mereka juga sederhana, Kelompok ini menganggap baik tokoh pemerintahan, konstitusi ataupun lembaga pemerintahan yang ada dianggap sudah sedemikian terbenam dalam sistem lama, Mustahil perangkat itu mampu memfasilitasi perubahan dimana kepentingan politik pro status quo itu sendiri yang menjadi pertarungan korbannya, Seandainya memang diperlukan, cara-cara di luar konstitusi dapat dipilih agar perubahan politik yang mendasar terjadi.

Konflik dan konsensus dari empat kelompok elite ini sangat menentukan proses transisi, Involusi atau status quo akan terjadi jika kelompok garis keras ditubuh pemerintahan memenangkan pertarungan elite, Mereka dapat memenangkan pertarungan itu karena masih kuatnya kelompok ini secara politik dan keberhasilan mereka memecah dan mengadu domba kelompok moderat dan radikal dikalangan oposisi.

Reformasi akan terjadi jika ada aliansi kelompok perubahan (softliners) di pemerintahan dan kalangan moderat di oposisi, mengalahkan baik elite garis keras (hardliners) ataupun kelompok radikal dikalangan oposisi, Mereka dapat memenangkan pertarungan elite ini dengan merekrut ataupun mengadopsi beberapa program politik kalangan radikal agar mendapat dukungan dari sebagian kelompok radikal itu.

Revolusi akan terjadi jika kelompok radikal yang memenangkan pertarungan elite, Ini dapat terjadi jika legitimasi pemerintahan yang ada begitu parahnya, serta munculnya tokoh nasional populer ataupun kharismatik yang memimin revolusi, Akibatnya kelompok moderat dikalangan oposisi terkooptasi dan menyatukan diri dengan kelompok radikal.

Untuk kasus Indonesia tahun 1999-2000, saat ini, tiga pilihan politik itu, reformasi, revolusi atau involusi masih mungkin terjadi, Aspirasi revolusi akan terus hidup selama masih tingginya ketidakpercayaan atas lembaga pemerintahan dan masih bercokolnya kelemahan konstitusi yang ada, Namun revolusi tidak akan menjadi pilihan dominan selama tidak adanya tokoh nasional yang sangat populer yang memimpin revolusi itu.

Reformasi akan terus pula bergema dan menjadi mainstream, Namun reformasi masih belum terealisasi jika terjadi fragmentasi dan persaingan kepemimpinan dikalangan pendukungnya, Involusi ke status quo juga masih mungkin terjadi.

Secara konseptual, memang status quo telah kehilangan daya tariknya, Namun aspirasi ini masih terus hidup selama kekuatan politik utama masih mendukungnya.

Agar reformasi terlaksana, yaitu perubahan politik substansial dengan menggunakan mekanisme konstitusi yang ada, kelompok pendukung reformasi harus bertindak di tiga jurusan, Pertama, mereka harus menyelesaikan fragmentasi dan persaingan kepemimpinan dikalangan mereka sendiri, Hal ini mungkin dapat dilakukan dengan mencari platform bersama dan kepemimpinan kolektif, Deklarasi Ciganjur 1998 yang ditandatangani empat tokoh(Gus Dur, Amien Rais, Megawati, Hamengkubuwono X) adalah awal yang baik bagi konsolidasi kekuatan reformasi, Namun Agar mampu merekrut kalangan radikal, deklarasi ini harus dipertajam.

Kedua, mereka harus mengurangi daya tarik revolusi sehingga revolusi tidak menjadi mainstream aksi perubahan, Daya tarik revolusi hanya berkurang jika perubahan yang substansial dalam lembaga pemerintah dan konstitusi, Jika lembaga pemerintahan semakin dipercaya kesungguhannya dan konstitusi diperbaiki kelemahannya, revolusi serta merta kehilangan pesonanya.

Konstitusi yang berlaku, UUD'45, mengandung cacat yang mendasar, sebagian misal, konstitusi ini menyatakan bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara yang akan mengangkat presiden, Sementara keanggotaan MPR akan ditentukan oleh undang-undang, Kita tahu, undang-undang itu dibuat oleh DPR bekerjasama dengan Presiden, Bagaimana mungkin keanggotaan MPR yang akan memilih presiden itu ditentukan pula oleh presiden sendiri? Utusan golongan sebagai anggota MPR juga tidak dikenal dalam negara demokrasi diseluruh dunia, Siapa utusan golongan itu dan bagaimana mekanisme pemilihannya? Sementara jaminan hak asasi manusia tidak dimuat lengkap dalam UUD'45.

Kelompok reformasi dapat merekrut banyak kalangan radikal, dengan menagadopsi agenda mereka dan menjadikannya sebagai bagian dari platform reformasi, Misalnya, deklarasi Ciganjur perlu diperluas lagi dengan menjadikan amandemen atas konstitusi UUD'45 sebagai bagian dari platform reformasi.

Deklarasi Ciganjur harus pula lebih keras terhadap Dwi Fungsi ABRI, Sungguhpun memberikan waktu 6 tahun bagi ABRI untuk menyelesaikan peran politiknya, peniadaan pengangkatan prajurit ABRI di DPR sudah bisa dimulai pada DPR tahun 1999, Ini masalah prinsip yang tidak bisa dikompromikan dengan alasan realitas politik, Pengangkatan prajurit ABRI di DPR bukan saja menentang prinsip demokrasi di seluruh dunia, namun juga menentang aturan konstitusi UUD'45, Membenarkan pengangkatan ABRI di DPR sama dengan membenarkan pelanggaran hukum, Ini akan menjadi skandal politik yang mengerikan.

Ketiga, tekanan terhadap garis keras pemerintahan secara intensif terus dilakukan dengan menggunakan semua sarana yang dibolehkan konstitusi. Pembentukan opini publik, demonstrasi masa dengan cara damai, serta negosiasi di kalangan elite dapat dilakukan secara serentak. Tekanan ini akan semakin bergema jika adanya platform bersama pendukung reformasi, serta berbagai kekuatan pro perubahan menyatukan diri. Mekanisme konstitusi dari jalan non kekerasan harus menjadi kerangka gerakan.

Jika ketiga syarat di atas terjadi, reformasi akan mengungguli baik revolusi ataupun involusi. Dengan demikian masa transisi yang serba tidak pasti dapat dipersingkat.

Buku yang sekarang ini ditangan anda, memang dipersiapkan untuk merekam aneka peristiwa politik penting sejak jatuhnya Soeharto sampai ke suasana menjelang terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu 1999.

Ketika sedang marakannya krisis ekonomi, gerakan mahasiswa dan pembentukan partai politik baru 1998, saya masih berada Ohio State University Columbus, Amerika Serikat, menyelesaikan program studi bidang comparative politics. Bagi seorang aktivis dan penulis, kondisi itu menyedihkan karena saya tidak dapat langsung berada di Tanah Air untuk turut merasakan denyut nadi sebuah perubahan besar. Apalagi itu adalah momen sangat penting dimana bulat lonjongnya Indonesia dibentuk kembali.

Sebagai kompensasi, saya berjanji pada diri saya sendiri untuk menulis dua buku tentang momentum politik itu. Pertama adalah analisa setiap peristiwa politik penting di era itu. Buku itu sekarang di tangan anda, yang diberi judul "Jatuhnya Soeharto dan transisi ke Demokrasi," Kedua adalah buku tentang visi untuk Indonesia baru. Buku kedua ini tentang kerangka normatif untuk membangun Indonesia dimasa depan, yang diberi judul: "Visi Indonesia Baru, Setelah Gerakan Reformasi 1998. "

Buku yang sekarang ini ditangan anda saya tulis dengan cara mencicilnya satu persatu. Setiap ada peristiwa penting, saya membuat analisa dan komentar yang kemudian dipublikasikan di media massa Indonesia, mulai dari Kompas, GATRA, Forum keadilan, GAMMA, dan Republika, sampai dengan Juli 1999. Setelah itu tulisan yang tercecer itu dikumpulkan kembali, diedit agar terasa sebagai satu kesatuan, dan diberikan catatan kaki seperlunya.

Buku ini dibuat untuk memperingati mereka yang mengambil bagian dalam meruntuhkan sistem lama yang otoritarian dan membangun sistem baru yang demokratis. Kepada merekalah generasi mendatang berhutang budi.

Pertama kali diterbitkan pada tahun 1999, buku ini diterbitkan kembali pada tahun 2006, ditengah suasana mengenang sewindu perjalanan reformasi. Ada banyak renungan dan rekomendasi dalam tulisan-tulisan buku ini yang masih perlu dikerjakan hingga saat ini. Untuk itulah saya menghadirkan kembali buku ini ke tangan anda.

Akhirnya Selamat Membaca, Semoga Buku ini Bermanfaat!!

Jakarta, Agustus 2006

Denny J, A

Penulis

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih:

Reformasi, Revolusi atau Kembali ke Status Quo? *

Daftar Isi *

Bagian Pertama

Jatuhnya Soeharto dan Dimulainya Reformasi

1. Krisis Asia sebagai Awal *
2. Bangkitnya Kembali Gerakan Mahasiswa *
3. Politik Kerusuhan Mei 1998 *
4. Jatuhnya Soeharto *
5. Masa Transisi Yang Labil *

Bagian Kedua

Menuju Pemilu 1999

1. Golkar Memperbaharui Diri *
2. Langka Awal PDI-Perjuangan *
3. Partai Islam Mencari Format *
4. Komunike Bersama Partai *
5. Pengelompokan Partai Politik *
6. Transisi Yang Damai atau Berdarah? *
7. Gerakan Mahasiswa Menjadi Ekstrem *

Bagian Ketiga
Hasil Pemilu 1999 dan Problemnya

1. Status Quo atau Politik Sekuler *
2. Pemilih Rasional *
3. Kemenangan Partai Terbuka *
4. Bertahannya Golkar *
5. Mengapa PDI-Perjuangan, Bukan PAN? *
6. Ganjalan Koalisi Partai *
7. Polarisasi Ulama *
8. Kontroversi Memilih Presiden *
9. Manuver Elite Paska Pemilu *
10. Koalisi PDI-Perjuangan dan Golkar? *

Penutup

Transisi ke Demokrasi yang Tidak Tuntas *

Daftar Pustaka *

Tentang penulis *

BAGIAN PERTAMA

Jatuhnya Soeharto dan
Dimulainya Reformasi

KRISIS DI ASIA

AWALNYA adalah krisis ekonomi di Asia, Ini sebuah fenomena yang paling mencengangkan di dekade sembilan puluhan setelah fenomena bubarnya Uni Soviet, Sebagaimana dengan bubarnya Uni Soviet, tidak ada yang menduga jika berbagai negara di Asia Timur mengalami krisis ekonomi yang parah, Dalam dua dekade belakangan ini, negara Asia Timur memperoleh gelar yang membanggakan, “The Miracle of Asia, “Dibandingkan dengan kawasan dunia ketiga lainnya, seperti di Amerika Latin dan Afrika, negara seperti Korea selatan, Malaysia, Thailand, Indonesia, mengalami pertumbuhan ekonomi dahsyat, Model pembangunan ekonomi dan politik dikawasan Asia itu telah pula dijadikan percontohan.

Namun di akhir dekade sembilan puluhan, pembalikan citra terjadi, Satu persatu, negara di Asia Timur tumbang, Dimulai dari Thailand, kemudian meluas ke Malaysia, Korea Selatan dan Indonesia, Di negara yang terakhir ini, krisis ekonomi paling parah, Gelar atas kawasan ini pun dibalik dari, “The Miracle Of Asia “menjadi The “Melt Down of Asia, “atau Asia yang meledak, yang mengkerut.

Persoalan menjadi bertambah runyam karean krisis ekonomi menjaral pula kepada krisis politik, Di Korea Selatan, Thailand dan Indonesia, krisis ekonomi itu berujung kepada pergantian kekuasaan politik, Di Korea Selatan, pergantian itu terjadi melalui pemilu dimana pihak oposisi mengambil alih kekuasaan, Sedangkan di Thailand dan Indonesia, penguasa politik diturunkan di tengah jalan.

Bagaimanakah menjelaskan krisis yang tengah terjadi di berbagai negara Asia? Thomas Friedman menulis kolom di New York Times pertengahan Desember 1997, menceritakan pengalamannya di Thailand, Kaus oblong yang paling laku di Thailand saat itu di bagian mukanya bertuliskan “bekas orang kaya ,” Ini sebuah sinisme masyarakat terhadap dirinya sendiri yang pernah kaya dan kini jatuh misin, Sirivat Voravetvuthikun adalah simbol perubahan yang mendadak karena krisis itu, Ia dulu memiliki sebuah kondominium yang mewah, Krisis yang terjadi di negaranya membuatnya rugi besar, dan kini untuk bertahan hidup, ia menjual sandwich di pinggir jalan.

IMF memang sudah memberikan paket pinjaman ke Thailand sebesar 17, 2 milyar dollar AS, Namun krisis keuangan itu terus berlanjut, Sebanyak 56 dari 58 investment houses di Thailand ditutup, Lebih dari 20, 000 pekerja kerah putih(white collar workers) kehilangan pekerjaan, Di perkiraan Thailand akan mempunyai 2 juta pengangguran, Bom pertumbuhan ekonomi yang telah dinikmati Thailand selama 10 tahun kini berakhir, Ujungnya, Perdana Menteri Chavalit Yongchaiyudh sudah mengundurkan diri.

Krisis keuangan di Indonesia saat itu pun masih terus berlanjut, Pemerintah sudah melikuidasi 16 bank swasta, Paket dari IMF sebanyak 23 milyar dolar AS sudah dijanjikan, Namun kurs rupiah atas dollar terus merosot, bahkan pernah mencapai angka di atas Rp 10, 000/ dollar AS, lebih rendah dari periode sebelum paket bantuan IMF.

q Kemajuan semu dari ekonomi Asia dijelaskan dengan meyakinkan oleh Paul Krugman, “Myth Of Asia’s Miracle, “dalam buku Pop Internationalism(The MIT Press, London hal 167 – 188)

Bahkan Korea Selatan tidak luput dari krisis ini, Negara yang dianggap satu dari macan Asia kini juga limbung, Sampai pertengahan Desember 1998 kurs uang Korea Selatan sudah merosot 23%, Perusahaan brokerage nomor empat terbesar di Korea Selatan, Dongsuh, bangkrut, Masyarakat semakin resah walau IMF sudah menjanjikan paket bantuan sebesar 57 miliar dollar AS, Tiga calon presiden yang saat itu sedang bertarung, Kim Dae Jung, Rhe In Je dan Lee Hai Chang, berhati hati mengomentari krisis ekonomi dan bantuan IMF itu, Bantuan ini diperlukan namun melukai kebanggaan nasional.

Apa yang sebenarnya tengah terjadi? Kindleberger, ekonom ternama MIT, secara khusus menulis buku tentang topik ini, Ia mengamati krisis keuangan internasional mulai dari tahun 1772 dan 1825 di Inggris, tahun 1929 di Amerika sampai dengan kasus Black Monday tahun 1987 juga di Amereka Serikat.

Krisis di tahun 1929 di Amerika Serikat, yang kemudian meluas ke negara Barat lain, misalnya, jauh lebih buruk dan panjang dari krisis di Asia, Pada hari Selasa, 24 Oktober 1929, yang kemudian dikenal dengan istilah Black Tuesday, kebangkrutan stock market dimulai, efeknya terus meluas sampai bertahun-tahun, Di tahun 1932, hasil produksi industri Amerika Serikat merosot separuh, Sebanyak seperempat angkatan kerja waktu itu, sekitar 15 juta menganggur, Asuransi untuk pengangguran saat itu juga belum ada, Upah perjam turun 50%, Ratusan bank bangkrut.

Sebanyak 90, 000 ribu unit usaha ditutup, Banyak milyuner menjadi miskin dan antri di pinggir jalan untuk mendapatkan roti, Tingginya keresahan saat itu dapat dilihat dari jumlah angka bunuh diri, Ditahun 1931 saja sebanyak 20, 000 warga Amerika Serikat yang bunuh diri.

Lalu Kindleberger mengembangkan sebuah model yang ia pinjam dari Minsky untuk menjelaskan aneka krisis itu, Menurut model ini, awal krisis umumnya dimulai dengan terjadinya “Displacement. “

Perubahan mendadak dalam faktor eksternal yang kemudian mengganggu sistem makro ekonomi, Faktor itu dapat saja berupa perang dunia I dan II, ataupun penemuan baru teknologi yang berdampak besar bagi produksi, ataupun penemuan sektor bisnis baru yang sangat menguntungkan, Yang jelas, faktor eksternal ini membuka peluang baru bagi sebuah investasi.

Ditahun 1929, faktor eksternal krisis itu adalah berakhirnya perang dunia I dan ditemukannya berbagai teknologi baru (telepon, minyak, ekspansi railroad, machinery tools, standardized parts), yang mengarah kepada produksi massal.

Faktor eksternal ini lalu membangkitkan unsur kedua dan ketiga dalam model itu, yaitu “mania “dan “panik, “Karena terbukanya peluang investasi baru yang menjanjikan keuntungan besar, dunia usaha menjadi mania, Mereka berlomba-lomba menanamkan investasi besar disebuah sektor, Ditahun 1929, sektor ini adalah industri besin dan perkapalan, tekstil dan gula, Mania ini membuat sektor itu jenuh dan justru berbalik menjadi sektor yang merugikan, Krisis dimulai, Nilai kurs uang antar negara mulai naik turun dengan cepat, Harga saham naik turun dalam waktu singkat, Dunia usaha dan masyarakat menjadi panik, Kepanikan itu menambah dalam krisis yang ada.

Berbagai krisis keuangan menjadi tanda bahwa kadang pasar bebas tidak sepenuhnya rasional, Unsur irasional manusia, seperti mania dan panik cepat berkembang dan besar pengaruhnya mengombang-ambingkan kondisi ekonomi, Apalagi tidak semua pelaku usaha terinformasi dengan baik atas apa yang terjadi.

Dapatkah model Kindleberger dan Minsky ini menjelaskan krisis uang di Asia dekade sembilan puluhan? Kini situasi ekonomi sudah banyak berubah dan semakin kompleks dibandingkan periode terakhir studi Kindleberger di tahun 1987, Volume uang yang beredar antar negara sudah sedemikian cepat dan berlipat-lipat dibanding sepuluh tahun lalu, Krisis di Asia ini menjadi menarik justru karena para ekonom ternama pun belum punya model baru untuk menjelaskannya, Paling-

paling ada tambahan satu variabel baru sebagai penjelas, yaitu moral hazard, meluasnya ketidakjujuran dan ketertutupan dalam dunia usaha di negara yang mengalami krisis itu.

Di Indonesia krisis ekonomi ini kemudian membangunkan macan tidur, yaitu gerakan mahasiswa.

BANGKITNYA KEMBALI GERAKAN MAHASISWA

BULAN April 1998, gerakan mahasiswa berulang-ulang menjadi berita mass media di tanah air, Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas, dengan jaket almamaternya masing-masing, bergabung menjadi satu, Berbagai aksi keprihatinan berulang-ulang digelar, mulai dari Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, sampai ke Ujungpandang, Berbagai universitas negeri terkemuka terlibat, seperti UI, ITB, UGM ditambah beberapa universitas swasta lainnya, Slogan yang dikumandangkan pun beragam, namun seputar reformasi ekonomi dan politik.

Serta merta gerakan mahasiswa ini mengingatkan kita pada gerakan serupa di tanah air tahun 1966, 1974 dan 1978, Sejak tahun 1966, mungkin gerakan mahasiswa saat inilah yang terbesar, jika diukur dari krisis politik ekonomi yang melatarinya, luasnya berita pers baik domestik ataupun internasional, frekuensi gerakan, serta jumlah mahasiswa dan universitas yang terlibat.

Gerakan ini pun mengingatkan kita pada gerakan sosial di bagian dunia lain, terutama di Eropa Timur dekade awal 1990-an, Saat itu

gerakan mahasiswa bercampur dengan aneka kekuatan civil society yang lain, Mereka menuntut perubahan sistem yang kemudian berubah menjadi gelombang sejarah berupa runtuhnya sistem ekonomi politik yang tidak demokratis dan tidak pro ekonomi pasar.

Merenungi gerakan mahasiswa di Tanah Air saat ini, muncul dua pertanyaan besar, Pertama, mengapa gerakan mahasiswa yang melibatkan ribuan massa lahir kembali di panggung politik Orde Baru? Mengapa gerakan sebesar ini timbul saat ini dan tidak lahir dimasa sebelumnya, misalnya di tahun 80-an? Apa persamaan dan perbedaan dari penyebab gerakan itu dengan penyebab gerakan mahasiswa serupa di tahun 1966?

Pertanyaan kedua, bagaimana prospek politik gerakan mahasiswa saat ini? Akankah mereka mengulangi sukses gerakan serupa di Tanah Air di tahun 1966, ataupun gerakan sosial di Eropa Timur dekade 90-an? Ataupun mereka akan kembali tenggelam seperti aksi protes sebelumnya sejak tahun 70-an? Akakah gerakan mahasiswa itu membuat sejarah Indonesia baru?

Secara teoritis dapat dipertanyakan apa gerangan yang menjadi penyebab lahirnya sebuah gerakan sosial? Literatur ilmu politik menyediakan tiga pandangan teoritis, Pandangan pertama menjelaskan bahwa gerakan sosial itu dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan (political opportunity) bagi gerakan itu [¶], Pemerintahan yang moderat misalnya, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya gerakan sosial ketimbang pemerintahan yang sangat otoriter, Kendala untuk membuat gerakan di negara yang represif lebih besar ketimbang di negara yang demokrat, Sebuah negara yang berubah dari represif menjadi lebih moderat terhadap oposisi, menurut pandangan ini akan diwarnai oleh lahirnya berbagai gerakan sosial yang selama ini terpendam di bawah permukaan.

¶ Ulasan yang luas tentang teori political opportunity structure, dan teori gerakan sosial lainnya, dapat dibaca di Sidney Tarrow: *Power in Movement* (Cambridge University press, 1998)

Pandangan kedua berpendapat bahwa gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada, Perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, misalnya, dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang makin lebar untuk sementara antara yang kaya dan yang miskin, Perubahan ini dapat pula menyebabkan krisis identitas dan lunturnya nilai-nilai sosial yang selama ini diagungkan, Perubahan ini akan menimbulkan gejala dikalangan yang dirugikan dan kemudian meluas menjadi gerakan sosial.

Pandangan ketiga beranggapan bahwa gerakan sosial adalah semata-mata masalah kemampuan (leadership capability) dari tokoh penggerak, Adalah sang tokoh penggerak yang mampu memberikan inspirasi, membuat jaringan, membangun organisasi, yang menyebabkan sekelompok orang termotivasi terlibat dalam gerakan.

Ketiga pandangan ini dapat kita gabungkan dengan sedikit modifikasi untuk menjelaskan lahirnya gerakan mahasiswa di Tanah Air saat itu.

Jelaslah gerakan di Indonesia ini dilahirkan oleh meluasnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat luas, Krisis ekonomi dan ketidakpuasan atas situasi politik melahirkan baik gerakan mahasiswa di tahun 1966 ataupun di tahun 1998.

Bedanya, krisis ekonomi di tahun 1966 itu bertumpung tindh dengan polarisasi ideologis masyarakat (antara komunis dan anti komunis) di era perang dingin, Saat ini, krisis ekonomi 1998 bertumpung tindh dengan sesuatu yang kurang ideologis, seperti keraguan atas kompetensi birokratis pemerintahan (korupsi, kolusi, nepotisme), Krisis di tahun 1966 secara keseluruhan memang lebih sensitif, namun setelah tahun 1966, krisis 1998 lah yang terbesar.

Gerakan ini juga disebabkan oleh pemerintah yang lebih moderat terhadap oposisi, Sifat moderat ini tidak harus berupa sikap sebenarnya dari pemerintahan tapi moderat karena dipaksa oleh lingkungan, Di tahun 1966, pemerintah lebih moderat karena terjadinya pelemahan dikalangan pemerintah sendiri.

Elite di pemerintahan semakin terbelah dan terpolarisasi antara pendukung dan anti Soekarno, Perpecahan elit ini memberikan kesempatan politik (political opportunity) yang lebih besar bagi timbulnya gerakan sosial menentang kekuasaan.

Di tahun 1998, pemerintah menjadi lebih moderat lagi bukan karena perpecahan elit, Kekuasaan pemerintah di bawah Soeharto tetap solid walau mulai terasa adanya persaingan yang semakin tajam dilapisan kedua kekuasaan, Saat itu pemerintah dipaksa lebih moderat akibat tekanan organisasi dan komunikasi internasional, Begitu besar pengaruh IMF terhadap formulasi kebijakan ekonomi kita.

Kebijakan politik kita pun kini tengah menjadi tontonan internasional akibat semakin canggihnya media komunikasi, Berita aktivis yang hilang secara cepat beredar di internet di Amerika Serikat dan dengan cepat membuat lembaga internasional di bidang hak asasi bereaksi, Jika pemerintah Republik Indonesia tidak semakin moderat, tekanan internasional akan semakin bertubi-tubi.

Namun gerakan ini juga disebabkan oleh para pelaku dan pemimpin mahasiswa itu sendiri, Lingkungan hanya menyediakan lapangan yang memberikan kemungkinan bagi timbulnya gerakan, Pada akhirnya adalah seorang pemimpin yang harus memanfaatkan lingkungan dan merubah potensi menjadi aksi.

Institusi penting gerakan mahasiswa sekarang dan tahun 1966 adalah adanya senat mahasiswa (SM/DM) yang menaungi satu universitas, Institusi itu secara formal dan organisatoris memudahkan pemimpin mahasiswa menyatukan aksi selingkungan universitas, Sang tokoh mahasiswa pun dapat bertindak atas nama satu universitas, Di tahun 80-an, SM/DM itu dibubarkan dan aktivitas mahasiswa terpecah per-fakultas.

Institusi lain yang penting adalah jaringan informal antar universitas yang sudah dibangun oleh aktivis mahasiswa periode sebelumnya.

Jaringan informal ini pula memungkinkan aktivis mahasiswa berhubungan dengan aktivis lainnya, Seperti pekerja LSM dan intelektual Kritis.

Krisis ekonomi, moderasi pemerintah akibat tekanan internasional, serta tersedianya organisasi mahasiswa se-universitas menjadi penyebab utama lahirnya gerakan ini. Di tahun sebelumnya sejak 1966, ketiga unsur di atas tidak hadir bersama-sama.

Akankah gerakan mahasiswa sekarang berhasil sebagaimana gerakan senior mereka di tahun 1966, dan gerakan civil society di Eropa Timur dekade 1990-an? Jawaban ini terbuka karena tergantung dari satu hal penting, koalisi politik yang bagaimana yang akan melibatkan mereka.

Politik riel adalah masalah kekuasaan. Dalam konstelasi politik, mahasiswa bukanlah kekuatan dan pemain utama. Gerakan tahun 1966 berhasil bukan karena mahasiswa sebagai pelaku utamanya, tetapi koalisi perubahan yang terdiri dari banyak elemen, yaitu kaum reformasi baik dari kalangan militer, teknokrat, intelektual dan dukungan internasional.

Tanpa terbentuknya koalisi yang strategis, gerakan mahasiswa itu akan berhenti sebagai gerakan mahasiswa bukan gerakan perubahan yang mampu menciptakan sejarah baru. Di tahun 1966, mahasiswa berkoalisi dengan pihak yang kuat dan memenangkan perjuangan, sedangkan di tahun 1974, mahasiswa berkoalisi dengan pihak yang lemah dan dikalahkan, karena menang para pemimpin mahasiswa tahun 1966 mendapat reward berupa posisi di pemerintahan dan legislatif, Karena kalah para pemimpin mahasiswa di tahun 1974 dan 1978 mendapat punishment masuk penjara.

Namun dalam gerakan mahasiswa, apalagi jika berpretensi sebagai gerakan moral, bukan kalah dan menang, atau kuat dan lemah itu benar yang menjadi perhitungan.

Yang menjadi fokus haruslah tetap isu yang mereka kumandangkan, yaitu isu yang menjadi anak zamannya. Di masa sekarang isu tidak bisa tidak adalah demokratisasi dan kompetisi ekonomi yang fair(tanpa

monopoli, korupsi, kolusi), Lalu mereka mencari partner politik berdasarkan kesamaan isu.

Dengan isu diatas, seandainya pun tidak berhasil, gerakan mahasiswa saat itu akan tetap dikenang sebagai hati nurani zamannya, asalkan mereka tetap pada jalur tanpa kekerasan, Bagi gerakan mahasiswa tanpa kekerasan, pemisahan gerakan moral dan gerakan politik tidak lagi relevan, karena moral harus juga diperjuangkan secara politik, dan aksi politik harus dijalankan dengan prinsip moral.

Gerakan mahasiswa akan semakin dikenang, apalagi jika gerakan ini berhasil menumbangkan tipe rejim, Soeharto memang sudah jatuh, Namun rejim ekonomi dan politik yang otoritarian belum sepenuhnya tercabut.

POLITIK KERUSUHAN MEI 1998

SETELAH maraknya gerakan mahasiswa, di pertengahan Mei 1998 gerakan berubah arah menjadi kerusuhan, Bagaimana kita harus memahami kerusuhan yang meluas di Tanah Air pada pertengahan bulan Mei itu?

Ribuan gedung terbakar, ratusan manusia terpanggang dan tewas seketika, Berbagai kota besar mulai dari Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Solo sampai ke Ujungpandang menjadi lautan api, Ratusan penduduk asing pergi meninggalkan Indonesia, Sementara warga Indonesia sendiri, yang kebetulan non-pribumi, berada dalam kondisi yang sangat ketakutan akibat teror dan kekerasan, Kondisi itu sangat mencekam tidak ubahnya seperti sedang berlangsungnya sebuah perang sipil. Kerusuhan itu sungguh mencengangkan karena ia mengambil alih gerakan politik yang damai dan terarah, Sebelum peristiwa tertembaknya beberapa mahasiswa universitas Trisakti, gerakan politik yang dimotori oleh kelompok mahasiswa, guru besar, pekerja LSM, intelektual, teknokrat sampai para dokter dan suster, Ini adalah tipikal gerakan kelas menengah yang sangat cantik, Gerakan

itu sangat sistematis dan progresif karena ia melampaui batas-batas agama dan ras. Gerakan ini disatukan oleh isu bersama menuntut perubahan sistem politik dan ekonomi secara substansial.

Namun hanya dalam waktu sekejap, gerakan politik itu berubah menjadi gerakan huru-hara dan kriminal, Pelaku gerakan juga berubah dari gerakan kelas menengah menjadi gerakan yang dikendalikan oleh massa yang beringas, para perusuh dan penjarah, Seolah di tengah jalan, gerakan politik itu dikudeta menjadi gerakan kriminal dan rasial.

Hasil akhir huru-hara itu sungguh memilukan, Bukan hanya kerugian material tetapi citra gerakan reformasi itu sendiri yang dilukai, Huru-hara itu akan pula meninggalkan luka kolektif yang dalam bagi kehidupan berbangsa kita yang plural, Kerusakan itu niscaya semakin memperburuk krisis yang ada.

Merenungi hal ini, lahirlah dua pertanyaan besar, Pertama, mengapa gerakan politik yang damai kelas menengah tiba-tiba berubah menjadi gerakan kerusakan dan kriminal yang didominasi oleh para perusuh? Apa sebabnya? Kedua, bagaimana prospek gerakan politik reformasi setelah kerusakan terjadi? Akankah kerusakan itu mempercepat reformasi atau sebaliknya? Akankah kerusakan itu menjadi titik balik bagi sistem yang ada untuk menjadi semakin keras dan melakukan konsolidasi?

Literatur ilmu politik setidaknya menyediakan tiga jawaban atas perubahan gerakan, dari gerakan politik kelas menengah menjadi gerakan kriminal massa itu, Tiga jawaban ini mengelaborasi dimensi yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain, Teori pertama mengelaborasi watak negatif dari setiap gerakan yang melibatkan massa, Teori kedua mendahulukan kelembagaan politik dan miskinnya koordinasi gerakan oposisi, Teori ketiga menekankan usaha sengaja pihak terorganisir untuk membelokkan arah gerakan dan menumpulkan gerakan reformasi.

Teori pertama beranggapan bahwa gerakan apapun yang mulai melibatkan massa dalam jumlah besar akan cenderung menjadi gerakan huru-hara dan kriminal, Teori ini sangat bersifat negatif terhadap politik massa.

Menurut teori ini, berbeda dengan elite, umumnya massa datang dari mereka yang mengalami keterhimpitan ekonomi dan tidak terinformasi secara baik mengenai sebab-musabab kesulitan yang ada, Akibatnya, gerakan massa selalu akan didominasi oleh kemarahan dan perusakan ketimbang gerakan yang tertib dan memiliki visi. Menurut teori ini, jangankan di Indonesia, massa di negara semaju Amerika Serikat pun bukanlah segmen yang toleran, Berdasarkan studi lapangan, massa di Amerika Serikat sangat minim pengetahuan politiknya, kurang terbuka terhadap perbedaan, dan banyak yang bersifat bigotry, yaitu fanatisme sempit terhadap ras dan agama, Demokrasi di Amerika Serikat sana bertahan bukan karena didukung oleh politik massa tapi oleh politik elite yang memiliki watak sebaliknya.

Jika massa dinegara maju saja seperti itu, apalagi massa di negara yang masih berkembang seperti Indonesia, Ditambah lagi, massa di Indonesia selalu menyimpan memori kolektif atas konflik rasial dan agama, Keterhimpitan ekonomi dan terbukanya peluang untuk mengekspresikan kemarahan kolektif, dengan mudah membuat politik massa menjadi gerakan kriminal yang bersifat rasial, perusakan dan penjarahan harta benda.

Berdasarkan teori ini, gerakan politik reformasi kelas menengah yang cantik itu berubah menjadi kerusuhan dan kriminal karena ia melibatkan sejumlah besar massa, Akibatnya bukan kelas menengah yang sedikit itu yang memimpin, tetapi massa yang sangat banyak dan penuh amarah itu yang mengendalikan gerakan. Teori kedua membantah secara keras pandangan yang negatif atas politik massa, Menurut teori ini, politik massa tidak pernah pada dirinya sendiri bersifat negatif, Gerakan politik massa di Filipina yang menumbangkan Marcos tahun 1986, sebagai contoh, adalah gerakan damai dan terarah,

Tak ada perbedaan substansial antara politik massa dan politik elite, Jika ada perbedaan, itu terletak pada masalah kelembagaan politik dan miskinnya koordinasi pemimpin gerakan.

Menurut teori ini, kerusuhan dan huru-hara itu harus dibaca sebagai macetnya mekanisme politik formal, Berbagai institusi politik yang ada tidak lagi dapat menyalurkan secara terlembaga dan jujur atas aneka partisipasi politik dan tuntutan yang bersifat anti sistem, Akibatnya, karena tidak bisa tertampung dalam mekanisme politik formal, partisipasi politik itu tumpah menjadi kemarahan dan tersalurkan melalui mekanisme non-formal, Kerusuhan dan huru-hara adalah salah satu bentuk mekanisme non formal.

Disamping itu, terjadi kesengajaan antara gairah partisipasi politik publik yang ada dengan tingkat koordinasi para pemimpin oposisi, Negara yang tidak terbiasa dengan oposisi umumnya diwarnai oleh pertarungan kepemimpinan antara tokoh oposisi sendiri, Pertarungan itu tidak terlembaga karena tidak adanya pengakuan formal atas lembaga oposisi, Akibatnya, pertarungan itu bersifat personal, tertutup dan merusak, Gerakan anti sistem yang meluas tidak terkoordinasi dalam satu komando pemimpin oposisi, namun terpecah belah dan kehilangan arah. Berdasarkan teori ini, huru-hara dan kerusuhan itu adalah akibat logis dari terlalu kendornya kontrol pemimpin oposisi atas pengikutnya, Ketimbang mengikuti jalur komando yang tersentralisir dan berwibawa, gerakan yang meluas itu mengambil jalannya sendiri dan meninggalkan arahan pimpinannya.

Teori ketiga memberikan penjelasan yang sama sekali berbeda, Menurut teori ini, setiap aksi akan menimbulkan aksi tandingan, Gerakan politik reformasi akan pula menimbulkan gerakan anti reformasi, Karena reformasi akan membuat pihak yang semula diuntungkan menjadi dirugikan, dengan sendirinya cara pihak yang diuntungkan untuk bertahan adalah membuat gerakan anti reformasi, yang mana yang menang di antara aksi dan reaksi itu, tergantung dari kekuatan dan strategi para aktor yang bermain (the mode of political struggle).

Menurut teori ini, pihak terorganisir yang anti reformasi dapat dengan mudah membelokkan gerakan politik reformasi kelas menengah, Cara melumpuhkan gerakan reformasi tidak perlu dengan menumpasnya melewati kekerasan, tetapi cukup dengan merubahnya menjadi gerakan kriminal dan huru-hara.

Gerakan anti reformasi dapat melakukan penyusupan yang halus, Cukup dengan menyusupkan, misalnya 20-50 orang dalam kerumunan massa, lalu penyusup itu secara serentak bergerak melakukan pembakaran, sisa massa yang lain dengan mudah terpengaruh, Secara taktis dan ekonomis tindakan penyusupan ini dapat dilakukan secara sangat mudah dan murah, walau akibatnya adalah sangat mahal.

Yang mana yang benar dari ketiga teori di atas tentu membutuhkan sebuah penelitian lapangan yang serius, Mungkin hanya satu dari ketiga teori itu yang benar, atau kombinasi dari kedua dari tiga teori itu, Namun pemaparan ketiga teori itu setidaknya dapat membuat pemimpin lebih berhati-hati dalam setiap gerakan yang melibatkan massa dijalan.

Bagaimana prospek gerakan politik reformasi setelah kerusuhan? Akankah kerusuhan itu membuat reformasi sistem lebih cepat? Atau sebaliknya, kerusuhan dijadikan alasan untuk membatalkan reformasi dan mengkonsolidasikan sistem politik dan ekonomi lama? Jawaban atas pertanyaan ini terbuka karena sangat tergantung dari pertarungan politik yang ada.

Banyak contoh yang menunjukkan bahwa krisis ekonomi dan kerusakan sistem sebuah negara tidak berpengaruh besar pada perubahan tipe rejim, Myanmar(Burma) dan Irak, misalnya, sangat terpuruk secara ekonomi dan terus mengalami kerusakan sistem secara internal.

Tapi tipe rejim yang ada tidak berubah dan masih kuat mengontrol keadaan, Namun banyak pula contoh, krisis yang ada menjadi lompatan

sebuah negara untuk melakukan reformasi yang menyeluruh, seperti yang terjadi di Filipina tahun 1986 atau di Thailand tahun 1997.

Untuk kasus Indonesia yang sekarang, terselenggaranya reformasi yang menyeluruh sangat tergantung dari koordinasi kekuatan masyarakat(oposisi) dan kekuatan reformasi di DPR dan ABRI(pemerintahan).

Samuel Huntington [¶] misalnya, memaparkan tiga cara perubahan yang mungkin, Pertama, perubahan Transformation, yang dipimpin oleh elite reformasi di kalangan pemimpin pemerintahan sendiri, Contoh tipe ini adalah Brazil di tahun 1970-an, yang di pimpin oleh presiden Geisel sendiri, Kedua, perubahan Replacement, yang dipimpin oleh tokoh oposisi yang mampu menyatukan gerakan perlawanan, Contoh kasus ini adalah Filipina di tahun 1986 yang dipimpin oleh Cory Aquino, Ketiga, perubahan Transplacement, yang dipimpin oleh kerjasama pihak oposisi dan reformer di dalam pemerintahan sendiri, Contoh kasus ini adalah Afrika Selatan di bawah De Klerk (pemerintah) dan Nelson Mandela (Oposisi).

Yang paling realistik dan aman untuk Indonesia adalah perubahan model Transplacement, Ini berarti kita harus ada kerjasama yang terorganisir antara kalangan reformer di pemerintahan (DPR dan ABRI) dan pihak oposisi (Orgnisasi keagamaan, kelompok mahasiswa, LSM, Guru Besar dan aneka kelompok masyarakat lainnya).

Selain kerjasama, yang dibutuhkan sekarang adalah sedikit keberanian dari mereka untuk mengambil resiko melakukan pembaharuan yang menyeluruh.

[¶] Samuel P Hutington: The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century(University of Oklahoma Press, USA; 1993, hal 109-163).

JATUHNYA SOEHARTO

BERITA pengunduran diri Soeharto hari Kamis 21 Mei 1998, segera menjadi berita dunia, Berbagai media besar di Amerika Serikat, mulai dari New York Times, Wall Street Journal sampai Washington Post, menjadikan peristiwa ini sebagai berita utama, Sementara CNN terus-menerus mengulang kisah ini di TV, Berbagai media di Amerika Serikat menggambarkan bahwa seorang politisi besar dunia era perang dingin telah turun tahta.

Untuk pertama kalinya selama tiga puluh dua tahun, Indonesia harus tumbuh tanpa dipimpin oleh Soeharto lagi. Sebuah era politik baru terbuka, namun masih tidak pasti apakah pergantian pimpinan ini akan membawa perubahan yang substansial, Tidak pasti pula apakah ia juga akan menghasilkan pemerintahan yang kuat secara politik.

Kejadian ini sungguh dramatis, Tiga bulan sebelumnya, tidak ada pengamat politik yang paling optimis sekalipun membayangkan Soeharto akan turun dari kekuasaannya secepat ini, Begitu banyak

manuver politik di Indonesia terjadi di luar dugaan, Sebulan sebelumnya, sebagai contoh, siapa yang menduga Harmoko, selaku ketua MPR/DPR dan Golkar dapat memberikan deadline kapan Soeharto harus mundur, Siapa pula yang dapat menduga Fraksi Karya Pembangunan dimana Soeharto sendiri sebagai ketua dewan peminanya ternyata menyokong seruan Harmoko.

Siapa pula yang menyangka ribuan mahasiswa mampu menduduki dan bertahan sehari-hari di gedung MPR/DPR?

Merenungi peristiwa ini, dari kacamata ekonomi politik(the political economy) melahirkan dua pertanyaan, Pertama, sistem ekonomi politik yang bagaimana yang membuat Soeharto mampu bertahan selama 32 tahun? Mengapa sistem ekonomi politik yang sama itu kini malah menjatuhkan Soeharto? Kedua, warisan ekonomi politik bagaimana yang ada sekarang? Kesulitan apa yang akan dihadapi oleh pemimpin nasional baru?

Para teoritis ekonomi politik mencoba mencari korelasi antara kemajuan dan kemunduran ekonomi sebuah bangsa dengan struktur negara bangsa itu, Diyakini bahwa struktur negara tertentu dapat menyebabkan kemajuan ekonomi dan struktur negara lainnya dapat menyebabkan kemunduran dan krisis ekonomi.

Latar belakang upaya teoritis itu adalah fenomena yang luar biasa di Asia Timur, Disamping Indonesia, berbagai negara lain di kawasan ini mempunyai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, Pertumbuhan itu lebih cepat dibandingkan dengan negara lain di Amerika Latin atau Afrika, bahkan dibandingkan dengan negara Barat sendiri, Karena itulah pertumbuhan ekonomi di Asia ini disebut keajaiban Asia.

Yang membuat keajaiban Asia ini menarik karena sistem ekonomi politiknya tidak identik dengan apa yang ada di barat, Di barat, sistem ekonomi politiknya disebut negara minimal(the Minimal State), Negara jenis ini menerapkan ekonomi pasar, Peran pemerintah dibidang

ekonomi sangatlah dibatasi hanya untuk mengatasi kegagalan sistem ekonomi pasar saja (market failure). Contohnya, kebijakan pemerintah untuk menghindari monopoli, mengatasi efek negatif lingkungan (externalities), menyediakan fasilitas umum (public goods) dan membuat serta menerapkan hukum.

Pemerintah dapat pula berperan lebih jauh seperti mendistribusikan kekayaan dan kesejahteraan.

Sistem politik di negara minimal adalah politik demokratis, sistem politik ini tidak hanya berfungsi untuk menjamin kebebasan politik warga negara. Lebih jauh lagi, sistem politik ini dirancang untuk mengontrol mekanisme ekonomi agar aliran modal dapat diawasi publik. Akibatnya aneka praktek korupsi dan nepotisme, misalnya akan dengan mudah dikoreksi.

Berbeda dengan negara barat, berbagai negara di Asia memiliki sistem ekonomi politik yang lain. Para ahli menyebut sistem Asia ini sebagai Negara Pembangunan (the Developmental State) ¶. Dalam sistem ini, pemerintah terlibat sangat jauh dan mengarahkan sistem ekonomi. Di Jepang, misalnya ada MITI, departemen industri dan perdagangan. Departemen ini berperan menentukan bahwa industri nasional harus bergeser dari industri ringan (seperti tekstil) ke industri berat (seperti besi) dan kemudian ke industri yang berbasis ilmu pengetahuan tinggi (seperti komputer).

Sistem politik Negara Pembangunan bukan pula demokrasi seperti Negara Minimal Barat. Umumnya Negara Pembangunan memiliki sistem politik otoritarian atau semi otoritarian. Sistem politik ini di dominasi oleh sebuah partai politik dan kebebasan politik yang terbatas.

Sistem otoritarian dianggap berguna bagi pembangunan ekonomi karena banyak hal, ia dapat memelihara stabilitas politik yang

Analisa lebih jauh tentang developmental state bisa dibaca: Arian Letwich: "Bringing Politics Back in: Toward a Model of Developmental State," Journal of Development Studie Vol 31, No. 3, February, 1995, hal 400-427

sangat dibutuhkan oleh pembangunan ekonomi, Pemerintahan otoritarian dapat melaksanakan program ekonomi secara efektif, tanpa harus banyak melakukan tawar-menawar dengan kekuatan politik masyarakat yang memang dilemahkan, Berbagai gejala sosial pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat pula diredam melalui aneka kebijakan politik yang represif.

Negara Indonesia memang tidak sepenuhnya dapat dikategorikan dalam Negara Pembangunan, Birokrasi ekonomi di negara kita tidak sebersih dan tidak punya kompetensi setinggi birokrasi ekonomi Negara Pembangunan lainnya, Korupsi di negara kita jauh merajalela dan tekanan kelompok kepentingan(bisnis) atas birokrasi jauh lebih kuat, Namun secara keseluruhan, sistem ekonomi politik kita lebih menyerupai Negara Pembangunan itu ketimbang Negara Minimal.

Negara pembangunan pernah mampu membawa negara kita dan Soeharto ke tingkat prestasi ekonomi yang tinggi, Dengan kebijakan ekonomi yang kuat hasil rumusan para teknokrat di awal Orde Baru, negara kita membuka bekerjanya mekanisme pasar.

Namun berbeda dengan Negara Minimal yang secara umum bertumpu pada mekanisme pasar, pemerintah Indonesia juga terlibat secara aktif memobilisasi pembangunan melalui peningkatan faktor produksi, Pemerintah berperan aktif dalam menambah jumlah modal, menambah jumlah pekerja, menaikkan kualitas pekerja, mentransfer teknologi, dan menyelenggarakan pendidikan modern, Menurut Paul Krugman, peran aktif pemerintah dalam memobilisasi faktor produksi ini saja sudah mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi, walau ekonomi secara keseluruhan tidak bertambah efisien.

Pada saat yang sama, sistem politik Indonesia dibuat ketat sebagaimana layaknya Negara Pembangunan Lainnya, Partisipasi politik dikurangi, jumlah partai politik sangat dibatasi, dan aneka kekuatan oposisi serta kekuatan populer masyarakat dikontrol melalui

kebijakan korporatisme, Melalui sistem ini, pemerintah menjadi sangat kuat dan otonom, sementara oposisi dan kekuatan anti sistem lemah.

Akibatnya, pemerintah mampu melaksanakan program ekonomi secara efektif dan cepat tanpa terganggu oleh gejolak sosial ataupun tawar-menawar dengan kekuatan oposisi, Sistem politik ini menghasilkan stabilitas politik yang sangat dibutuhkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi di awal Orde Baru.

Tapi sistem ekonomi politik di atas memiliki cacat yang serius, Pemerintahan yang kuat dan oposisi yang lemah pada waktunya akan berubah menjadi negatif dan merusak ekonomi, Pemerintahan tidak lagi terkontrol oleh publik, Arus modal semakin besar sebagai buah pertumbuhan ekonomi, akibatnya praktek korupsi, nepotisme, kolusi dan monopoli semakin besar pula dan merajalela tanpa mampu dikontrol lagi oleh politik masyarakat yang lemah.

Yang rusak bukan hanya ekonomi, tetapi jauh lebih parah adalah rusaknya moralitas penyelenggara kekuasaan, Kekayaan negara dan proyek pemerintah dapat dengan mudah di ambil oleh mereka yang dekat dan menjadi keluarga dari penguasa politik, Perasaan kolektif masyarakat atas ketidakadilan penyelenggara kekuasaan meluas, Situasi ini menciptakan kemarahan kolektif yang terus menumpuk sejalan dengan semakin buruknya situasi ekonomi, Inilah kiranya situasi struktural politik ekonomi yang akhirnya menjatuhkan Soeharto.

Pada awal mulanya, politik otoritarian memang dapat memajukan ekonomi, Namun setelah melewati fase tertentu, pembangunan ekonomi tidak lagi dapat difasilitasi oleh sistem otoritarian, Arus modal yang semakin besar agar dapat berproduksi secara efisien menuntut pengawasan publik yang semakin tinggi, Untuk itu pemerintahan demokratis dibutuhkan karena pengawasan publik akan kuat hanya dalam sistem yang demokratis.

Evolusi sistem ekonomi politik ini gagal kita antisipasi, Pembangunan ekonomi yang terjadi di negara kita tidak diikuti oleh perubahan sistem politik untuk semakin demokratis.

Siapapun yang akan melanjutkan kepemimpinan Soeharto akan menghadapi situasi ekonomi politik sangat serius, Secara ekonomi, Negara Pembangunan yang sudah berlangsung selama 32 tahun ini telah menciptakan aneka kelompok kepentingannya sendiri, Berbagai kelompok bisnis yang sudah besar dan diuntungkan sistem akan selalu melakukan perlawanan atas perubahan sistem.

Sementara itu secara politik, Negara Pembangunan tidak menciptakan berbagai kekuatan politik alternatif, Akibatnya tidak lahir satu figur politik yang kuat dan siap segera menjadi pemimpin nasional yang efektif, Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi pemimpin politik baru, siapapun dia, untuk mendapatkan legitimasi politik dari berbagai kekuatan yang beragam dan tidak terlembaga secara baik.

Tugas ini menjadi lebih sulit lagi karena pemimpin baru harus berlomba dengan waktu, Ia harus mendapatkan legitimasi politik serta perbaikan ekonomi sekaligus secara cepat, Jika tidak, perjalanan waktu akan kembali menenggelamkannya.

MASA TRANSISI YANG LABIL

Setelah Jatuhnya Soeharto, tidak serta merta tipe rejim berubah. Ada masa antara transisi yang sulit, Syarat apakah yang dibutuhkan agar transisi Indonesia ke demokrasi saat ini berjalan secara mulus? Hal apa pula yang harus diperhatikan agar dinamika politik era reformasi ini tidak membuat Indonesia kembali ke sistem politik otoriter, cepat ataupun lambat?

Indonesia kini berada dalam masa transisi yang sangat labil, Dalam masa ini, sistem lama yang otoritarian sudah kehilangan legitimasi dan basis moralnya, Sementara konsensus tentang sistem baru belum terjadi, Periode transisi ini penting untuk diperhatikan, Kita tidak ingin Indonesia seperti Nigeria sebelum 1999 yang mengalami kesukariaan menyambut transisi ke demokrasi, namun kemudian berbalik ke otoritarianisme.

Runtuhnya otoritarianisme seperti Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto tidak secara otomatis akan membawa negara

kita menuju demokrasi sejati yang terkonsolidasi, Otoritarianisme dan demokrasi adalah dua tipe rejim yang sangat berbeda, Diantara dua kutub rejim itu ada masa antara, yaitu sebuah bentuk demokrasi yang labil, Berbagai ahli memberikan nama yang berbeda untuk demokrasi masa transisi itu, seperti demokrasi semu(pseudo-democracy), demokrasi elektoral(electoral democracy), dan demokrasi liberal yang belum terkonsolidasi(unconsolidated liberal) Indonesia kini berada di tipe transisi itu.

Dibawah ini diuraikan secara umum perbedaan antara otoritarianisme, demokrasi sejati yang terkonsolidasi, dan demokrasi labil di masa transisi.

Karakter otoritarianisme sedikit banyak sudah kita kenali seperti tercermin dalam sistem politik Orde Baru, Dalam tipe rejim ini, sistem politik tidak memungkinkan terjadinya pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum, Berbagai mekanisme diatur demikian rupa untuk mencegah terjadinya alih kekuasaan secara prosedural.

Mayoritas anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, misalnya, diangkat oleh presiden, Pada waktunya MPR itu sendiri yang akan memilih presiden, Dengan kata lain, presiden sebenarnya mengangkat dirinya sendiri melalui sejumlah mayoritas anggota MPR yang diangkatnya, Mekanisme ini dengan sendirinya menutup peluang terjadinya pergantian presiden secara normal.

Pemerintah memiliki partai hegemonik pula, Golkar, sebagai misal, diikutkan dalam pemilu bersama partai lain, Namun posisi partai itu tidak seimbang, Golkar dibantu sedemikian rupa untuk terus memenangkan pemilu secara mutlak, Bantuan itu dapat berupa dukungan dari aparaturnya negara yang seharusnya netral(pegawai negeri, militer), ataupun bantuan dana yang menggunakan fasilitas kekuasaan negara(seperti melalui yayasan Dakab yang diketuai presiden sendiri).

Tentang gradasi demokrasi dapat dibaca Larry Diamond: "Introduction in Search of Consolidation, dalam buku Larry Diamond, et, al, Consolidating the Third Wave Democracies(The John Hopkins University Press, 1997)hal xiii-xi vii

Tipe rejim demokrasi yang terkonsolidasi memiliki mekanisme yang sama sekali berbeda.

Anggota parlemen yang bertugas membuat undang-undang ataupun mengangkat kepala eksekutif, semuanya dipilih langsung oleh rakyat sendiri, Parlemen secara moral sah mengklaim sebagai wakil rakyat karena tidak ada diantara mereka yang diangkat oleh otoritas politik manapun.

Partai-partai diberikan pula kebebasan yang sejajar, Berbagai aparatus Negara(pegawai negeri, militer) dan fasilitas Negara mengambil jarak yang sejajar atas semua partai politik, Siapapun yang memenangkan pemilu, aparatus itu, baik sipil ataupun militer, serta merta menundukan diri kepada pemenang pemilu, Agar kompetisi politik ini berjalan maksimal dan tidak mendiskriminasi berbagai saluran kebebasan(civil liberties) diberikan, Semua kekuatan politik yang utama mematuhi aturan main demokratis.

Demokrasi labil di masa transisi(pseudo-democracy, electoral democracy, unconsolidated liberal democracy), seperti Indonesia saat ini belum sepenuhnya memiliki ciri demokrasi di atas, Tiga hal penting yang belum dimiliki demokrasi labil itu adalah sebagai berikut.

Pertama, belum semua kekuatan politik utama menerima prosedur demokrasi sebagai satu-satunya aturan permainan yang sah, Istilah populer untuk hal ini adalah demokrasi belum menjadi “the only game in town, “Alasan berbagai kelompok itu untuk tidak menerima prosedur demokrasi sebagai satu-satunya aturan yang tidak boleh dikhianati, dapat beragam, Mungkin kelompok itu digerakkan oleh motif ideologi alternatif, seperti jenis sistem otoritarianisme lain atau negara agama, Dapat pula penolakan itu karena alasan yang sangat praktis, seperti untuk melindungi kepentingan pribadi atau kelompok yang terancam oleh prosedur demokrasi. Kedua, pemegang politik riil bukan aktor atau kelompok yang dipilih secara langsung oleh rakyat, Ada jarak antara pemegang politik riil dan pemegang politik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, Contohnya seperti Turki,

Pemegang kekuasaan riil bukanlah perdana menteri yang dipilih dari hasil pemilu, tetapi militer, Selalu dapat terjadi bahwa pemain utama politik adalah badan yang tidak dipilih melalui pemilu, misalnya militer atau birokrasi, Dalam situasi ini kedaulatan rakyat yang merupakan basis demokrasi belum sepenuhnya terselenggara.

Ketiga, adanya kondisi obyektif yang menyulitkan stabilitas sebuah rejim yang plural, Hal ini dapat berupa krisis ekonomi yang akut dan lama, Krisis ekonomi dapat membuat harga barang dan bahan kebutuhan pokok terus membumbung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin yang jumlahnya banyak, Krisis ekonomi juga dapat menaikkan jumlah pengangguran yang membuat semakin banyak orang cemas akibat tidak punya pendapatan, Situasi ini sangat rawan dan mudah menyulut kerusuhan massa ataupun kudeta, Hal lain yang dapat menyulitkan adalah perbedaan kultur dan identitas di masyarakat yang sangat tinggi tingkat konfliknya, Misalnya di masyarakat itu perbedaan agama, ras, etnik, dan ekonomi, dapat dengan mudah menjadi persoalan politik, Politisi yang populer dapat dengan mudah menyulut perbedaan itu demi kepentingan popularitasnya sendiri dengan mengorbankan harmoni masyarakat yang plural.

Demokrasi labil dimasa transisi ini seperti yang terjadi di Indonesia, sangat rawan, Dari sini, demokrasi labil itu dapat terus bertambah kualitasnya menuju demokrasi sejati yang terkonsolidasi, Sebaliknya, demokrasi labil itu dapat kembali ke bentuknya semula, yaitu otoritarianisme.

Cara menuju otoritarianisme juga beragam, Demokrasi labil itu dapat mengalami sudden death melalui kudeta tiba-tiba dan kudeta yang berhasil itu menegakkan otoritarianisme kembali, Atau ia mengalami slow death, dimana penguasa secara perlahan dan sistematis membuat kebijakan yang semakin mengekang kebebasan dan menurunkan kualitas demokrasi.

Apa yang harus dilakukan agar proses transisi menuju demokrasi di Indonesia berjalan mulus dan tidak mengalami pembalikan? Literatur ilmu politik terbagi dalam dua kubu, Kubu pertama lebih menekankan pada faktor struktural seperti kondisi ekonomi, kultur demokrasi, hubungan sipil-militer ataupun kerangka konstitusi, Menurut kubu ini, proses demokrasi yang terkonsolidasi dianggap akan positif jika ada pertumbuhan ekonomi, kultur demokrasi, supremasi sipil atas militer dan parlemen yang representatif, Sebaliknya, krisis ekonomi, kultur yang sektarian, dominasi militer atau parlemen yang anggotanya diangkat, dengan mudah membuat demokrasi layu.

Kubu kedua lebih menekankan kepada perilaku, pilihan, dan strategi politik, Menurut kubu ini, proses menuju demokrasi yang terkonsolidasi menjadi mulus, jika elite politik utama berkonsensus (elite settlement) untuk menjadikan prosedur demokrasi sebagai satu-satunya aturan main, Jika konsensus elite ini kuat, berbagai faktor struktural yang mengganggu akan tereduksi dengan sendirinya.

Untuk Indonesia adanya konsensus elite politik (elite settlement) untuk mengawal dan menjaga proses transisi ke demokrasi sangatlah penting, Ditimbang dari faktor struktural, seperti krisis ekonomi, kultur demokrasi, hubungan sipil-militer, kerangka konstitusi, kondisi Indonesia sangatlah lemah bagi tumbuhnya demokrasi yang terkonsolidasi, Kekurangan pada faktor struktural itu hanya dapat dikompensasi oleh hadirnya sekelompok elit yang kuat, yang berkomitmen dan memiliki konsensus untuk memelihara dan terus menumbuhkan tradisi berpolitik secara demokratis.

Sayangnya konsensus elite yang mengarah ke aturan main demokratis itu tidak pula kita rasakan, Berbagai kelompok politik kuat dimasa Order Baru tampak masih enggan kehilangan hak-hak istimewanya dimasa silam demi prinsip demokrasi, Sementara kelompok politik yang berada diluar kekuasaan juga masih sulit menerima pemerintahan yang ada, Percekcokan ini dan keengganan mengalah demi terciptanya mekanisme politik demokratis akan cepat

mengundang kembali sistem politik otoriter di Indonesia, cepat atau lambat.

Kegagalan proses transisi ke demokrasi itu terjadi di banyak negara, Sangatlah sayang jika kegagalan itu juga terjadi di Indonesia.



BAGIAN KEDUA
Menuju PEMILU 1999

GOLKAR MEMPERBAHARUI DIRI

JATUHNYA Soeharto meninggalkan beban berat di pundak Golkar, Sebagai pembina, secara de facto sebenarnya Soeharto adalah ketua umum Golkar, Berbagai kebijakan dan kepemimpinan Golkar sepenuhnya ada dalam kontrol Soeharto, Besarnya kemarahan publik atas Soeharto, suka atau tidak, membawa imbas pula ke Golkar, Dalam sentimen publik, Golkar dianggap penopang kekuasaan Soeharto dan harus ikut memikul tanggung jawab pula.

Untuk bertahan sebagai partai politik, tidak heran jika kemudian Golkar berbenah diri, Partai ini ingin memutuskan hubungan dengan masa silam, terutama Soeharto, Untuk pertama kalinya ketua umum dipilih secara demokratis tanpa arahan ketua dewan pembina lagi, Akbar Tandjung terpilih sebagai ketua umum dan struktur pembina dihapuskan dalam bagan organisasi, Target Golkar baru bukan saja harus survive dalam era transisi yang berat, namun ingin kembali memenenangkan pemilu 1999 yang demokratis.

Mungkinkah Golkar dibawah Akbar Tandjung mengikuti sukses partai Kuomintang di Taiwan? Seperti halnya Golkar, Kuomintang

adalah partai pemerintah sebelum negara itu bertransisi menuju demokrasi, Kuomintang mengendalikan pemerintahan otoriter Taiwan selama lebih dari 40 tahun, Sementara Golkar mendominasi Orde Baru yang tidak demokratis selama lebih dari 30 Tahun

.Sejak tahun 1990-an, Taiwan bertransisi menuju demokrasi dan meyelenggarakan pemilihan umum bebas multi partai untuk pertama kalinya, Badan internasional yang sangat kritis seperti Freedom House bahkan memberi skala yang sangat tinggi bagi peyelenggaraan demokrasi di Taiwan era baru, Skala itu dibuat berdasarkan kriteria kompetisi politik, partisipasi politik dan civil liberties.

Berbagai pembenahan sistem dan reformasi politik dilakukan di Taiwan, persis seperti yang akan dilakukan di bawah Presiden Habibie saat itu, Undang-undang politik Taiwan diperbaharui untuk mendukung pemilu bebas, Berbagai tahanan politik dikeluarkan dan dibebaskan untuk mendirikan partai politik, Partai baru bermunculan dan dibolehkan mengikuti pemilu, Sementara berbagai organisasi masyarakat dan pers diberikan hak bersuara.

Diluar dugaan, kuomintang, partai dari rejim lama yang otoriter, memenangkan pemilu yang bebas dan kembali berkuasa, Ditahun 1992, Kuomintang memenangkan pemilihan parlemen, Ditahun 1994, ia memenangkan pemilihan Gubernur dan Mayor, Ditahun 1996, Kuomintang kembali memenangkan pemilihan presiden, Semuanya dimenangkan oleh Kuomintang dengan perolehan lebih dari 50% suara, Partai besar lainnya seperti Democratic Progressive Party dan New Party dikalahkan secara telak.

Indonesia tahun 1999 juga melaksanakan pemilu multi partai, ini adalah pemilu demokratis pertama di Indonesia sejak tahun 1955, Dalam pemilu tahun 1999 itu dipilih para anggota parlemen, Setelah itu dipilih presiden dan wakil presiden baru.

Dapatkah Golkar mengulangi kejayaan partai Kuomintang itu untuk kasus Indonesia? Yaitu kembali memenangkan pemilu untuk parlemen dan kemudian memenangkan pemilihan presiden, dan kembali berkuasa dalam era Indonesia baru yang demokratis?

Sebagai partai modern, sasaran utama Golkar-seperti juga sasaran semua partai di dunia-adalah bagaimana memenangkan pemilu demokratis, Memenangkan pemilu adalah satu-satunya cara agar pemimpin baru Golkar dapat mengendalikan pemerintahan sepenuhnya, Dan juga satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa mereka mampu membuat Golkar dipercaya oleh masyarakat luas.

Ada dua hal yang membedakan kondisi Golkar dan Kuomintang itu, perbedaan ini membuat pemimpin baru Golkar harus bekerja jauh lebih ekstra keras untuk mengikuti kisah sukses partai Kuomintang.

Pertama, transisi Taiwan dari otoritarianisme ke demokrasi tidak disebabkan oleh krisis ekonomi ataupun rusaknya legitimasi pemerintahan lama, Transisi ke demokrasi di Taiwan dipimpin langsung oleh partai Kuomintang sendiri untuk mengakomodasi perkembangan baru di Taiwan, Walau ada ketidakpuasan atas rejim lama, legitimasi dan kepemimpinan moral partai Kuomintang tidaklah rusak, Mereka dapat membuat klaim bahwa mereka atas inisiatif sendiri memimpin perubahan politik.

Ini berbeda dengan Golkar, transisi di Indonesia didahului oleh krisis ekonomi dan membusuknya sistem politik Order Baru, Kondisi ini menyebabkan kebencian masyarakat atas sistem lama meluas, Golkar tidak beruntung karena dianggap penopang utama pemerintahan lama, Transisi itu pun tidak dipimpin oleh Golkar sejak awal, tetapi oleh kelompok oposisi yang dimotori oleh gerakan mahasiswa. Berbeda dengan Kuomintang, citra moral Golkar di mata publik jauh lebih buruk, Untungnya, ketua umum Golkar yang baru datang dari kubu reformasi, Ini cukup menolong walau sama sekali tidak dapat menghapuskan sepenuhnya kemarahan massa atas sepak terjang Golkar di era sebelum reformasi.

Kedua, Taiwan sama sekali tidak ada pengalaman demokrasi, Transisi ke demokrasi di Taiwan benar-benar dari transisi otoritarianisme, Oposisi menjadi lebih sulit untuk mempengaruhi masyarakat pemilih karena tradisi untuk mengambil jarak, apalagi berseberangan dengan partai pemerintah, tidak pernah dilembagakan.

Indonesia berbeda, Kita punya pengalaman dengan demokrasi ditahun 1950-an, Di era ini begitu banyak partai kuat yang berdiri, Walau berbagai partai itu sudah hilang ataupun dilarang berdiri sebagai partai, loyalitas komunitas terhadap aliran politik partai lama masih kuat, Akibatnya, di era baru, partai itu dapat bangkit kembali dan mengambil kembali para pemilih yang selama ini memberi suara ke Golkar.

NU, Muhammadiyah dan Soekarnoisme punya massa sangat besar, yang punya partainya sendiri bersaing dengan Golkar, Ketua umum Golkar, Akbar Tandjung, harus bersaing pula dengan tokoh-tokoh yang punya daya tarik massa, seperti Megawati(Soekarnois), Gus Dur(NU) dan Amien Rais(Muhammadiyah). Inilah alasan mengapa sulit bagi Golkar untuk mengikuti kisah sukses partai Kuomintang di Taiwan, Kondisi dua partai itu sangat berbeda, Namun, sulit itu tidak berarti mustahil, Bagaimanapun juga kemampuan pemimpin dalam berpolitik dapat mempengaruhi hasil akhir.

Salah satu kemungkinan yang dapat membawa Golkar menang jika komunitas di atas(Soekarnois, NU, dan Muhammadiyah), masing-masing pecah ke berbagai partai sehingga suara mereka tidak terkonsentrasi ke satu partai besar, Atau, Golkar sendiri mampu menampilkan dan merekrut calon yang punya daya tarik kuat bagi komunitas di atas, Suka atau tidak, tiga komunitas itulah yang kini punya massa yang besar dan mengakar.

LANGKAH AWAL PDI-PERJUANGAN

KONSOLIDASI awal PDI-Perjuangan adalah di Bali, awal Oktober 1998, saat itu nama PDI-Perjuangan belum dilegalisasi oleh pendukung Megawati, Pertikaian internal dua PDI masih terus berlanjut dan saling mengklaim untuk memakai bendera PDI, Selama berkuasanya Soeharto, PDI-Perjuangan dimarginalkan dan terus hidup bergerak secara underground, Jatuhnya Soeharto dan akan diadakannya kembali pemilu menjadi kesempatan PDI-Perjuangan untuk konsolidasi.

Di Bali, Megawati Soekarnoputri tidak sekedar dikukuhkan kembali sebagai ketua umum, Lebih dari itu, ia semakin berevolusi menuju pemimpin yang kharismatik, Dukungan atas dirinya bulat, Emosi pendukung atas dirinya sangat dalam, Kini koalisi politik yang ia bangun semakin lebar dan kuat, meliputi warga NU dari sayap Gus Dur dan para purnawirawan militer.

Karena potensinya yang besar untuk menjadi pemimpin nasional, saatnya Megawati masuk kedalam dunia publik untuk ditinjau secara kritis, Apa yang menjadi Visi Megawati? Seberapa jauh ia mewakili visi reformasi yang telah menjatuhkan Soeharto?

Membaca Pidato panjang Megawati dalam pembukaan kongres(8 Okotober 1998), dua hal segera terasa, Megawati mewakili visi ekonomi reformasi dan membawa perubahan yang mendasar dalam kelompoknya yang populistik, Ia membawa tradisi baru yang sudah berkembang di Amerika Latin, yaitu the New Populism, Populisme Baru, Namun di bidang politik, Megawati terasa setengah hati.

Pertama-tama ingin dijelaskan dulu apa pengertian dari populisme, dan dimana bedanya antara populisme lama(Classic Populism) dan populisme baru(New Populism).

Populisme adalah ideologi yang populer di dunia ketiga, terutama setelah perang dunia II, Istilah populisme itu merujuk kepada cita-cita tumbuhnya masyarakat ekonomi dan politik yang berorientasi kerakyatan, Pendukung populisme ini adalah elit politik yang berorientasi kepada rakyat kecil dan sektor populer yang berbasis massa seperti buruh, petani, rakyat pedesaan dan aneka wong cilik lainnya.

Populisme lama memiliki kebijakan ekonomi yang nasionalistik dan peran negara yang besar untuk program kesejahteraan rakyat, Karena pendukung utama populisme ini adalah rakyat kecil yang banyak, pemerintah dijadikan alat untuk mengangkat kehidupan rakyat kecil itu, Pemerintah menjadi sangat aktif di dunia ekonomi, seperti memberikan subsidi, memberikan keistimewaan kepada kelompok usaha kecil dan menengah dan memproteksi ekonomi negara dari produk asing.

Pemerintah dalam populisme lama dengan sendirinya anti atau setidaknya tidak bersahabat dengan ekonomi pasar yang terbuka, Liberalisme ekonomi yang bersandar kepada kompetisi bebas, pemerintahan yang pasif dan netral, dan keterbukaan atas perdagangan internasional yang bebas, serta investasi asing, menjadi musuh utama populisme lama, Liberalisme ekonomi ini dianggap akan mempertinggi jurang kaya dan miskin, dan merugikan wong cilik yang menjadi konstituensi utama populisme lama.

Namun Populisme Baru membawa perubahan yang besar, Populisme baru justru mengadopsi prinsip ekonomi liberal, yang dulu menjadi musuh utama kaum populis, Evolusi Populisme ini, dari bentuknya yang lama ke baru, terjadi di tahun delapan puluhan, terutama di Amerika Latin, Saat itu para pemimpin populis sedang berada di puncak kekuasaan, Mereka adalah Carlos Menem di Argentina, Fujimori di Peru dan Carlos Selinas di Mexico.

Globalisasi ekonomi dan perkembangan ilmu ekonomi dianggap sudah sedemikian rupa, Ekonomi yang populis, dengan peran pemerintah yang besar serta proteksi produk dalam negeri memberikan banyak komplikasi buruk, Peran pemerintah yang besar itu disatu sisi menjadi sarang korupsi dan ekonomi biaya tinggi, Disisi lain, ia tidak efisien dantidak membuat ekonomi kuat untuk bersaing secara internasional, Ekonomi pasar dianggap jalan yang tidak terhindari.

Populisme Baru ini terbaca pula dalam pidato Megawati, Sebagaimana ayahnya Bung Karno, orientasi kerakyatan Megawati sangat kuat, Dalam Pidato itu, kata “rakyat “ia sebut lebih dari enam puluh kali, Namun berbeda dengan ayahnya dan populis lama, yang anti liberalisme dengan berbagai jargonnya, Megawati justru mendukung ekonomi pasar.

Dalam pidato itu ia sebut: “Kalau dalam desakan gelombang globalisasi, perekonomian kita harus menerapkan sistem ekonomi pasar yang terbuka, maka sebagai bangsa yang percaya diri, seharusnya kita tidak perlu meras cemas dan takut, “Megawati pun berkata: “Kita harus memenangkan hak-hak ekonomi rakyat kita, dengan tanpa harus melakukan distorsi terhadap ekonomi pasar itu sendiri, “Sambung Megawati lagi: “Maka segala bentuk ketakutan terhadap praktek-praktek neo-kolonialisme lewat pintu pasar terbuka sebagaimana kekhawatiran banyak orang rasanya tidak perlu kita jadikan permasalahan yang hanya membuat kita menjadi bangsa yang kerdil dan tidak mampu menghadapi kenyataan, “

Ditinjau dari kacamata Populisme Lama, apa yang Megawati lakukan adalah sebuah evolusi yang sangat besar dan bermakna,

Bagi kelompok populis, Megawati melakukan sebuah lompatan copernicus, Megawati masuk dalam jajaran para pemimpin Populis Baru sebagaimana Fujimori, Carlos Menem dan Carlos Salinas di Amerika Latin, Mereka membawa perubahan besar ke kelompok mereka yang populis, yang anti ekonomi liberal menjadi bersahabat bahkan pendukung utamanya.

Dari sisi ekonomi, Megawati membawa visi reformasi yang diperjuangkan para mahasiswa dalam gerakan sosial menjatuhkan Soeharto tahun 1998, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah akibat tidak diberlakukannya ekonomi liberal yang menjunjung kompetisi terbuka dan peran pemerintah yang minimal dalam ekonomi.

Namun di dunia politik, sikap Megawati tidak tegas, Memang Megawati berbicara lantang tentang perlunya rule of law, hak asasi manusia dan pers yang bebas, Namun tidak eksplisit dalam hal Dwi Fungsi ABRI, Apakah Megawati mendukung supremasi sipil atas militer? Apakah Ia meminta ABRI menjadi tentara profesional yang tidak lagi berpolitik? sikap Megawati atas isu ini tidak setegas sikapnya atas ekonomi pasar bebas dan isu lainnya.

Ini yang cukup mengherankan, Sementara Megawati menyerukan perlunya transparansi dalam sistem pemerintahan, ia sendiri tidak transparan dalam sikapnya atas politik ABRI, Megawati hanya berkata: "Sengaja saya tidak secara spesifik membicarakan masalah Dwi Fungsi ABRI; karena pada dasarnya telah sangat jelas ; bidang kerja apa dan wilayah tanggung jawab yang mana, yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sipil disatu sisi dan militer di sisi lain, "Pernyataan ini tidak dengan sendirinya menyatakan dukungan atau penolakan terhadap Dwi fungsi ABRI ataupun supremasi sipil atas militer.

Gerakan reformasi yang dipimpin para mahasiswa Indonesia sangat tegas tentang Dwi Fungsi ABRI, Prinsipnya sederhana, Demokrasi memisahkan peran antara para pengambil kebijakan politik dan pelaksana kebijakan politik, Pengambil kebijakan politik bertanggung

jawab penuh atas pilihan kebijakannya karena konsekuensi kebijakan itu langsung mempengaruhi kehidupan rakyat banyak. Rakyat banyak itu sendiri yang harus memilih siapa pihak yang ia percaya untuk mengambil kebijakan politik, Mekanisme untuk itu adalah pemilihan umum, Pengambilan kebijakan politik adalah para politisi yang ikut dalam pemilihan umum itu, Jika rakyat tidak meyetujui mereka, maka rakyat tidak akan memilih mereka lagi dalam pemilu berikutnya.

Posisi militer dan pegawai negeri ada pada level pelaksana kebijakan politik bukan pembuat kebijakan politik, Baik pegawai negeri ataupun militer tidak boleh ikut berpolitik karena jasa mereka akan digunakan oleh siapapun yang memenangkan kompetisi politik(pemilu), Jika militer ikut berpolitik, siapa yang mampu bersaing dengan militer? Dan apa jadinya jika militer ikut dikalahkan secara politik, karena politisi, siapapun dia, selalu membutuhkan militer untuk menjaga keamanan negara? Bagaimana pula prosedur rakyat untuk mengevaluasi politik militer karena militer tidak ikut pemilihan umum?

Tidak ikutnya militer dalam politik sudah menjadi etika dunia dan bagian mendasar dari prinsip demokrasi dimanapun, Baik di Amerika Serikat, Eropa, Asia dan Amerika Latin, yang jumlahnya puluhan itu, yang tumbuh baik secara ekonomi dan politik, tidak lagi mempunyai militer yang aktif di politik, Di Amerika Latin sebelum tahun tujuh puluhan, peran militer di politik jauh lebih dalam dan terlembaga dibandingkan di Indonesia, Kini di berbagai negara itu, militer melakukan reformasi dan menjadi tentara profesional belaka yang tidak lagi berpolitik.

Satu alasan mempertahankan Dwi Fungsi ABRI yang sering dinyatakan adalah realisme politik, Dianggap tidak realistis meminta ABRI tidak lagi berpolitik karena realitas meunjukkan ABRI sangat kuat secara politik dan tidak bisa diabaikan begitu saja, Alasan ini mempunyai cacat mendasar, Militer itu sangat kuat tidak hanya di Indonesia, tetapi di semua negara, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat, Kekuatan mana yang lebih kuat dari angkatan perangnya di

semua negara di dunia? Jika alasan ini sah berarti militer di Amerika Serikat dan Eropa pun harus punya peran politik.

Alasan itu jelas melupakan logika mendasar bahwa sistem politik harus dibangun bukan berdasarkan realitas politik tetapi prinsip politik, Realitas Politik selalu berubah-ubah dan tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri, Sedangkan prinsip politik memiliki kerangka kerja dan arah, dan untuk prinsip demokrasi, kerangka itu sudah di uji ratusan tahun.

Jika ABRI tidak lagi berpolitik, politik menjadi wilayah yang dapat dipertanggungjawabkan dimana rakyat banyak punya mekanisme untuk mengevaluasi, Politik disediakan hanya kepada mereka yang ikut berkompetisi melalui pemilu, Di semua negara demokrasi, militer dan pegawai negeri sebagai korps dan institusi memang sudah dirancang sebagai pelaksana kebijakan politik belaka bukan pembuatnya.

Sangatlah sayang Megawati Soekarnoputri tidak memberikan sikap tegas terhadap isu ini, Karena potensinya yang besar sebagai pemimpin nasional, dan komitmennya sendiri atas pentingnya transparansi, tidaklah salah jika Megawati diminta oleh publik untuk lebih mempertegas sikapnya, Sehingga publik punya bahan untuk menilai apakah Megawati dapat menjadi pembawa obor reformasi itu?

PARTAI ISLAM MENCARI FORMAT

JATUHNYA Soeharto membuka pula kemungkinan berdirinya berbagai partai dengan asas Islam. Di era Soeharto, asas Islam itu ditabukan karena bertentangan dengan ideologi negara Pancasila yang sudah ditunggalakan untuk menjadi asas seluruh partai politik serta organisasi kemasyarakatan. Mereka yang merasa memiliki basis umat Islam yang merupakan 90% penduduk Indonesia kini dihadapkan pada dua pilihan: Memilih Islam sebagai asas dan arah politik atau memilih asas terbuka yang plural.

Bagaimanakah sebaiknya politik Islam mengambil tempat dalam era reformasi di tanah air sekarang ini? Hal ini sangat penting diperdebatkan secara serius setidaknya karena dua alasan, Pertama, tidak bisa dipungkiri, bahwa Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia yang menggores secara dalam ke batin pemeluknya, Sentimen keislaman sangat mudah memberi motivasi dan menggugah massa, Kedua, belum ditemukannya format yang pas antara politik Islam dan prinsip demokrasi modern, yang memuaskan baik bagi pendukung demokrasi, ataupun politik Islam.

Dikalangan umat islam sendiri di Indonesia saat itu ada dua kubu yang berbeda jalan, Kubu pertama sacara sangat baik direpresentasikan oleh Nurcholis Madjid, Kubu kedua diwakili oleh Deliar Noer, Dua tokoh ini dikenal sejak lama kejuangannya didalam pergerakan islam, Integritas pribadi dan wibawa sosial keduanya juga dihormati, Pengetahuan mereka tentang politik Islam tidak ada pula yang ragu, Dan keduanya adalah doktor yang mengenyam pendidikan barat, tamat dari universita terkemuka di Amerika Serikat, Toh keduanya bersimpang pendapat. Di mesjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, akhir Juni 1998, Prof, Dr, Deliar Noer, bersama sejumlah rekan, mendeklarasikan berdirinya sebuah partai isalm yang diberi nama Partai Umat Islam(PUI), Partai ini diikuti dalam pemilu 1999.

Sebelum itu, sejak lama Cak Nur(Nurcholish Madjid) mengajukan sebaiknya jangan memunculkan komunalisme dalam pendirian partai baru, Anjuran Cak Nur ini adalah kelanjutan sikap politiknya sejak lama, islam yes partai islam No! Cak Nur mengakui bahwa pendirian partai yang berlandaskan agama adalah hak asasi warga negara dan dijamin dalam prinsip demokrasi, Namun dari sisi kemanfaatan dan kesiapan masyarakat, partai yang ada sebaiknya berdasarkan pada platform isu soal ekonomi, seperti keadilan atau kebhinekaan, Sedangkan agama harus tetap sebagai sumber moral publik yang tidak dipolitisasi dalam kancah pertarungan politik. Sayangnya sejarah belum menyediakan sebuah contoh yang memuaskan bagaimana sebuah negara demokrasi yang mayoritasnya umat islam berurusan dengan kebebasan pendirian partai islam, Satu-satunya contoh yang tersedia adalah Turki, contoh yang tidak memuaskan.

Turki dianggap satu-satunya negara yang mayoritas penduduknya islam yang menerapkan prinsip demokrasi modern, Sejak tahun 1920-an, Kemal Ataturk ingin membangun Turki menyerupai negara Barat, yang modern dan sekuler, Namun berbeda dengan negara Barat, Turki secara mendalam digores oleh agama dan sejarah islam, Kerajaan islam yang berskala internasional terakhir berempat di Turki, Akibatnya, Turki harus menempuh jalannya sendiri yang sedikit banyak berbeda dengan barat.

Dua hal penting yang ditinggalkan oleh Ataturk, Pertama, diadopsinya konstitusi modern yang dimodifikasi, Konstitusi ini menjamin kebebasan berserikat dan mendirikan partai, Pemilu yang bebas dengan sistem multi partai diadakan secara periodik sejak tahun 1950, Namun berbeda dengan barat, konstitusi turki melarang pendirian partai yang berlandaskan etnik, agama ataupun ideologi komunis.

Kedua, dibagunnya militer yang sangat kuat dan setia kepada cita-cita negara sekuler, Disiplin militer ditumbuhkan secara sangat ketat, Kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya dilarang diselenggarakan dalam gedung resmi militer, Kalangan militer tidak pula merekrut anggota baru yang lulus dari sekolah keagamaan, Berbeda pula dengan barat, militer diberi hak untuk terlibat dalam politik untuk menjaga kelangsungan negara turki yang sekuler.

Situasi politik di Turki menjadi sangat unik, Dalam tataran formal kelembagaan politik, Turki sangat sekuler, Namun di arus bawah masyarakat luas, sentimen keislaman selalu muncul dalam wacana politik, Akibatnya di setiap dekade, sejak tahun 1970-an, militer selalu terlibat dalam kudeta ataupun intervensi yang melarang dan mencabut izin sebuah partai politik yang mereka duga ingin mendirikan negara islam.

Di tahun 1970, Turki memiliki partai yang sangat kuat, National Order Party(NOP), Partai ini dipimpin oleh Erbakan dan didukung oleh Mehmet Zait Kotku, pemimpin gerakan islam dari Naksibendi Order, Di tahun 1971, setelah melakukan kudeta militer, pengadilan konstitusi melarang partai ini, Erbakan kemudian meloloskan diri ke Switserland dan tinggal disana sampai tahun 1972. Sepeniggal Erbakan, berbagai rekannya mendirikan partai baru, National Salvation Party(NSP), Erbakan kembali memimpin partai ini, Namun kemudian partai ini kembali dilarang setelah terjadinya kudeta militer di tahun 1980.

Kelompok yang sama lalu mendirikan partai baru: Refah Party setelah tahun 1987, Erbakan kembali memimpin partai ini, Kejutan

besar terjadi, Di tahun 1995, partai ini memenangkan pemilu, Erbakan terpilih sebagai perdana menteri pertama yang berasal dari partai yang berspirit islam, Namun militer kembali bereaksi, Erbakan dijatuhkan dengan mosi tidak percaya di parlemen, Di awal tahun 1998, pengadilan konstitusi sekali lagi melarang Refah Party.

Alasan pelarangan ketiga partai di atas selalu sama, Partai tersebut dikhawatirkan mengganti konstitusi Turki yang sekuler dengan sistem negara islam, Pihak yang menjegal partai itu juga sama, militer yang ingin tetap setia kepada cita-cita negara Turki yang sekuler.

Kita mungkin dapat menerapkan sistem yang lebih luwes dibandingkan Turki, Partai islam dibolehkan berdiri sesuai dengan prinsip demokrasi modern, Namun partai itu harus menyatakan kesetiaannya secara tertulis terhadap konstitusi negara, Konstitusi kita sekarang, UUD 1945, dilengkapi dengan amandemen yang memasukan secara eksplisit prinsip demokrasi modern dan hak asasi manusia, Mahkamah Agung ditugaskan mengawal konstitusi yang sudah diperbaharui itu.

KOMUNIKASI BERSAMA ANTAR PARTAI

ERA multi partai setelah jatuhnya Soeharto diwarnai oleh aneka manuver, Sejak tahun 1955, sekitar lebih dari 40 tahun sebelumnya, momentum kebebasan seperti saat itu belum pernah dirasakan para elit, Berbagai trial and error dilakukan dan dicoba untuk mencari format yang pas, Satu diantaranya, yang memang merupakan fenomena baru adalah membuat komunikasi bersama antar partai politik.

Tiga partai dengan jumlah massa yang besar, PDI-Perjuangan, PAN, dan PKB membuat komunikasi bersama, Respon publik atas komunikasi ini sangat antusias, Bahkan banyak yang berharap ketiga partai ini berkoalisi dalam satu front, untuk mengalahkan Golkar, partai politik wakil dari dunia lama.

Ujar sebuah pepatah, “What important is not the singers but the song,” yang penting bukanlah penyanyinya, tetapi lagu apa yang akan dinyanyikan, Untuk kasus ini, yang penting bukan koalisi partainya, tetapi platform atau isu apa yang ingin diperjuangkan partai ini bersama-sama.

Sayangnya ketiga partai ini baru mengikatkan diri pada label politik, belum pada isu. Mereka melabelkan atau dilabelkan publik sebagai kelompok reformis, Sedangkan lawan mereka, partai Golkar dan Habibie, dilabel sebagai kekuatan status quo, Politik label ini mungkin populer untuk konsumsi massa, Namun untuk membangun program yang serius, label politik dapat menipu, Di era baru, yang harus dikedepankan bukan lagi label tetapi isu.

Label dan isu dapat berbeda sekali, Jika isu yang dinilai, sangat mungkin partai yang dilabelkan status quo ternyata punya banyak isu yang reformis, Sebaliknya, partai yang dilabelkan reformis memiliki banyak isu yang status quo.

Ambilah contoh Golkar dan Habibie yang dilabel sebagai sebagai status quo, Untuk isu kebebasan politik, pemerintahan Habibie sangat reformis, kebebasan pers, kebebasan partai politik, pembebasan tahanan politik, penghapusan istilah bersih lingkungan, adalah isu yang sangat penting yang menjadi sokoguru demokrasi. Untuk beberapa isu, pemerintahan Habibie yang dilabel status quo bahkan lebih maju dari partai yang diberi label reformis itu, Untuk isu Timor Timur, misalnya, dua pilihan yang ditawarkan Habibie, Merdeka atau otonomi luas, sangatlah liberal, Dalam hal Timor Timur, pemerintahan Habibie bahkan lebih maju dari PDI-Perjuangan.

Juga untuk isu ekonomi, Pemisahan Bank Indonesia dari struktur eksekutif adalah kebijakan ekonomi yang sangat mencerahkan, Isu ini jelas sangat reformis dan mendahului partai lainnya yang berlabel reformis.

Sebaliknya, partai yang selama ini dilabel reformis, banyak mengeluarkan isu yang sangat berbau status quo, Ketidaktegasan PDI-Perjuangan dan PKB atas posisi militer di DPR tidak mencerahkan, PKB pun belum terdengar mempunyai team ekonomi yang tangguh dengan isu ekonomi yang liberal.

Pertanyaannya, mengapa koalisi tiga partai ini hanya beranjak pada label politik saja dan belum ke isu bersama? Ada empat kemungkinan,

Pertama, jika mereka membuat isu dan platform bersama, mungkin komunikasi bersama tidak pernah terbentuk, Tiga partai itu berbeda di banyak isu, Untuk isu negara federasi, misalnya, jelas PAN sangat berbeda dengan PDI-Perjuangan, Untuk isu posisi ABRI di DPR, PKB juga berbeda dengan PAN, Jika mereka hanya bergerak di politik label, label sebagai sesama partai reformis, perpecahan itu dapat dihindari.

Kedua, ini mungkin baru langkah awal, Disadari bahwa begitu banyak perbedaan ketiga partai ini, Belum lagi dihitung persaingan pribadi antar para pemimpin partai, Agar ketiga partai dapat bersatu dalam satu front, harus dimulai dengan mencari kesamaan yang paling umum, Ibarat makan bubur panas, gerak sendok harus dimulai dari pinggir dulu, baru ke tengah, Pada akhirnya isu dan platform bersama harus digarap juga.

Ketiga, ini memang kondisi partai politik baru, Dalam evolusi awal kematangan sebuah partai, isu dan platform belum memainkan peranan penting, Yang lebih utama adalah masalah kepemimpinan partai, PDI-Perjuangan menjadi besar, misalnya, terutama bukan karena program politik partai itu, tetapi akibat kehadiran Megawati Soekarnoputri, Jika Megawati pindah ke PNI, mungkin PNI akan lebih besar daripada PDI-Perjuangan.

Hal yang sama terjadi dengan Gus Dur dan Amien Rais, Jika yang didukung Gus Dur adalah partai Sunni atau PNU, PKB tidak sebesar sekarang, Atau jika Amien Rais tidak memimpin PAN, mungkin PAN tidak banyak dikutip koran.

Karena dalam tahap awal ini, pemimpin lebih menentukan dari platform dan isu, koalisi ketiga partai itu harus dimulai dari koalisi pemimpinnya, ketimbang koalisi isu, Seandainya tiga pemimpin partai itu sepakat untuk berkongkalikong, isu dan platform bersama dapat dimodifikasi dengan mudah, Toh belum banyak pemilih yang benar-benar awas dengan platform dan isu.

Keempat, target utama koalisi ini adalah massa, bukan elit, Massa tidak secerewet elit dalam hal isu dan platform partai.

Bagi massa, yang paling menyentuh mereka, adalah sentimen emosional dan isu besar. Dengan membungkus sentimen agama atau kharisma Bung Karno, ditambah dengan isu sembako yang umum, itu sudah cukup. Sedangkan umumnya elit, butuh eksplanasi yang lebih detail dan teknis.

Dengan kata lain, sasaran koalisi tiga partai ini, jika jadi, lebih ke soal jumlah suara yang akan di raih, konsentrasi mereka lebih ke kuantitas pemilih, bukan pada kualitas isu. Prioritas utama mereka lebih untuk mengalahkan Golkar, bukan membuat blue print sebuah perubahan.

Jika yang dituju adalah membuat blue print sebuah perubahan, aliansi antar partai harus dimulai dulu dengan membuat sebuah paket isu strategis, lalu baru mencari partai mana yang bersedia menjadi operator isu tersebut.

PENGELOMPOKAN PARTAI POLITIK

DALAM pemilu 1999 diramalkan tidak ada partai yang menang secara dominan (diatas 50%), Ini berarti, berbagai partai politik yang ada sudah harus mempersiapkan aliansi, setidaknya untuk membentuk pemerintahan baru, Presiden yang akan terpilih dalam sidang istimewa MPR, sebagai misal sudah pasti harus dapat dukungan lebih dari satu partai.

Persoalannya sekarang, apa yang akan menjadi dasar dari koalisi atau pengelompokan partai politik itu? Dua pengamat politik dari “padepokan” Ohio State Univesity, Bahtiar Effendi pada Republika edisi 18 Mei 1999 dan William Liddle di harian yang sama edisi 20 Mei 1999, memberikan analisa dan prediksi yang menarik.

Menurut Bahtiar, politik aliran masih menjadi ikatan yang kuat bagi pengelompokan partai politik, Konsep politik aliran ini berasal dari Geertz, yang mengidentifikasi tiga aliran di tahun 1950-an dalam

mainstream politik Indonesia, yaitu santri versus abangan dan priyayi, Bachtiar meyakini politik aliran masih hidup di era Indonesia paska Soeharto.

Berdasarkan politik aliran itu, menurut Bahtiar, akan terjadi dua pengelompokan politik besar, Pertama, kelompok Islam santri, yang banyak mendominasi berbagai partai Islam, akan berdiri di belakang Habibie, sedangkan kelompok abangan/priyayi akan mengelompok di belakang Megawati Seokarnoputri, Berdasarkan politik aliran ini, pemimpin yang riil akan bertarung hanyalah Habibie versus Megawati, Pemimpin lain akan mendukung dari belakang sesuai dengan politik aliran masing-masing.

Namun William Liddle memberikan perspektif lain, Di era reformasi ini, Liddle melihat munculnya benturan di luar politik aliran, yaitu antara PDI-Perjuangan, PKB dan PAN di kubu reformasi melawan Golkar, yang dibantu oleh PPP dikubu konservatif/status quo.

Berdasarkan politik aliran, jelaslah PAN, PKB dan PDI-Perjuangan berbeda satu sama lain, PAN dari islam modernis, PKB dari islam tradisional dan PDI-Perjuangan dari abangan dan kaum nasionalis, Kenyataannya mereka dapat bersatu dalam sebuah kelompok reformasi.

Bahkan, menurut Liddle, PAN, PKB dan PDI-Perjuangan, tidak dapat lagi dipandang murni mewakili politik aliran, Tiga partai ini lebih merupakan partai yang plural yang mencoba menjadi the big ten yang bersifat inklusif, Golkar pun juga merupakan partai yang plural, Partai ini tidak dapat diklaim mewakili satu politik aliran tertentu.

Empat partai besar ini terbagi dalam dua kubu yang kini tampak saling berhadapan, Dasar pengelompokan itu bukan politik aliran, tetapi semata pertentangan politik antara satu kelompok yang dianggap mewakili semangat reformasi, yang lainnya semangat konservatif, Politik aliran tidak dapat membaca peta baru pengelompokan partai politik di Indonesia.

Padangan Bahtiar dan Liddle punya kekuatannya masing-masing dan juga memiliki kelemahannya, dua kelemahan yang kentara adalah dari segi fakta konsep.

Kelemahan Bahtiar dari segi fakta sudah dikemukakan Liddle, Tambahan fakta lain adalah massa NU, Empat partai yang berasal dari satu aliran, bahkan sama-sama berbasis NU, dapat saja berakhir dengan pengelompokan politik yang berbeda, PKB, misalnya dapat menjadi lawan Habibie, Sementara PNU yang juga dari NU sebagaimana PKB, dapat menjadi pendukung Habibie.

Dari segi konsep, dikotomi santri versus abangan dan priyayi dalam politik dapat dipersoalkan, santri dan abangan pertama-tama adalah kategori kultural yang menggambarkan way of life seseorang dalam kehidupan beragama (islam), Namun jika kategori kultural itu ingin diterjemahkan kedalam afiliasi politik, banyak variabel lain yang harus dihitung.

Sepuluh santri dapat memilih sepuluh partai yang sama sekali berbeda platform dan isunya, Santri dapat mendukung Golkar, Atau pun PDI-Perjuangan, yang mungkin saling berhadapan, Sedangkan santri dan kaum abangan yang berbeda secara kultural dapat mempunyai aspirasi politik yang sama dan menjadi pendukung partai politik yang sama.

Argumen Liddle juga mempunyai kelemahan, Dari segi fakta, Liddle memasukkan PPP sebagai bagian dari kelompok konservatif, berhadapan dengan PAN, PKB dan PDI-Perjuangan, Sehari setelah tulisan Liddle dimuat, PPP ternyata bersama PAN membuat berbagai kesepakatan, PPP, partai yang diduga Liddle mendukung Habibie itu, bahkan mengecam Golkar.

Kesalahan fakta ini terjadi berasal dari kekaburan basis kategori yang digunakan Liddle, Apa yang sesungguhnya menjadi kriteria “reformasi “dan “konservatif “ itu?

Jika yang dijadikan kriteria adalah program partai, yang mana yang reformis atau konservatif, sangat tergantung dari isu, Dalam isu

tertentu, partai A tampak reformis, Tapi dalam isu lainnya, partai A sangat konservatif, Banyak program pemerintahan Habibie(yang di dominasi Golkar) yang jauh lebih reformis ketimbang sikap PDI-Perjuangan dan PKB, misalnya dalam soal Timor Timur, Sikap politik PDI-Perjuangan dan PKB pun dalam hal Dwi Fungsi ABRI tidak dapat dikatakan reformis.

Jika yang dijadikan kriteria semata-mata afiliasi partai belaka, dalam politik praktis, afiliasi dapat berubah secara cepat, PPP yang tadinya diduga Liddle mengelompok ke Golkar, malah menyebrang, Untuk kepentingan yang pragmatis, selalu mungkin PAN, PKB dan PDI Perjuangan malah berseberangan.

Kategorisasi kubu reformis dan konservatif akibatnya dapat terjatuh dalam politik label belaka, Misalnya, partai apapun yang berafiliasi dengan Golkar akan diberi label kubu konservatif, dan partai apapun yang akan berafiliasi dengan PAN akan diberi label kubu reformis, Sedangkan platform partai tidak terlalu menentukan dalam membuat kategorisasi itu.

Kategorisasi seperti ini hanya berguna untuk politik praktis dalam rangka menciptakan citra baik dan buruk, Label kubu reformasi memberikan citra baik, dan sebaliknya label kubu konservatif memberikan citra buruk, Namun untuk analisa akademis, kategorisasi ini sangat longgar.

Dalam membuat basis pengelompokan partai, ada satu variabel yang dilupakan Liddle dan Bachtiar, yaitu manuver elit partai, Yang akan menentukan pengelompokan partai bukanlah politik aliran ataupun label reformasi dan label konservatif(status quo), Yang akan menentukan pengelompokan itu adalah mauver, strategi dan pilihan elit partai, Politik aliran ataupun label reformasi dan status quo hanyalah sumber daya politik yang dapat digunakan ataupun ditolak oleh elit partai sesuai dengan kepentingannya dalam jangka waktu tertentu.

Untuk semakin memperluas dukungan, sentimen politik aliran tentu sangat berguna, Namun untuk memperoleh basis yang lebih luas dari masyarakat Indonesia yang beragam, elit partai dapat pula memanfaatkan sumberdaya politik lain, seperti label reformasi, Membatasi diri hanya pada dukungan politik aliran menyalahi prinsip politik praktis yang berkepentingan memperoleh dukungan sebanyak mungkin. Tidak pula disinggung oleh kedua pakar itu, bahwa diluar politik aliran dan label reformasi, politik uang juga akan memainkan peran sentral, Motivasi partai politik untuk berkoalisi dan bergabung tidaklah tunggal, Partai tertentu mungkin digerakkan semata oleh oleh politik aliran, Partai lain mungkin murni didorong oleh idealisme yang terbawa oleh label reformasi, Namun politik uang dapat pula menjadi dasar motivasi, terutama bagi kaum gurem.

Manuver, strategi dan pilihan elite partai-lah yang akan menemukan arah koalisi politik partai, Elit partai itu secara bebas dapat saja mencari koalisi partai melampaui sekat-sekat politik aliran, Elite partai itu bahkan dengan mudah dapat mencari dukungan melampaui sekat kubu reformasi atau kubu konservatif(status quo), Elit partai sangat mungkin juga meluaskan dukungan dengan memainkan politik uang.

Berdasarkan analisa di atas, pengelompokan partai politik kelak, apalagi menjelang pemilihan presiden, sangat fleksibel dan terbuka, Elit partai yang ingin menjadi presiden akan mengerahkan semua sumber daya yang ada, mulai dari sentimen politik aliran, label reformasi, dan mungkin pula politik uang dan janji kursi kekuasaan, Akibatnya partai mungkin akan berkelompok dengan basis yang aneh, Basis itu tidak akan dikenali lagi oleh pengkubuan berdasarkan politik aliran ataupun pengkubuan reformasi versus konservatif(status quo) belaka.

TRANSISI YANG DAMAI ATAU BERDARAH

PEMILU demokratis pertama sejak tahun 1955 diselenggarakan pada tahun 1999 ini, Sukses tidaknya pemilu itu niscaya menentukan bulat lonjongnya negara kita, Pemilu yang sukses akan mampu mengantarkan Indonesia bertransisi ke demokrasi secara damai, Namun pemilu yang rendah legitimasinya akan membawa kita ke dalam anarkhi yang berkepanjangan, Bukan mustahil Indonesia akan menjadi Yugoslavia di Asia yang mengalami konflik sipil berdarah dan perpecahan negara.

Selama bulan puasa sepanjang Januari 1999, kondisi politik relatif dingin, walau masih terjadi kerusuhan di beberapa tempat, Namun ketenangan bulan puasa tidak mencerminkan pergolakan politik yang sebenarnya, Berbagai pihak secara sengaja menahan diri dan menunda manuver politik karena menghormati bulan yang suci, Setelah selesai lebaran, berbagai kelompok politik tampil apa adanya. Kondisi obyektif yang ada, setelah lebaran, memungkinkan kerusuhan akan terjadi semakin sering, Kerusuhan itu dapat mengambil bentuk gerakan separatisme di Aceh atau Irian Jaya, Lalu gerakan lokal itu

meluas menjadi konflik nasional, Kerusuhan dapat pula terjadi di daerah lain dan sengaja diciptakan sebagai sebuah manuver untuk bargaining politik elit yang tengah berkonflik, Kerusuhan mungkin pula murni sebagai gerakan kriminal karena meluasnya ketidakpuasan akibat krisis ekonomi ataupun konflik yang bernuansa SARA, Apapun penyebabnya, kerusuhan itu berpotensi menyulut anarkhi dan dendam yang berkepanjangan.

Melihat situasi yang ada gerakan mahasiswa akan lebih sering terjadi, Menjelang pemilu, politisasi dikalangan mahasiswa meningkat, Namun berbeda dengan sebelumnya, kelompok mahasiswa tahun 1999 akan lebih terfragmentasi, terpecah belah namun makin berpengalaman dan terampil dalam memainkan manuvernya, Berbeda pula dengan sebelumnya, sebagian kelompok mahasiswa kini tidak lagi mengharamkan kekerasan, Perbedaan dalam visi politik dan metode aksi memungkinkan kelompok mahasiswa terlibat konflik antar mereka sendiri, Potensi ini akan menambah rawan kondisi politik.

Menjelang pemilu, konflik antar elit akan pula semakin terbuka, Saling menyerang dan mendiskreditkan lawan antar elit akan semakin sering kita dengar, Hal ini sebagian disebabkan oleh strategi politik biasa menyambut pemilu, Sebagian lagi, ia disebabkan oleh adanya konflik laten antar elit sendiri yang tidak tuntas, Sekali lagi, apapun yang menjadi sebab, konflik itu juga menambah rawan situasi. Dua model transisi kini ada dihadapan kita, Pertama, model transisi ala eropa Selatan, seperti Spanyol, Portugal dan Yunani, Kedua, model transisi ala negara bekas komunis seperti Rusia dan Yugoslavia, Negara Eropa Selatan mampu bertransisi secara relatif damai, Namun negara bekas komunis seperti Yugoslavia dan Rusia menuju anarkhi yang berkepanjangan, Yang mana yang akan terjadi di Indonesia?

Empat variabel akan menentukan apakah sebuah negara akan menjalani transisi yang damai atautkah anarkhi yang berdarah:

watak dari civil society, kondisi political society, kemampuan pemerintah(state capacity /governability) dan kondisi ekonomi, Empat variabel ini saling mempengaruhi.

Pertama, adalah soal civil society, konsep civil society mengacu kepada dinamika dan otonomi organisasi kemasyarakatan, Dalam masyarakat yang tengah bertransisi, civil society sangat penuh dinamika dan terlibat secara emosional dengan persoalan publik, Namun civil society mempunyai dua karakter yang efeknya bertentangan, yaitu karakter demokratis dan sektarian atau parokial.

Civil society disebut berkarakter demokratis jika ia dihidupi oleh semangat yang menghargai pluralisme, kesamaan hak antar warga, kesediaan berkompromi untuk mewujudkan platform bersama yang demokratis, serta saling terbuka atas krtitik, Sebaliknya, civil society berkarater sektarian jika ia dimotivasi oleh fanatisme ideologi atau agama, anti pluralisme, menginginkan hak-hak khusus dan istimewa bagi kelompoknya sendiri dan anti kritik pula.

Hanya civil society yang berkarakter demokratis yang menyumbang pada terselenggaranya transisi secara damai, Sedangkan yang sektarian dan parokial justru menjadi bara yang dapat menyulut konflik horizontal antara berbagai kekuatan dalam masyarakat itu sendiri, Semakin dinamik, aktif dan otonom sebuah organisasi sosial, jika ia bersifat sektarian dan parokial, semakin ia berpotensi membawa bangsa ke arah anarkhi.

Kedua adalah soal masyarakat politik(political society), Konsep ini mengacu kepada aturan main yang menjadi mekanisme kompetisi politik antar aktor dan orgaisasi politik, Dalam negara yang tengah bertransisi, semua kelompok punya semangat yang sama untuk mengontrol dan terpilih menjadi pemerintah melalui pemilu, Aturan main politik menjadi sangat penting.

Masyarakat Politik juga memiliki dua karakter, Yang satu adalah msasyarakat politik yang harmoni karena terjadinya konsensus antar elit penting tentang aturan main itu, Yang lainnya adalah masyarakat

politik yang terdisintegrasikan karena meluasnya ketidakpuasan di kalangan elit atas aturan main politik yang ditetapkan.

Masyarakat politik yang harmonis akan mudah menerima kemenangan ataupun kekalahan dalam sebuah kompetisi politik. Penyebabnya karena mereka mempercayai sifat adil dan jujur dari kompetisi. Yang kalah memang merasa dikalahkan secara fair, bukan dicurangi oleh aturan main yang manipulatif. Masyarakat politik yang harmonis sangat menyumbang bagi transisi demokrasi yang damai.

Sebaliknya masyarakat politik yang terdisintegrasikan sangatlah rawan. Kekalahan dan kemenangan sulit diterima dengan lapang dada. Ini bukan semata karena kurangnya kebesaran jiwa para aktor politik. Namun juga disebabkan oleh perasaan dizalimi oleh aturan main yang manipulatif, yang tidak adil atau malah tidak jujur. Akibatnya konflik politik tidak akan menyusut setelah terseleggarannya kompetisi politik melalui pemilu. Sebaliknya konflik itu akan semakin mengganas. Masyarakat politik yang terdisintegrasikan dengan cepat akan membawa negara ke dalam anarki yang berkepanjangan.

Ketiga adalah soal kemampuan pemerintah. Konsep ini merujuk pada efektivitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya. Bagaimanapun, pemerintah adalah satu-satunya organ yang sah untuk bertindak dengan mengatasnamakan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah yang efektif sangat mudah mempengaruhi kondisi politik secara nasional.

Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang dipercaya. Berbagai kebijakan pemerintah dipercaya masyarakat sebagai upaya untuk mendahulukan kepentingan publik. Pemerintah jenis ini dapat mempengaruhi transisi ke demokrasi secara damai. Sebaliknya, pemerintahan yang lemah adalah pemerintahan yang kehilangan legitimasi. Berbagai kebijakan yang dibuat pemerintahan yang lemah, dengan mudah ditafsirkan oleh kelompok politik lain sebagai upaya manipulatif untuk mengelabui pihak lawan dan mencari keuntungan bagi kelompoknya sendiri. Dengan sendirinya, kebijakan pemerintah

itu bukannya diikuti, malah dilawan, Pemerintahan jenis ini malah berpotensi membawa negara menuju anarkhi.

Keempat adalah soal kondisi ekonomi, Memang ekonomi bukan satu-satunya goal, Namun kondisi ekonomi besar peranannya karena ia berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok, seperti harga makanan, tersedianya pekerjaan, Perekonomian yang tumbuh akan memberi kesejahteraan yang lebih besar kepada masyarakatnya, Kepuasan publik meningkat, Kepuasan yang meningkat dengan mudah mampu membawa publik bertransisi menuju demokrasi secara damai.

Sebaliknya ekonomi yang tidak tumbuh, apalagi yang tengah berada dalam krisis mendalam, menyebarkan ketidakpuasan, Masyarakat akan menjadi rumput kering yang sangat mudah dibakar untuk melawan dan marah secara masal, Ketika harga beras semakin mahal sementara harga diri semakin murah, massa dengan mudah dapat dibeli untuk bertindak sesuai keinginan para provokator politik, Krisis ekonomi sangat mudah disulut dan berakhir dengan anarkhi yang berkepanjangan.

Bagaimana kondisi politik Indonesia menjelang pemilu 1999 jika dipandang dari empat variabel diatas? Civil society di Indonesia memang tengah bangkit akibat kebebasan politik yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, Namun civil society di ditanah air tidak hanya diwarnai oleh karakter demokratis, Banyak pula karakter sektarian yang dengan mudah memancing konflik horizontal antar kelompok masyarakat sendiri, Berbagai konflik yang bernuansa SARA terus berhembus dan menjadi api dalam sekam yang selalu siap membakar.

Masyarakat politik(political society) juga tidak harmoni, Belum ada konsensus dan kesepakatan aturan main kompetisi politik yang diterima secara luas, Elit di DPR masih saja terus berkonflik tentang jumlah anggota ABRI di DPR, varian pemilu, dan hak pegawai negeri

berpartai politik, Belum lagi jika dihitung berbagai tuntutan politik di luar DPR, seperti isu presidium, komite rakyat ataupun penghapusan Dwi Fungsi ABRI secara total dan sekarang juga.

Pemerintah yang adapun bukanlah pemerintah yang kuat, Berbagai cendekiawan yang dihormati menyerukan presiden Presiden Habibie untuk tidak mencalonkan diri lagi agar kebijakannya dipercaya sebagai upaya untuk kepentingan publik, Bukan seruan cendekiawan itu benar yang penting, namun seruan semacam itu dapat menjadi ukuran rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat atas pemerintah sekarang, Kebijakan yang dibuat pemerintah akan sulit ditaati, ABRI sebagai penjaga keamanan semakin pula tidak dihormati akibat berbagai kekerasan politik dimasa lalu dan kini.

Sementara kondisi ekonomi tidak juga kunjung membaik, Rupiah menjelang lebaran semakin terpuruk, Jumlah pengangguran semakin naik dan harga makanan semakin sulit dijangkau, Ketidakpuasan terus meluas dan sangat mudah dirubah menjadi kemarahan masal.

Dengan gambaran diatas, politik di Indonesia menjelang paska pemilu memang rawan, Anarkhi yang berkepanjangan secara obyektif, lebih mungkin terjadi ketimbang transisi ke demokrasi secara damai, Berbagai kerusuhan, baik murni ataupun diciptakan, menjadi ancaman yang dapat meluluhlantakkan pencapaian pembangunan selama ini.

Namun tentu saja tidak ada harga mati dalam politik, Seperti yang dikatakan diktum, kecuali merupakan lelaki menjadi wanita dan merubah wanita menjadi lelaki, politik dapat merubah segalanya, Sikap optimis dan harapan selalu ada, Manuver politik para elit yang berpengaruh secara bersama dapat merubah keadaan menjadi jauh lebih damai.

Untuk mengurangi kemungkinan anarkhi yang berkepanjangan itu, dialog nasional antar elit yang berpengaruh memang dibutuhkan, Konsensus politik tidak dapat hanya diserahkan ke DPR ataupun MPR periode sebelum pemilu 1999 yang sudah kehilangan legitimasi, Konsensus itu, di era transisi, harus pula dibuat oleh pemimpin

masyarakat dan pemerintahan secara bersama-sama. Sehingga konsensus itu akan lebih didengar dan diterima oleh masyarakat luas.

Namun agar terfokus, dialog nasional itu haruslah membahas satu agenda saja, yaitu soal pemilu. Tentu saja krisis yang kini ada tidak dapat direduksi hanya menjadi masalah pemilu. Namun pemilu dapat menjadi langkah awal yang sangat penting sebagai solusi untuk mengatasi krisis secara komprehensif. Melalui pemilu yang sukses akan terbentuk pemerintahan yang lebih punya legitimasi. Konflik antar elit pun akan semakin dewasa dan membumi karena mereka melihat siapa yang sebenarnya yang didukung rakyat.

Para pemimpin masyarakat dan pemerintahan perlu duduk bersama dan merumuskan strategi agar pemilu berjalan secara jujur dan aman. Para pemimpin ini harus menemukan cara bersama menanggulangi kerusuhan dan manipulasi yang dapat mengganggu proses pemilu. Jika memang diperlukan, berbagai jaringan LSM dan kelompok mahasiswa, bahkan badan internasional dapat dilibatkan untuk mengamankan dan membersihkan pemilu dari kecurangan.

Kondisi politik di Indonesia setelah lebaran 1999 memang sangat ditentukan oleh sukses atau tidaknya pemilu tahun 1999 itu, dan sukses tidaknya pemilu sangat ditentukan dari kesediaan para elit berkompromi untuk mengamankan pemilu.

GERAKAN MAHASISWA MENJADI EKSTREM

GERAKAN mahasiswa menjelang pemilu 1999 sedang dalam krisis, Dimasa sebelum dan di saat lengsernya Soeharto, masih mudah mengidentifikasi gerakan mahasiswa, berdasarkan isu dan strategi kelompok gerakan mahasiswa, tanpa susah payah gerakan ini dapat dikelompokkan sebagai gerakan demokrasi dan reformasi. Namun setelah setahun usia gerakan mahasiswa, identifikasi politik atas gerakan itu tidak lagi mudah, Yang terasa, spirit gerakan ini untuk memutuskan Indonesia dari masa silam Order Baru sangatlah keras, Tidak jarang, isu yang mereka lontarkan justru bertentangan dengan prinsip demokrasi, Ini menyulitkan kita untuk tetap menganggap gerakan mahasiswa sebagai kekuatan yang masih konsisten atas arus reformasi dan demokratisasi.

Dua contoh dapat dikemukakan disini, Pertama, isu gerakan mahasiswa yang ingin Golkar dibubarkan atau didiskualifikasi sebagai peserta pemilu, Dapat dipahami kemarahan mahasiswa atas Golkar sebagai sendi utama Orde Baru, Namun menghendaki

Golkar dibubarkan adalah bertentangan dengan prinsip demokrasi. Pernyataan Voltaire, seorang ilmuwan Perancis, dapat menjelaskannya, Voltaire pernah berkata, "Saya tidak menyetujui pendapat tuan, tetapi hak tuan untuk menyatakan pendapat itu, akan saya bela, "Prinsip Voltaire adalah sokoguru utama demokrasi, Mahasiswa boleh saja tidak menyetujui platform atau masa silam Golkar, Tapi hak Golkar untuk menyatakan pendapatnya, dan untuk ikut pemilu harus dihormati.

Jangankan Golkar, setanpun jika punya partai harus diizinkan mengikuti pemilu, Lalu berpulang kepada masyarakat banyak untuk memilih partai itu atau tidak, Jika memang tidak setuju dengan Golkar, maka gerakan mahasiswa harus mengalahkan Golkar secara demokratis melalui pemilu, bukan membrendelnya dengan meminjam tangan kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan massa di jalan.

Contoh kedua adalah isu penolakan pemilu, Sarasehan nasional mahasiswa di Bali bulan Februari 1999 menelurkan keputusan yang menolak pemilu, Sebagai gantinya gerakan mahasiswa menginginkan dibentuknya pemerintahan transisi atau Komite Rakyat Indonesia.

Dapat dimengerti bahwa pemilu bulan juni 1999 ini belum sempurna, Namun dari kacamata prinsip demokrasi, pemilu yang tidak sempurna itu jauh lebih baik dari pembentukan Komite Rakyat Indonesia ataupun pemerintahan baru lainnya yang tidak melalui pemilu, Siapa yang berhak memilih Komite Rakyat Indonesia itu? Apa dasarnya mengatakan mereka adalah representasi dari masyarakat Indonesia yang sangat beragam? Sedangkan dalam pemilu 1999, sungguhpun belum sempurna, rakyat dari 27 propinsi yang memilih, bukan elit semata.

Mengapa terjadi kemunduran ideologi dalam gerakan mahasiswa saat ini? Apakah gerakan mahasiswa menyadarinya? Pertama, ini revolusi wajar dari sebuah gerakan, Setelah setahun gerakan apapun yang besar akan mengalami fragmentasi, mulai dari yang moderat sampai ekstrem, Yang nyaring keluar biasanya yang ekstrem,

Kemunduran gerakan mahasiswa ini karena terjadinya radikalisasi atau ekstremisasi gerakan, Sehingga berbagai rambu prinsip demokrasi yang moderat, dilampaui dan dilanggar.

Kedua, gerakan mahasiswa berubah kelamin, Gerakan ini yang awalnya bersandar pada kekuatan moral pelan-pelan berubah menjadi gerakan politik, Sebagai gerakan moral, umumnya gerakan mahasiswa bersifat non-partisan dan berdiri di atas pengelompokkan politik yang ada, Namun sebagai gerakan politik, gerakan mahasiswa mulai bersifat partisan dan memihak golongan politik tertentu, Untuk kasus ini, mahasiswa memilih kelompok politik radikal yang menolak pemilu dan Golkar.

Ketiga, gerakan mahasiswa tidak benar-benar menghayati ideologi yang mereka perjuangkan, Dalam slogan, mereka mengklaim sebagai kekuatan reformasi dan demokrasi, Namun detail dari reformasi dan demokrasi itu tidak mereka hayati dan tidak menjadi acuan dalam menelurkan berbagai isu politik

Satu atau kombinasi dari tiga alasan ini yang membuat gerakan mahasiswa mundur secara ideologis, Jika tidak berubah, gerakan ini akan kehilangan simpati dan dukungan rakyat banyak.

Tentu saja proposisi di atas tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh komponen gerakan mahasiswa, Banyak pula gerakan mahasiswa yang bekerja secara diam, mendukung pemilu dan tidak mengingkari hak partai lain, seperti Golkar, untuk menjadi peserta pemilu, Namun gerakan yang anti pemilu dan Golkar ini cenderung menjadi mainstream.

Sangat disayangkan jika gerakan mahasiswa mengalami kisis, Reformasi dan demokratisasi ini adalah proyek yang memakan waktu lama dan belum selesai, Pengawal reformasi sangat diperlukan, terutama untuk memberikan tekanan ekstra parlementer, Tanpa pengawal, dengan mudah gerakan reformasi diselewengkan atau tidak dituntaskan.

Sangatlah Ironi jika gerakan mahasiswa yang selama ini menjadi pengawal reformasi justru terjatuh menjadi penjegalnya. Ini menjadi ironi karena kelompok status quo juga menjegal reformasi untuk alasan lain. Sedangkan gerakan mahasiswa dapat menjegal arus reformasi hanya karena menjadi ekstrem dan ketidaktahuan. Saatnya gerakan mahasiswa kembali ke khitah, back to basic, dan menjadi moderat.

BAGIAN KETIGA

Hasil PEMILU 1999 dan Problemanya

STATUS QUO ATAU POLITIK SEKULER

MENJELANG dan ketika berlangsungnya kampanye pemilu 1999, terjadi pergeseran aliansi dalam dinamika politik di tanah air, Dari aliansi politik antara kubu reformasi versus kubu politik status quo berubah menjadi kubu kelompok islam versus nasionalis sekuler, Dari kacamata prinsip demokrasi, pergeseran aliansi ini adalah langkah mundur, Transisi ke demokrasi yang sangat sulit di Indonesia, akibat krisis ekonomi dan warisan politik Orde Baru, kini menjadi bertambah sulit dan labil karena pergeseran aliansi politik itu.

Aliansi kubu reformasi versus kubu status quo telah dibentuk dengan harga yang sangat mahal, Beberapa bulan menjelang kejatuhan presiden Soeharto, kubu reformis adalah minoritas, Dibantu oleh gerakan mahasiswa, krisis ekonomi dan pergeseran elit, kubu reformasi menguat, Puncaknya adalah jatuhnya Soeharto dan ratusan manusia yang tewas, Namun pertarungan kubu reformasi versus kubu status quo belum selesai, Sistem demokratis yang diperjuangkan kubu reformasi belum sepenuhnya terealisasi.

Ditengah jalan, menjelang akhir kampanye pemilu 1999 di sekitar akhir Mei dan Awal Juni, aliansi politik yang baru tumbuh, Garis pemisah bukan lagi isu reformasi versus isu status quo, tetapi kelompok islam versus kelompok nasionalis sekuler, Sekat pemisah antara islam dan non-islam dijadikan isu politik utama, Para ulama berpengaruh terlibat dalam seruan itu, Ancaman atas marginalisasi politik islam dijadikan common platform aliansi.

Terhadap perubahan basis aliansi tersebut, ada dua argumen yang bisa diajukan, Pertama, perubahan aliansi itu akan sangat merugikan bukan saja terhadap proses transisi ke demokrasi, tetapi juga terhadap kelompok islam sendiri, kedua, wacana yang menyertai aliansi tersebut mengungkapkan adanya salah pengertian dan tentang apa yang yang dimaksud dengan politik sekuler atau sekulerisme dalam politik.

Ada tiga alasan mengapa aliansi baru yang menjadikan agama formal sebagai sekat pemisah tidak relevan dan akan merugikan kita semua sebagai bangsa, Pertama, reformasi yang sedang berjalan adalah proyek bersama, Proyek ini melampaui batas-batas agama, Dengan mengedepankan isu islam versus non-islam, itu bertentangan dengan esensi reformasi, serta akan melemahkan pengerjaan proyek reformasi karena ia merubah skala prioritas.

Berbagai program utama reformasi tidak ada yang bertentangan atau memihak agama manapun, Pemerintah yang bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme adalah anjuran semua agama, tidak memihak agama manapun, Prinsip accountability, dimana pemerintah yang terpilih harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya juga anjuran semua agama, Prinsip ekonomi yang efisien dan adil tidak pula memihak ke agama manapun, Prinsip umum demokrasi adalah juga netral secara agama, tidak hanya bersandar pada ajaran agama tertentu saja.

Kita menyadari program reformasi di atas sangat sulit untuk ditegakkan, Warisan Orde Baru selama 32 tahun sudah sedemikian

tertanam, Dengan membuat seluruh komponen reformasi bahu-membahu saja, proyek ini masih akan memakan waktu lama, Apalagi jika kekuatan reformasi itu dipecah ke dalam isu islam versus non-islam.

Kedua, penyebab negara kita dalam krisis yang besar seperti sekarang adalah hal-hal yang juga melampaui batas-batas agama, Rejim otoriter yang menafikan prinsip demokrasi dan hak asasi seperti di era Orde Baru adalah musuh semua agama, Tidak satu agama pun yang menganjurkan tipe rejim itu, Monopoli dan korupsi yang menghancurkan ekonomi kita juga musuh semua agama, Baik agama islam ataupun yang non-islam tidak menganjurkannya.

Sementara kita tahu, mereka para pemimpin, apapun agama formalnya, dapat membuat kesalahan dan kebajikan, Mereka yang kita label satus quo dan para pemimpin yang selama ini membawa negara kita kedalam korupsi yang parah, juga menjadi penganut agama yang beragam, Baik para pemimpin yang beragama islam ataupun yang non-islam, di era Orde Baru terbukti dapat membuat kesalahan yang fatal.

Sementara pendukung reformasi juga datang dari agama yang beragam, Para pemimpin reformasi, baik yang beragama islam ataupun non islam, sudah terbukti dapat bekerja sama dan berhasil menjatuhkan rejim yang buruk.

Contoh ini dapat diperbanyak lagi dengan mengambil kasus dunia, Sebut saja negara didunia yang dianggap pemerintahannya paling bersih, demokratis dan menghormati hak asasi, baik di barat, Amerika Latin ataupun Asia, Para pemimpin itu datang dari agama yang beragam, Ini suatu bukti tambahan bahwa isu publik, termasuk program reformasi, adalah proyek bersama yang melampaui batas agama, dan dapat dikerjakan secara bersama oleh penganut agama yang berbeda. Ketiga, setiap aksi akan melahirkan reaksi, Setiap movement akan melahirkan counter movement, Tak semua pihak akan senang dengan proyek reformasi, Berbagai pihak yang

dirugikan oleh proyek tersebut, dengan sekuat tenaga akan mencoba menggagalkan atau minimal, memperlambatnya, Untuk mencegah kekuatan reformasi, pihak itu dapat saja mempermainkan isu agama.

Jika kelompok reformasi ini ikut memainkan isu islam versus non islam, berarti mereka masuk dalam perangkap kelompok status quo, Isu islam versus non islam sangat efektif untuk menggeser skala prioritas, Yang diutamakan oleh pengelompokan itu adalah ikatan agama formal, bukan lagi kebijakan publik.

Padahal, dari sisi kebijakan publik, apapun agama formal seseorang atau sebuah kelompok, ia mampu melahirkan kebijakan publik yang bersemangat reformasi ataupun bersemangat status quo, Mereka yang berlainan agama akan dapat beraliansi sejauh mendukung kebijakan publik yang sama, Sebaliknya, mereka yang memeluk agama formal yang sama dapat saja berseberangan jika mereka mendukung kebijakan publik yang bertentangan.

Jika agama formal yang dijadikan basis, logika kebijakan publik di atas tidak akan jalan, Semua ahli strategi politik, termasuk dari kelompok status quo, mengetahui hal ini, Tidak heran jika banyak dari kelompok status quo itu akan menggunakan isu agama(islam versus non-islam) untuk melemahkan gerakan reformasi.

Padahal kita tahu, jika gerakan reformasi ini gagal, yang rugi adalah keseluruhan bangsa, Karena umat islam adalah mayoritas penduduk di negeri ini, umat islam pula yang kelak paling rugi akibat kegagalan reformasi.

Hal lain yang diungkit oleh aliansi baru itu adalah ancaman sekulerisme, Politik sekuler itu kemudian dijadikan komoditas politik dan dijadikan musuh bersama untuk membuat aliansi(islam versus nasionalis sekuler).

Ini pasti disebabkan oleh kesalahpahaman akan arti politik sekuler atau sekulerisme dalam politik, Politik sekuler diartikan sebagai sistem

politik yang anti agama, atau lebih jauh lagi anti islam, Dengan definisi ini, tidak heran jika politik sekuler ini menjadi momok yang menakutkan.

Namun itu adalah definisi politik sekuler yang salah, Tak ada satupun negara demokrasi yang sekuler di dunia ini yang anti agama, ataupun anti islam, Praktek agama adalah satu hak asasi yang tidak boleh dilarang oleh negara demokrasi, Disemua negara demokrasi sekuler didunia, baik di Amerika Serikat, di Eropa ataupun di Asia, seperti di Jepang, tidak ada yang melarang penganut agama menjalankan agamanya, Bahkan di pusat negara demokrasi sekuler, seperti di Amerika Serikat, pertumbuhan agama islam, dibandingkan agama lain, termasuk yang paling tinggi di negara itu.

Yang benar, negara demokrasi sekuler bukan anti agama, tetapi memberikan perlakuan yang sama kepada pluralitas agama, Prinsip ini dibangun berdasarkan kesadaran bahwa negara adalah proyek bersama, Semua warga apapun jenis kelaminnya, warna kulitnya, rasnya, bahkan agamanya, berhak atas hak sosial dan politik yang sama, Seseorang tidak boleh didiskriminasi hanya karena jenis kelaminnya, warna kulitnya, rasnya, bahkan agamanya.

Tak ada yang perlu ditakutkan dengan politik sekuler itu, Hak mempraktekkan agama yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sepenuhnya dijamin oleh negara demokrasi yang sekuler, Tak kurang dan tak lebih.

Gerakan reformasi ini harus terus dikawal agar tidak mati di tengah jalan, Satu cara mengawalnya adalah konsolidasi kesadaran dan sosialisasi pengetahuan ke kalangan yang semakin luas, Bahwa reformasi ini adalah proyek bersama yang melampaui sekat agama, Musuh bersama kita bukan politik sekuler, tetapi politik status quo orde baru, Menggeser musuh bersama itu hanya akan menjadi game yang bukan saja dapat menghancurkan gerakan reformasi, namun berbahaya bagi kelangsungan bangsa kita yang plural.

PEMILIH RASIONAL

APA yang kurang dalam pemilu 7 Juni 1999? Dari segi tingkat partisipasi politik masyarakat dan rendahnya kerusuhan, pemilu tempo hari terbilang relatif sukses. Namun partai politik dalam pemilu itu kurang memberi tempat bagi para pemilih rasional.

Kampanye yang berlangsung tiga putaran ini lebih mirip dengan karnaval, ketimbang kampanye sebenarnya seperti yang terjadi di negara maju. Penajaman visi dan misi partai, apalagi sosialisasi isu strategis yang ingin diperjuangkan partai ke khalayak, tidak menonjol. Pemilih yang rasional akan tetap sulit membedakan platform, bahkan kalau diminta membedakan platform hanya lima partai terbesar.

Pemilih rasional akan selalu menghitung dan menganalisa pilihannya. Mereka akan bertanya, misalnya dalam isu penting apa lima partai besar ini benar-benar berbeda. Yang mana dari partai itu yang akan lebih menguntungkan mereka? Apakah para elite partai itu serius dan konsisten dalam memperjuangkan visi dan misi partai? Apakah visi dan misi partai itu memang jelas, operasional dan feasible?

Ambil contoh kelompok pengusaha, Sulit bagi mereka untuk menentukan, yang mana dari 5 partai terbesar itu yang akan lebih menguntungkan dunia usaha, Partai di di Amerika Serikat(AS), sebagai perbandingan, sangat mudah diidentifikasi, Para pengusaha tahu bahwa Partai Republik akan lebih menguntungkan mereka, Berbeda dengan saingannya, Partai Republik secara jelas dan tegas akan memperjuangkan pajak yang lebih rendah dan keterlibatan pemerintah dalam ekonomi yang lebih sedikit, Karena program ini sangat menguntungkan pengusaha, tidak ragu-ragu mayoritas pengusaha memilih Partai Republik.

Hal yang sama terjadi dengan kelompok wanita modern yang sangat sadar hak politik dan dunia publik, Kelompok ini mungkin tetap bingung yang mana dari 5 partai besar di Indonesia yang benar-benar memperjuangkan visi mereka, Di Amerika Serikat, kelompok ini akan sangat mudah memilih partai, Seketika mereka tahu bahwa Partai Demokrat adalah partai mereka, Partai Demokrat sangat memperjuangkan emansipasi wanita, bahkan untuk hal yang sangat ekstrem seperti hak aborsi, tunjangan buat orangtua tunggal (single parent) dan lesbian.

Mengapa dalam kampanye tiga putaran itu, masih sulit bagi pemilih rasional untuk mengenali partai besar mana di Indonesia yang sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan mereka? Mengapa kampanye di tanah air masih bertahan pada pola lama, pola karnaval dan show of force? Mengapa visi dan misi partai belum benar-benar digarap secara lebih detail, teknis dan konsisten? Ada dua penyebab.

Pertama, partai peserta pemilu 1999, bahkan partai yang paling besar sekalipun, belum terlembaga, Visi dan misi partai belum benar-benar di garap dan disosialisasikan ke seluruh elit partai, Akibatnya, visi dan misi partai itu bukan saja belum jelas, detail dan teknis, Namun selalu terbuka kemungkinan, tokoh yang berbeda dalam partai yang sama memberikan visi dan misi partai yang berbeda.

Ambillah contoh partai yang paling maju, PAN, Melalui komentar Faisal Basri, sekjen PAN, program ekonomi PAN terasa liberal dan pro

pada mekanisme pasar, Namun melalui komentar Dawan Rahardjo, salah satu ketua PAN, program ekonomi PAN terasa berbeda, Ditangan Dawam, program ekonomi PAN terasa lebih memihak pengusaha menengah dan kecil, dengan keterlibatan pemerintah yang lebih besar dalam distribusi ekonomi.

Karena belum terlembaganya platform partai, akibatnya kekuatan partai digantungkan kepada pesona pribadi, PDI-Perjuangan bergantung kepada pesona Megawati, PAN kepada Amien Rais dan PKB kepada Gus Dur, Jika ketiga tokoh itu mundur dari partai yang bersangkutan, bisa dipastikan kekuatan masing-masing partai itu akan berkurang lebih dari 50%.

Kedua, partai yang besar sekalipun belum benar-benar memilih segmen utama targetnya, Akibat isu strategis partai itu tidak benar-benar difokuskan ke segmen itu, Visi dan misi partai bukan saja menjadi abstrak, namun kadang tidak konsisten.

Secara umum, PDI-Perjuangan memang dicitrakan akan banyak menggaet the lower class, kelas menengah ke bawah, PAN diisukan banyak menggaet kelompok-kelompok modern kota dan middle class, Sedangkan PKB dianggap akan menggaet masyarakat pedesaan.

Namun kaitan antara segmen itu dan program partai tidak terasa, PAN, sebagai misal, dalam platform ekonomi resminya mengklaim akan memperjuangkan kelompok menengah kebawah, Lebih jauh lagi PAN akan memperjuangkan politik afirmasi yang memihak kepada pihak lemah, Platform ini terasa tidak sesuai dengan citranya sebagai partai kelas menengah, Jika segmen utamanya kelas menengah, platform partai seharusnya lebih liberal, berpihak kepada mekanisme pasar, dan sangat kritis terhadap kebijakan afirmasi.

Hal yang sama terjadi dengan PDI-Perjuangan, Dalam slogan, partai ini dicitrakan memihak wong cilik dan kelas bawah, Jika ini yang menjadi segmennya, untuk kepentingan segmen itu, platform ekonomi partai seharusnya lebih berciri populis dan nasionalistik.

Namun, ekonom utama PDI-Perjuangan adalah Kwiek Kian Gie, berbagai kolom Kwiek Kian Gie lebih mengesankan seorang ekonom liberal yang pro pada mekanisme pasar, Segmen yang diperjuangkan Kwiek dalam kolomnya bukan the lower class, Yang dibutuhkan PDI-Perjuangan, jika memang wong cilik yang menjadi targetnya, bukan ekonom liberal tapi ekonom yang populis, jika ingin konsisten dengan segmen the lower class.

Karena platform, misi dan visi partai, serta segmen utama partai belum digarap secara serius, dan disuarakan secara konsisten oleh semua elit partai, ikatan pemilih dan partai bukanlah ikatan rasional, Pemilih mendukung partai tertentu bukan karena program, visi dan misi partai itu, tetapi karena hal lainnya, Misalnya, mereka memilih karena sentimen agama, sentimen politik aliran, atau karisma tokoh.

Partai dalam pemilu 199 agaknya memang belum banyak memperhatikan pemilih rasional.

KEMENANGAN PARTAI TERBUKA

DARI hasil perhitungan pemilu, ada pola yang menarik, Pemilu kali ini dimenangkan oleh berbagai partai terbuka, Empat dari lima partai teratas adalah partai yang menjadikan Pancasila sebagai azasnya(PDI-Perjuangan, PKB, PAN dan Golkar), Diantara lima partai teratas, hanya PPP yang menjadikan islam sebagai azasnya, Sementara partai lain yang berazaskan islam berada dalam peringkat yang lebih rendah.

Ini menjadi fenomena yang menarik, Mengapa yang menduduki peringkat teratas adalah partai terbuka, bukan partai yang berazaskan islam? Bukankah mayoritas pemilih(sekitar 90%) adalah beragama islam? Mengapa mayoritas muslim ini tidak memilih partai yang berazaskan islam? Padahal ada belasan partai yang berazaskan islam? Mengapa partai yang berazaskan islam itu malah menduduki peringkat yang lebih rendah.

Padahal seminggu sebelum hari pencoblosan, gerakan anti partai yang banyak calon legislatif non muslimnya sudah gencar dilakukan, Tidak kurang dari ulama kondang menjadi juru bicara dan bintang

iklan untuk seruan itu, Berbagai partai yang berazaskan islam sudah pula merapatkan barisan, untuk menggabungkan sisa suara, dan melabel kelompok lain sebagai nasionalis sekuler.

Masyarakat luas sudah memilih, Suka atau tidak, hasil pemilu itu adalah gambaran keinginan politik masyarakat Indonesia, Ada empat penyebab, mengapa yang menang pemilu kali ini adalah berbagai partai terbuka, Sementara partai yang berazaskan islam tidak dipilih oleh mayoritas penganut islam itu sendiri.

Pertama, masih berlanjutnya apa yang disebut Geertz dengan dikotomi islam santri dan islam abangan, Dalam pemilu 1955, jumlah islam abangan itu sebesar lebih dari 40%, Jumlah ini diambil dari pemilih islam yang tidak menyalurkan suaranya ke partai islam, Islam abangan adalah islam statistik, Mereka memang beragama formal islam, Namun mereka tidak mempunyai aspirasi politik islam.

Secara kulutural, islam abangan ini bukanlah mereka yang taat dalam ritual agama, Bahkan tidak jarang, pemahaman agama mereka bersinkretisasi(bercampur) dengan agama dan kepercayaan lain, Aspirasi politik islam, termasuk motif membangun komunitas politik islam, tidak kuat dalam kelompok abangan, Kelompok islam abangan ini lebih tergetar oleh partai yang berazaskan nasionalisme dan kerakyatan.

Dalam pemilu kali ini, mereka yang termasuk dalam islam abangan lebih tertarik memberikan suaranya ke partai terbuka seperti PDI-Perjuangan, PKB, Golkar dan PAN dan partai lainnya ketimbang partai yang berazaskan islam.

Kedua, islam santri juga mengalami perubahan, Berbeda dengan islam abangan, islam santri dilabelkan kepada penganut islam yang taat secara ritual dan digerakkan oleh sentimen keislaman, Namun sejak orde baru, telah terjadi mobilisasi kesejahteraan ekonomi serta pendidikan, Sebagian dari mereka terekspos ke dunia global, simbol modernisasi dan ideologi dunia seperti demokrasi, Mereka sendiri mungkin menjadi motor reformasi dan pluralisme.

Akibatnya, sebagian dari islam santri ini tidak pula tergerak memberikan suara mereka ke partai yang berazaskan islam, Apalagi jika mereka merupakan bagian dari kelas menengah kota, Mereka akan cenderung memberikan suaranya kepada partai terbuka, seperti PAN, Golkar atau PKB.

Ketiga, pengaruh para tokoh islam, Tiga tokoh islam yang paling berpengaruh saat ini adalah Gus Dur, Amien Rais dan Nurcholish Madjid, Gus Dur adalah pemimpin organisasi islam terbesar NU, Amien Rais pernah memimpin organisasi islam besar lainnya, Muhammadiyah, Sedang Nurcholish Madjid kini menjadi suhu dalam komunitas islam yang pandangannya banyak didengar.

Massa islam yang dipengaruhi ketiga tokoh ini tidak memberikan suaranya ke partai yang berazaskan islam, Jika Takzim ke Gus Dur, suara akan mereka berikan kepada PKB, partai terbuka, Jika kagum pada Amien Rais, partai terbuka lainnya, PAN, akan mereka pilih, Jika mereka terpesona oleh Nurcholish, bukan partai islam pula yang mereka dukung, Nurcholish sejak dulu mempunyai “fatwa “bahwa “Islam yes, partai Islam no. “

Keempat, variabel terakhir adalah dasarnya angin reformasi, Umumnya kelas menengah kota dan kelas bawah mendukung partai terbuka, dengan alasan yang berbeda, Kelas menengah kota sejak lama diromantisasi oleh isu demokrasi, hak asasi dan reformasi, Mereka menyadari bahwa isu itu melampaui batas dan sekat agama, Partai terbuka, bagi mereka, lebih sesuai dengan reformasi yang berlandaskan pluralisme, ketimbang partai islam.

Sedangkan bagi kelas bawah, keterhimpitan ekonomi dan ketidakpuasan atas kesejahteraan, membuat mereka menjadi golongan pemarah yang anti sistem, Kemarahan mereka lebih dapat ditampung oleh berbagai tokoh yang sudah terlanjur dilabeli reformis, seperti Megawati, Gus Dur dan Amien Rais, Secara kebetulan, 3 tokoh ini menjadi pemimpin partai terbuka, Akibatnya, partai terbukalah, bukan partai islam, yang mendapat suara mereka.

Empat variabel di atas mampu menjelaskan mengapa partai yang berazaskan islam justru tidak populer di mata pemilih yang 90% beragama islam, Justru partai terbuka yang menikmati panen besar dalam pemilu kali ini, padahal partai itu (terutama PDI-Perjuangan) mendapat serangan para ulama secara tajam. Sebaiknya memang partai yang terbuka yang mendominasi pemerintahan baru kelak, Alasannya sederhana saja, Partai terbuka itu adalah Indonesia dalam bentuknya yang mini, Sebagaimana Indonesia, dalam partai terbuka, seseorang tidak akan dibedakan hanya karena perbedaan warna kulitnya, jenis kelaminnya, rasnya atau agama yang dipeluknya.

BERTAHANNYA GOLKAR

SATU fenomena yang penting dalam pemilu 1999 adalah bertahannya partai Golkar sebagai partai besar, Meski tidak lagi menempati posisi pertama, namun Golkar berhasil merebut posisi kedua, di tengah iklim politik yang masih kuat dengan anti Soeharto dan anti Orde Barunya.

Bagaimana menjelaskan bertahannya partai Golkar di era reformasi dan pemilu demokratis? Mengapa Golkar masih bertahan sebagai partai besar, bahkan melampaui PAN, partai yang selama ini dilabel sebagai partai reformis?

Setidaknya ada empat faktor yang membuat Golkar seharusnya terpuruk untuk menjadi partai gurem saja, Pertama, opini publik dan kemarahan massa atas Golkar sudah sedemikian hebatnya, Golkar dianggap bertanggung jawab atas krisis di era Orde Baru, Partai ini bukan saja dilabel status quo, label yang membangkitkan sentimen kebencian publik, Lebih dari itu, banyak pula segmen masyarakat yang bahkan meminta Golkar di bubarkan, atau tidak diikuti

dalam pemilu. Kedua, pendukung utama Golkar, yaitu militer, sudah pula menarik dukungannya atas Golkar dan berupaya untuk netral, Selama ini aparat militer banyak bekerja membesarkan Golkar, Melalui berbagai jaringan yang tidak sepenuhnya transparan, militer menjadi segmen utama keberhasilan Golkar dalam pemilu di era Orde Baru, Namun kini pendukung utama Golkar itu turut terpuruk dan turut direformasi, Tanpa dukungan militer lagi, seharusnya Golkar Gembos.

Ketiga, birokrasi melalui pegawai negeri sipil(KORPRI) sudah menjauh pula dari Golkar, Selama pemilu Orde Baru, birokrasi mempunyai jaringan jauh sampai ke daerah terpencil untuk memenangkan Golkar, Jaringan birokrasi ini beserta keluarga dan segmen yang mampu mereka pengaruhi adalah jumlah suara yang besar, Kini birokrasi sudah dilarang untuk berpihak kepada partai politik, termasuk ke Golkar, Seharusnya Golkar semakin terpuruk lagi.

Keempat, dalam tubuh Golkar terjadi pula perpecahan internal, Setelah ditinggal oleh jalur A(ABRI) dan jalur B(BIROKRASI), jalur C(Golkar yang Non ABRI dan Non Birokrasi), tidak pula solid, Banyak aktivis penting Golkar yang keluar menonaktifkan diri, Lebih jauh lagi, banyak pula tokoh penting Golkar yang mendirikan partai tandingan, seperti Partai Keadilan dan Persatuan(PKP) serta partai MKGR, Golkar seharusnya makin terkucil.

Namun dalam pemilu demokratis ini, partai Golkar ternyata tetap perkasa, Hanya PDI-Perjuangan yang lebih perkasa dari Golkar, Sementara PKB-nya Gus Dur hanya kuat di Jawa, Apa yang menjadi penyebab daya tahan Golkar?

Ada empat segmen masyarakat yang memilih Golkar dengan alasan yang berbeda-beda, Empat segmen ini sangat menolong perolehan suara Golkar dalam pemilu 1999, Segmen pertama adalah lapisan masyarakat yang kedap isu reformasi, Setiap partai politik, apalagi yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun seperti Golkar, memiliki pemilih yang loyal, Kaitan pemilih jenis ini dengan partainya sudah

bersifat emosional, Berbagai isu yang rasional dan temporer tidak mampu menggoyahkannya.

Di Amerika Serikat sendiri, sebagai misal, baik partai Republik ataupun partai Demokrat juga memiliki pemilih yang loyal turun temurun, Kesetiaan mereka kepada partai sudah dijalankan dan diturunkan dari kakek, ke ayah, ke dirinya sendiri, lalu ke anak dan cucu, Berbagai isu yang temporer dan datang perginya para pemimpin partai, tidak merubah loyaliasitas itu.

Jumlah pemilih yang loyal ini di Golkar agaknya cukup signifikan, Pemilu terakhir di era Order Baru, tahun 1997, Golkar dapatkan lebih dari 70% suara, Jika seperempat saja dari mereka itu loyal, berarti sekitar 15% - 20% pemilih yang sejak awal sudah terikat ke Golkar, Isu reformasi dan berbagai hujatan publik tidak mempengaruhi mereka.

Segmen kedua adalah mereka yang digerakkan oleh sentimen the politics of survival, Begitu banyak pengusaha dan birokrat yang selama ini diuntungkan oleh kemenangan Golkar, Di Era reformasi, mereka memang punya pilihan bebas untuk memilih, Namun segmen masyarakat ini, berikut keluarganya, tetap memilih Golkar dengan alasan lain.

Jika yang menang bukan Golkar, mereka merasa kepentingan mereka dapat terjungkir secara drastis, Pejabat pegawai negeri misalnya, dapat berfikir, jika penguasa baru yang datang, ia akan disingkirkan dan diganti oleh orang partai pemenang, Kekhawatiran ini membuat mereka tetap memilih Golkar karena kepentingan mereka terkait disana.

Segmen ketiga adalah sebagian dari islam modernis, Golkar di tahun 90-an adalah Golkar yang mulai banyak tokoh islamnya, Terutama setelah lahirnya ICMI, kuningnya Golkar menjadi sedikit kehijau-hijauan, Apalagi, kini Golkar dikomando oleh Akbar Tanjung, anggota KAHMI (Alumni HMI) yang berpengaruh, Sebagian segmen islam modernis memilih Golkar karena alasan ini, Golkar dianggap dapat mewakili kepentingan islam.

Segmen keempat adalah sebagian kelas menengah kota, termasuk kalangan profesional, Ini adalah pemilih Golkar yang paling rasional, walau jumlah mereka tidak banyak, Secara rasional, mereka teryakinkan bahwa di Golkar lebih banyak elit yang kompeten dan berpengalaman dalam pemerintahan, Mereka pun meyakini, bahwa Golkar baru memang berbeda, Dibanding partai lain yang baru, bagi mereka Golkar lebih kurang beresiko dan lebih mampu untuk mengurus negara kelak.

Empat segmen inilah yang telah menyelamatkan Golkar, Namun Golkar tentu saja tidak dapat selamanya bergantung pada segmen ini, Apalagi jika Golkar ingin kembali memenangkan pemilu lima tahun mendatang, Jumlah segmen itu akan terus mengecil, seiring dengan hilangnya Golkar dari kekuasaan pemerintah. Agar mampu bertahan di pemilu berikutnya, Golkar perlu lebih banyak memiliki barisan PR(public relation) untuk mensosialisasikan citra Golkar yang baru, Tentu saja citra itu harus pula didukung oleh platform dan tokoh partai yang juga memiliki semangat baru, Slogan “Golkar Baru “yang sudah ditonjolkan dalam pemilu kali ini sudah harus dibumikan ke dalam berbagai aksi politik yang nyata, Jika tidak, Golkar akan menjadi partai seperti PNI, partai yang pernah besar di satu periode, namun menjadi partai gurem di periode berikutnya.

MENGAPA PDI-PERJUANGAN, BUKAN PAN?

HASIL pemilu 1999 meninggalkan satu pertanyaan, Mengapa yang meraih kemenangan bukan Amien Rais dan partainya, PAN, tetapi Megawati dengan partainya PDI-Perjuangan? Mengapa kemarahan publik atas orde baru tidak tumpah menjadi dukungan kepada PAN, tetapi menjadi pilihan ke PDI-Perjuangan?

Lima partai besar mendominasi pemilu kali ini, Secara nasional, PDI-Perjuangan menduduki peringkat teratas, Sebaliknya, PAN menempati peringkat terbawah dari lima besar, jumlah kursi yang berhasil diraih PAN hanyalah sekitar seperempat dari jumlah yang berhasil dikumpulkan PDI-Perjuangan.

Ada banyak hal yang menyebabkan hasil ini menjadi pertanyaan, Bukankah lokomotif yang memimpin gerakan reformasi adalah Amien Rais bukan Megawati? Menjelang beberapa bulan sebelum kejatuhan Soeharto, Amien sudah aktif membentuk opini publik dan menggalang jaringan, Bersama gerakan mahasiswa, Amien melakukan the political entrepreneurship, yaitu mengambil resiko untuk memulai

sebuah perubahan, Jika gagal, tidak mustahil Amien akan masuk penjara, sebagaimana gerakan oposisi lainnya di era Orde Baru, Saat itu, Megawati justru berdiam diri dan tidak mengambil inisiatif terlibat dalam gerakan.

Setelah Jatuhnya Soeharto, Amien pula yang mengambil inisiatif untuk membuka wacana baru, Berbagai isu baru yang menyegarkan seperti negara federasi, ataupun isu lama yang sensitif, seperti penghentian Dwi Fungsi ABRI, ia lontarkan, Bahkan Amien pun mengaktifkan diri dalam kultur politik baru, seperti debat calon presiden, Pada saat yang sama, Megawati justru banyak berdiam diri, Visi dan misi politiknya sangat jarang ia ungkapkan secara terbuka, Bahkan Megawati mengaggap debat calon presiden yang sangat banyak diminati itu bukanlah budaya timur. Namun rakyat sudah berbicara melalui pemilhan umum, Bukan PAN yang mereka kehendaki untuk menang, tetapi PDI-Perjuangan, Bukan Amien Rais yang mereka nobatkan, tetapi Megawati, Memang Amien Rais dan PAN yang sudah memanjat pohon untuk memetik mangga, Namun ketika mangga itu jatuh, Megawati dan PDI-Perjuangan yang ternyata mendapatkan mangga itu.

Mengapa hasil pemilu seperti itu? Ada tiga variabel yang menyebabkan PDI-Perjuangan menang, Sebagian dari kemenangan itu disebabkan oleh kehebatan strategi, sebagian lagi karena keberuntungan.

Variabel pertama adalah masalah segmentasi pemilih, PDI-Perjuangan dan PAN memiliki segmen pemilihnya sendiri yang terpisah, Masyarakat pemilih di Indonesia terbagi dalam tiga segmen besar yang hampir sama jumlahnya, Ada segmen islam abangan, Ini segmen penganut islam nominal atau islam statistik yang tidak digerakkan oleh sentimen ke islaman, Segmen ini di tahun 1955 banyak memberikan suara ke PNI, Ada pula segmen islam tradisional, Yaitu penganut islam yang banyak tinggal di wilayah pedesaan, Ini basis NU, Ketiga, segmen islam modernis, islam perkotaan, yang kebanyakan menjadi anggota muhammadiyah.

Di segmen abangan, segmennya PDI-Perjuangan, PDI-Perjuangan praktis merajalela, Partai ini tidak punya saingan berarti, Berbagai partai nasionalis lainnya adalah partai gurem yang baru, Sementara partai yang menggunakan atribut PNI lama tidak memiliki tokoh massa.

Namun di Segmen islam modernis, segmennya PAN, begitu banyak partai saingan merajalela dan berebut suara, Disamping PAN, disitu ada pula PPP, Golkar, PBB dan Partai Keadilan, Katakanlah, PDI-Perjuangan meraih 90% dari segmen abangan, sementara PAN mungkin hanya meraih 25% saja dari segmen islam modernis, Kompetitor PDI-Perjuangan di segmen islam abangan jauh lebih lemah ketimbang kompetitor PAN di segmen islam modernis.

Variabel kedua adalah masalah sosialisasi partai, Baik PDI-Perjuangan dan PAN memiliki nomor urut dan logo partai yang baru, Namun sosialisasi PDI-Perjuangan jauh lebih cepat dan mengakar, terutama ke kalangan akar rumput masyarakat bawah.

Hal yang sangat menguntungkan PDI-Perjuangan adalah berdirinya ribuan posko hampir diseluruh pelosok nusantara, Posko ini hadir mulai dari daerah elit Jakarta sampai kedaerah kumuh pedesaan, Dalam posko ini berbagai atribut partai seperti kaos, bendera, nomor urut partai, logo dan gambar megawati terpampang, dibuat dan dijual.

Kegiatan di posko ini sangat efektif untuk mensosialisasikan partai berikut menumbuhkan ikatan emosional dan dukungan bagi partai, Posko ini adalah strategi kampanye yang sangat cemerlang, Yang turut menentukan kemenangan PDI-Perjuangan atas PAN dan atas partai lainnya, Sementara PAN hanya menggunakan medium konvensional untuk sosialisasi partai seperti yang juga dilakukan partai lain.

Variabel ketiga adalah masalah simpati kepada pihak tertindas, Ada yang misterius dalam sentimen publik, Semakin sebuah kelompok didzalimi dan diperlakukan tidak adil, semakin tinggi simpati dan dukungan masyarakat atas kelompok itu, Megawati dan PDI-

Perjuangan beruntung karena misteri sentimen publik ini, Dibandingkan PAN, Megawati dan PDI-Perjuangan jauh lebih didzalimi, akibatnya ia jauh lebih didukung.

Sejak era Order Baru, Megawati sudah didzalimi, Berbagai rekayasa politik dilakukan untuk mendongkelnya dari kursi ketua umum, Menjelang pemilu era reformasi, perlakuan atas Megawati dan PDI-Perjuangan juga dirasakan tidak adil, Berbagai isu agama dan gender digunakan untuk mendiskreditkannya, Sikap diam Megawati dan sikap pasifnya untuk tidak membalas dendam justru menambah kecintaan publik atasnya, Berbagai selebaran gelap menghujat partainya, malah berbalik menokohnya.

Tiga variabel di atas dapat menjelaskannya, mengapa Megawati dan PDI-Perjuangan yang memetik panen pemilu 1999, bukan Amien Rais sang lokomotif dan PAN sebagai partai reformis.

GANJALAN KOALISI PARTAI

KOMUNIKE bersama antar partai politik yang sedang tren menjelang dan setelah pemilu 1999 hanyalah gejala sementara. Bahkan jika komunike itu berubah menjadi koalisi partai, umurnya pun tidak akan lama. Hambatan ketatanegaraan dan permainan politik elit setelah pemilu dengan mudah menghancurkan baik koalisi partai, apalagi komunikasi bersama.

Ada dua komunike bersama yang saat itu menjadi harapan banyak orang. Pertama, komunike yang berbasiskan tokoh massa, antara PDI-Perjuangan(Megawati), PAN(Amien Rais) dan PKB(Gus Dur). Kedua, komunike yang berbasiskan politik aliran, dalam hal ini islam modernis. Yaitu antara Partai Amanat Nasional(PAN), Partai Persatuan Pembangunan(PPP) dan Partai Keadilan(PK).

Seandainya pun koalisi itu terjadi, baik antara PDI-Perjuangan, PKB dan PAN, ataupun antara PAN, PPP, PK dan partai Islam lainnya, ataupun antara PDI-Perjuangan, PKB, PAN, PPP dan PK, ada dua ganjalan besar yang dengan mudah menghancurkan koalisi itu.

Sandungan pertama adalah mekanisme ketatanegaraan. Sandungan kedua adalah permainan elit tingkat tinggi menjelang Sidang Umum MPR 1999.

Secara ketatanegaraan, istilah koalisi partai itu berasal dari sistem pemerintahan parlementer, bukan presidensil ataupun quasi presidensil seperti sistem kita sekarang. Dalam sistem parlementer, koalisi partai di parlemen mampu mengontrol pemerintah eksekutif(yang diketuai Perdana Menteri). Parlemen memiliki senjata “mosi tidak percaya “ yang secara seketika dapat menjatuhkan pemerintah dan mendesak dipilihnya pemerintah baru.

Koalisi partai dalam sistem ini sangat strategis dan kuat. Beberapa partai yang berkoalisi ini dapat bernegosiasi dengan baik mengenai penjataan jabatan kekuasaan ataupun mengenai program pemerintahan eksekutif. Berbagai partai berkepentingan menjaga harmoni dan kesepakatan, sebab, sekali ada partai di dalam koalisi dikecewakan, partai itu dapat menggalang “mosi tidak percaya “ yang kemudian menjatuhkan pemerintahan eksekutif dan membentuk koalisi baru serta pemerintahan baru.

Namun dalam sistem presidensil dan quasi presidensil seperti kita, koalisi partai diparlemen tidak memiliki kekuatan. Penyebabnya, dalam sistem ini parlemen tidak dilengkapi dengan kekuatan “mosi tidak percaya “ yang dapat menjatuhkan presiden. Fungsi koalisi partai dalam sistem Indonesia yang presidensil ibarat pendorong mobil belaka. Ia diperlukan untuk mendorong mobil(memilih presiden). Namun sekali mobil bergerak(presiden terpilih), koalisi itu dapat ditinggalkan.

Katakanlah koalisi tiga partai yang bersepakat mencalonkan si A menjadi presiden. Partai lain bersedia berkoalisi karena dalam kesepakatan itu, baik tertulis ataupun tidak, si A menjanjikan pos beberapa menteri bagi pimpinan partai yang berkoalisi itu, dalam pemerintahan baru kelak.

Namun setelah si A terpilih, dengan mudah si A akan meninggalkan koalisi dan membatalkan janjinya. Ia tidak dapat dikontrol lagi oleh koalisi. Atau, dapat pula si A benar-benar mengangkat pimpinan partai itu sebagai menteri, sebagaimana yang dijanjikan, namun setahun kemudian, si A mungkin saja memecat sang menteri itu, dan menggantikannya dengan pimpinan partainya sendiri.

Itu sebabnya, sistem presidensial yang murni tidak mengenal koalisi. Presiden dibuat untuk tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Legitimasi presiden tidak tergantung dari koalisi partai di parlemen. Perubahan koalisi partai di parlemen tidak akan menjatuhkan presiden dan menggantikannya dengan pimpinan dari partainya sendiri.

Itu sebabnya, sistem presidensial yang murni tidak mengenal koalisi. Presiden dibuat untuk tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Legitimasi presiden tidak tergantung dari koalisi partai di parlemen. Perubahan koalisi partai di parlemen tidak akan menjatuhkan presiden.

Kita memang tidak menerapkan sistem presidensial murni. Presiden kita dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana sistem presidensial murni. Namun sebagaimana dalam sistem presidensial murni, presiden Indonesia tidak dapat dijatuhkan parlemen. Karena tidak dapat menjatuhkan presiden, koalisi partai di parlemen tidak akan kuat. Koalisi partai itu ibarat cangkakan jambu yang coba ditanamkan di pohon duren.

Hambatan kedua dari koalisi itu adalah riel politik. Dalam politik praktis, tingkah laku politik massa dan politik elit sangat berbeda. Untuk kepentingan kampanye, agar memperoleh suara banyak, semua partai berkonsentrasi untuk membujuk massa. Mereka akan menjual semua isu yang laku di massa, seperti isu-isu reformasi, anti Soeharto, anti Habibie, anti Golkar, sentimen agama, figur Bung Karno. Berbagai komunike bersama ataupun koalisi itu juga untuk konsumsi massa.

Tetapi setelah pemilu usai, setelah massa memberikan suaranya, riel politik itu dapat berbalik 180 derajat. Setelah terpilih, anggota MPR itu tidak lagi terikat dengan massa yang memilihnya. Para elite ini memiliki kepentingan politiknya sendiri, kaum elit akan lebih digerakan oleh prinsip “siapa mendapat apa. “ Politik uang dan janji kursi kekuasaan akan menjadi mesin utama. Koalisi ataupun komunike bersama antar partai yang dibuat sebelum ataupun sesudah pemilu dapat hancur di detik-detik terakhir pemilihan presiden.

Lalu apa solusi dari kekisruhan diatas? Haruskah sistem presidensial dirubah kembali menjadi sistem parlementer? Jawabannya, jelas tidak. Sistem parlemnter sangat rentan untuk jatuh dan banggunya sebuah pemerintahan, menciptakan ketidakstabilan politik. Kita hanya akan mengulangi kegagalan sistem demokrasi parlementer ditahun 1950-an.

Ada dua solusi yang bisa ditawarkan, yang bersifat jangka panjang dan pendek. Solusi jangka panjang adalah amandemen UUD 45 untuk memilih presiden secara langsung dalam pemilu lima tahun mendatang. Namun untuk jangka pendek pemilu kali ini, kekuasaan presiden dalam memilih para menteri perlu dibatasi. Misalnya, pengangkatan dan pemberhentian beberapa pos menteri tertentu yang penting dan harus disetujui oleh DPR dulu. Sehingga koalisi partai yang berkuasa di DPR tetap punya peranan untuk menentukan perwakilan partai di pemerintahan eksekutif. Aturan seperti ini akan membuat koalisi partai tidak mudah dikhianati oleh presiden terpilih kelak.

POLARISASI ULAMA

Di era reformasi polarisasi dan perdebatan politik tidak hanya melanda kaum politisi saja. Yang tidak kalah hangat dan penting, polarisasi itu juga melanda kaum ulama. Semakin lama, polarisasi ulama itu semakin muncul ke permukaan dan semakin tajam. Tarik menarik antara kaum ulama yang berbeda pendapat itu akan turut pula menentukan bulat lonjongnya demokrasi Indonesia di masa depan.

Di akhir Juni 1999, sebagian ulama berkumpul di salah satu pondok pesantren di Jawa Tengah. Ulama ini dari kelompok ulama pesantren nasional (UPN). Mereka menyatakan agar majelis ulama Indonesia (MUI) jangan terlibat dalam pertarungan politik kekuasaan yang tengah terjadi. Mereka juga mengkritik aksi-aksi yang mengatasnamakan Islam dan otoritas ulama untuk kepentingan golongan politik tertentu. Mereka pun sepakat bahwa wanita boleh menjadi presiden.

Selang beberapa waktu sebelumnya, ajaran Islam dan otoritas ulama sudah pula digunakan namun untuk rekomendasi politik yang

berbeda. Satu partai besar, PPP, misalnya menyatakan bahwa mereka bersandar pada fatwa ulama bahwa wanita tidak bisa menjadi presiden. Pendakwah kondang tampil pula dalam aneka seruan agar tidak memilih partai yang bayak didominasi caleg non muslim. Partai yang berasaskan islam pun menarik garis tajam dengan partai yang mereka label sebagai “nasionalis sekuler.”

Polarisasi dikalangan ulama ini agaknya terbagi dalam dua kubu yang memang sudah mengakar sejak dulu. Untuk mudahnya, sebut saja, yang satu adalah kubu konservatif, yang lainnya adalah kubu progresif. Kubu konservatif ini disemangati oleh keinginan menampilkan islam sebagai sistem alternatif yang berbeda dengan prinsip demokrasi barat. Bahkan kultur barat acapkali tidak saja dianggap sebagai sistem yang asing, namun sistem yang mengancam pula. Sebaliknya kubu progresif menampilkan islam sebagai sistem yang paralel dan mendukung prinsip demokrasi. Kultur barat bahkan dianggap anak dari zaman keemasan islam di masa silam. Di Indonesia, dua kubu ini sudah menunjukkan perbedaannya di beberapa isu. Disamping soal boleh tidaknya wanita menjadi presiden menurut islam, juga soal apakah partai yang berbasiskan islam sebaiknya menggunakan asas islam atau asas kebangsaan, serta soal perbedaan reaksi atas caleg non muslim. Dimasa datang perbedaan posisi dikalangan ulama itu akan semakin banyak lagi sejalan dengan semakin banyaknya problema yang dihadapi masyarakat.

Polarisasi ulama tidak hanya terjadi di indonesia. Polarisasi ulama terjadi juga di berbagai negara lain yang mayoritas penduduknya islam, seperti di Mesir. Bahkan polarisasi ahli dan otoritas agama itu juga terjadi diberbagai agama lain seperti kristen dan yahudi.

Penyebabnya, menurut aliran postmodernisme, akal manusia sangat terbatas. Akal bukanlah cermin tempat kebenaran dapat memantulkan diri sepenuh-penuhnya. Latar belakang keilmuan, lingkungan inetlektual, sampai kecenderungan psikologis yang tidak sepenuhnya dapat dipahami, akan turut mempengaruhi akal. Akibatnya, lima ahli dapat berakhir lima interpretasi yang berbeda ketika mereka membaca teks dan sejarah.

Namun apa yang dialami oleh ulama di Indonesia kini sudah terlebih dahulu dialami banyak ahli agama kristen dan katolik di Eropa dan Amerika Serikat. Berbagai negara barat itu sudah terlebih dahulu bersentuhan dengan revolusi industri beserta seluruh implikasi politiknya. Demokrasi yang merupakan anak kandung industri sudah meluluhlantakkan dataran Eropa dan Amerika Serikat sejak dua ratus tahun lalu.

Dari catatan sejarah, kita tahu tidak mudah bagi penganut agama kristen dan katolik untuk merespon kecenderungan baru itu. Aneka perpecahan internal, bahkan konflik kekerasan acapkali terjadi dikalangan mereka yang memang serius memeluk agama. Akhir pertarungan itu sudah kita ketahui bersama. kubu progresif dikalangan kristen dan katolik tumbuh lebih dominan dan lebih diterima oleh mayoritas penganutnya.

Negara akhirnya dipisahkan dari doktrin gereja. Kebijakan negara akhirnya juga dinetralkan dari perselisihan interpretasi agama. Kaum pemikir liberal juga membantu memecahkan persoalan itu dengan mengembangkan konsep public sphere(ruang publik) dan private sphere(ruang pribadi). Untuk urusan pribadi, termasuk masalah interpretasi agama, negara dilarang turut campur. Itu adalah ruang dan hak sepenuhnya setiap individu. Namun ruang publik adalah ruang bersama. Setiap warga negara diberikan kedudukan dan hak sosial yang sama di ruang publik, terlepas dari warna kulit, jenis kelamin, ras, serta agamanya. Prinsip liberal inilah yang kemudian menjadi esensi dari demokrasi.

Kini di negara Barat itu, demokrasi mengalami konsolidasi. Prinsip demokrasi dianggap sebagai the only game in town, satu-satunya aturan main bersama yang disepakati, elit yang berpengaruh menerima aturan main itu dan tidak lagi mencari aturan main lainnya. Setinggi-tingginya konflik antar elit, namun mereka tetap bersepakat tentang aturan main demokrasi sebagai mekanisme menyelesaikan perbedaan dan konflik di antara mereka.

Kini, nasib demokrasi di Indonesia akan juga ditentukan oleh tarik menarik antara dua kubu ulama itu. Baik kubu konservatif atau kubu progresif sama-sama memiliki argumen, Pijakan agama dan pendukungnya. Berdasarkan pengalaman negara lain, demokrasi di Indonesia akan lebih mudah terlaksana, jika kubu progresif itulah yang tumbuh dominan. Sedangkan kubu konservatif, walaupun selalu akan hadir, namun hanya marginal saja. Jika sebaliknya yang terjadi, lonceng kematian bagi gerakan reformasi akan berdentang keras.

KONTROVERSI MEMILIH PRESIDEN

Ketika menerima pejabat teras DPA akhir Mei 1999. Habibie memberikan usulan. Pada periode pemilu yang akan datang presiden RI, menurut Habibie, sebaiknya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Menurutnya, penduduk Indonesia ada dua ratus juta. Sangat aneh jika presiden RI dipilih hanya tujuh ratus anggota MPR.

Habibie menegaskan kembali rentannya memilih presiden dalam sistem yang berlaku sekarang. Dalam sistem sekarang, presiden dipilih oleh anggota MPR, padahal hanya 60%(462 dari 700 kursi) anggota MPR itu yang dipilih rakyat. Apalagi, dalam pemilu 1999 itu tidak ada partai yang menang mutlak(diatas 50 %). Akibatnya, presiden yang akan dipilih adalah hasil bargaining politik elit partai dan anggota MPR lainnya. Legitimasi politiknya tidak akan kuat.

Dikhawatirkan pula, karena presiden terpilih merupakan hasil kompromi, presiden akan dipaksa untuk terus berkompromi dengan berbagai kelompok yang kepentingannya mungkin saling bertentangan. Belum lagi dihitung kemungkinan bermainnya money

politics. Presiden dipilih bukan karena ia figur yang tepat, tapi karena kekuatan uang kelompoknya.

Pandangan umum ini sudah cukup menyiratkan tidak nyamannya sistem sekarang. Lima tahun mendatang, jelaslah sistem ini harus di ubah. Persoalannya, ia harus diubah kemana? Apakah ia diubah menuju sistem presidensial murni, seperti yang diusulkan Habibie? Atau justru menuju sistem parlementer, seperti yang diusul pakar lain?

Sebelum menimbang kemana sistem politik kita harus diubah, kelemahan dan kekuatan dua sistem itu, presidensial murni dan parlementer, harus dikupas dahulu.

Kelemahan mendasar sistem presidensial murni adalah pemerintahan yang telah terbelah (*divided government* dan *dual legitimacy*). Dalam presidensial murni, baik parlemen dan presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Selalu ada kemungkinan presiden yang terpilih berasal dari partai A sementara parlemen dikuasai oleh partai B. Di parlemen, partai A menjadi oposisi dan penguasanya adalah partai B. Sementara di lembaga presiden (eksekutif), partai B menjadi oposisi, dan penguasanya adalah partai A. Dengan kata lain, kekuatan oposisi terhadap presiden menguasai parlemen.

Ini sering terjadi di Amerika Serikat (AS). Presidennya dari partai Republik tetapi parlemen dikuasai oleh partai Demokrat. Atau sebaliknya. Beberapa kali pula pemerintahan Amerika Serikat mengalami jalan buntu karena presiden dan parlemen gagal mencapai kesepakatan untuk berbagai kebijakan. Secara politik situasi ini sangat runyam karena presiden tidak mendapat dukungan parlemen. Padahal untuk menggolkan sebuah UU, misalnya, harus disetujui oleh kedua belah pihak.

Untuk membaca lebih detail dua sistem itu dapat dibaca: Juan Linz and Arturo Valenzuela, *The failure of Presidential Democracy*, (John Hopkins University Press: 1994, bab 1), juga Matthew Shigart, "Of Presidents and Parliaments, *east European Constitutional Review*, 2, hal 30-32.

Di Amerika Serikat, situasi diatas relatif bisa ditangani karena tiga hal. Pertama, platform partai yang ada, antara partai yang berkuasa dengan partai oposisi tidak banyak beda. Semua partai ini memperjuangkan demokrasi kapitalisme. Semua pro hak asasi yang kurang lebih sama, dan pro ekonomi pasar yang juga kurang lebih sama. Perbedaan mereka tidak dalam jenis ideologi tetapi dalam derajat kebijakan semata. Partai Demokrat misalnya lebih menginginkan pajak tinggi dan keterlibatan pemerintah yang lebih jauh dalam ekonomi. Sementara partai Republik sebaliknya. Karena platform partai tidak terlalu berbeda, kompromi antara presiden dan parlemen lebih mudah dicapai.

Kedua, seni kompromi dan sikap moderat para politisi baik diparlemen ataupun di lembaga kepresidenan sudah mentradisi dan berkualitas tinggi. Ini tidak mengherankan karena saat ini Amerika Serikat sudah berpengalaman ratusan tahun dalam sistem itu. Akibat tingginya kesadaran kompromi itu, konflik presiden dan parlemen yang dikuasai oleh partai yang berbeda menjadi mudah dijembatani.

Ketiga, kekuatan civil society dan kelompok interest di Amerika Serikat sudah terlembaga pula. Kelompok ini dapat dengan mudah menjembatani dan memberi tekanan kepada presiden ataupun parlemen untuk mencari kesepakatan.

Kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda dengan Amerika Serikat. Polarisasi ideologi antar partai lebih tinggi. Dalam platform ekonomi buat Indonesia misalnya, selalu mungkin partai A punya visi ekonomi yang sangat populis, sementara partai B punya agenda ekonomi yang sangat liberal. Dua platform ini adalah dua jenis ideologi yang berbeda.

Apa jadinya jika presiden yang terpilih berasal dari partai A, sementara parlemen dikuasai partai B. Akan terjadi ketidaksepakatan yang berlarut-larut yang dapat menyebabkan mobilitas apapun krisis politik. Seandainyaupun dicapai kompromi, itu dapat pula menyebabkan inkonsistensi kebijakan: kadang populis, kadang liberal, tergantung pihak mana yang harus mengalah saat itu.

Seni berkompromi dan tingkat moderasi politisi yang ada juga tidak setinggi di Amerika Serikat. Hal ini wajar karena kita belum lama, bahkan mungkin belum pernah hidup dalam tradisi demokrasi sejak lahirnya Orde lama. Kelompok civil society dan kelompok kepentinganpun belum terlembaga secara baik. Ada kemungkinan kelompok itu bukan menjembatani konflik antara presiden dan parlemen tetapi malah mempertajam. Singkatnya, jika presiden di pilih langsung dalam situasi Indonesia saat ini, kita akan banyak berjudi dengan resiko yang sudah semestinya dapat kita bayangkan.

Sistem kedua adalah parlementarianisme. Dalam sistem ini kepala eksekutif tidak disebut Presiden tetapi Perdana Menteri, walau mereka menjalankan tugas eksekutif yang kurang lebih sama. Dalam sistem ini, kepala eksekutif tidak dipilih oleh rakyat langsung dalam pemilu namun dipilih oleh parlemen. Contohnya adalah Inggris.

Dalam sistem ini tidak akan terjadi *divided government* dan *dual legitimacy* sebagaimana yang terdapat dalam sistem *presidentialism*. Kepala eksekutif selalu berasal dari partai-partai yang juga dominan diparlemen karena memang parlemenlah yang memilih kepala eksekutif ini. Dalam banyak kasus, ketua partai dominan diparlemen itulah yang menjadi perdana menteri, seperti Tony Blair di Inggris. Baik perdana menteri dan parlemen akan punya platform yang sama karena memang datang dari partai yang sama.

Namun kelemahan utama sistem parlementer ini adalah kepala eksekutif dapat dijatuhkan oleh parlemen kapanpun. Jika parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada kepala eksekutif, walau baru sebulan memerintah, kepala eksekutif itu jatuh dan harus diganti. Tidak ada persyaratan apa-apa untuk membuat mosi tidak percaya itu selain ia harus didukung oleh suara mayoritas diparlemen. Kepala eksekutif tidak perlu melakukan kriminal atau melanggar konstitusi untuk dijatuhkan oleh parlemen. Situasi ini menjadi riskan apalagi jika parlemen itu bersifat multi partai, dimana tidak ada satu partai pun yang memperoleh kursi lebih dari 50%. Akibatnya mayoritas

yang ada diparlemen adalah pemerintahan koalisi yang terdiri lebih dari satu partai. Perubahan koalisi ini dengan mudah dapat merubah perimbangan parlemen dan dengan mudah pula dapat menjatuhkan kepala eksekutif, Kadang partai gurem yang sangat kecil sekalipun dapat merubah koalisi mana yang meraih mayoritas parlemen.

Pemerintahan pun menjadi tidak stabil karena terlalu mudah dijatuhkan. Pemerintah dapat berganti secara cepat dari berbagai partai yang mempunyai platform beragam. Contoh yang paling akrab dengan kita adalah system parlemen di negara kita sendiri di tahun 1950-an. Dengan mudah pemerintah jatuh bangun yang berujung pada ketidaksinambungan program ekonomi.

Dua sistem di atas, baik presidensial murni ataupun parlementer, memiliki kelemahan masing-masing. Namun dua sistem itulah yang kini tersedia. Tidak ada pilihan lain.

Untuk kepentingan kita saat ini yang masih labil dalam politik dan ekonomi, sistem parlementer yang rentan dengan jatuh bangunnya kabinet jauh lebih beresiko. Sistem presidensial murni harus menjadi alternatif yang lebih baik. Sistem presidensial murni harus dipilih bukan karena kebaikan sistem ini sendiri, tetapi karena alternatif lain yang tersedia jauh lebih buruk dalam kondisi Indonesia yang multipartai.

Tetapi harus ada sedikit modifikasi dalam sistem presidensial murni itu untuk kasus Indonesia. Agar presiden yang terpilih nanti benar-benar kuat, mungkin kita memerlukan pemilihan presiden secara langsung dalam dua tingkat. Pada tingkat pertama, semua calon presiden yang ada, yang pasti jumlahnya banyak, dibolehkan berlomba. Namun pada tingkat kedua, calon yang berlomba hanyalah dua peringkat teratas saja. Dengan cara ini presiden yang terpilih adalah ia yang didukung lebih dari 50% pemilih. Presiden yang terpilih kelak benar-benar legitimate dimata publik pemilih.

MANUVER ELIT PASKA PEMILU

KINI politik Indonesia memasuki babak baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para elit politik terutama pemimpin partai besar, akan melakukan berbagai manuver dengan satu sasaran: pemilihan presiden dan pembentukan pemerintahan baru. Berbagai perubahan sikap, aliansi baru, dan peyeberangan posisi akan menjadi tontonan menarik, dengan berbagai kejutan dan hasil akhir yang mungkin tidak terduga.

Manuver elit ini akan sangat unik sekali. Babak ini bukan hanya penting karena sangat menentukan bulat lonjongnya Indonesia baru, namun juga akan menjadi kajian akademis yang panas. Ada tiga kondisi yang membuat manuver elit di Indonesia ini berbeda dengan politik elit di negara lain. Tiga kondisi yang berbeda ini adalah produk dari kombinasi warisan politik orde baru, segmentasi politik masyarakat, dan kultur politik.

Pertama, berbeda dengan negara demokrasi yang sudah mapan, pemenang pemilu di Indonesia tidak secara otomatis menjadi

pemimpin pemerintahan. Di negara lain dalam sistem demokrasi parlementer, misalnya, partai pemenang pemilu akan diberikan hak pertama membentuk pemerintahan. Pemimpin partai yang menang itu secara otomatis akan menjadi Perdana Menteri. Sedangkan di negara demokrasi presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dengan sendirinya pemenang pemilu secara otomatis menjadi pimpinan pemerintahan baru.

Namun warisan buruk politik orde baru membuat situasi di Indonesia berbeda, rumit dan sekaligus problematic. Partai yang menang pemilu tidak otomatis akan memimpin pemerintahan baru. Pemilu ini hanya memilih 60% anggota MPR (462 dari 700 anggota), sedangkan presiden akan dipilih oleh seluruh anggota MPR. Ada kemungkinan presiden yang terpilih bukan berasal dari partai yang menang pemilu. Di negara lain, setelah pemilu pertarungan politik elit berakhir. Elit yang memenangkan pemilu dianggap legitimate untuk memerintah karena memang ia yang dipilih rakyat. Namun di Indonesia, setelah pemilu, pertarungan politik elit justru akan semakin ramai. Pertarungan itu sama sekali belum selesai karena kursi presiden masih terbuka untuk diperebutkan. Apalagi yang memilih presiden bukan pula rakyat, tetapi elit partai ditambah utusan daerah dan utusan golongan di parlemen yang berjumlah hanya 700.

Kedua, berbeda dengan kebanyakan negara lain, segmentasi politik di Indonesia juga sangat khas. Indonesia terbagi dalam tiga segmen yang hampir merata. Yaitu kaum islam abangan, islam tradisional, dan islam modernis. Diluar tiga segmen itu ada pula kelas menengah kota yang sekuler serta kelompok agama minoritas yang jumlahnya tidak signifikan.

Tidak ada partai politik yang mampu meraih mayoritas suara sekaligus dari dua atau tiga segmen itu. Masing-masing segmen memiliki sentimen emosinya sendiri ke partai tertentu. Kaum abangan misalnya ke PDI-Perjuangan dan Golkar, Islam tradisional ke PKB. Islam modernis ke PAN, PPP, PK dan PBB. Kelas menengah kota yang sekuler serta minoritas ke PDI-Perjuangan, PAN atau Golkar.

Akibat segmentasi yang hampir merata itu tidak ada partai yang akan mampu menang secara mayoritas. Pemerintahan baru harus terdiri dari beberapa partai untuk memperoleh dukungan mayoritas di parlemen kelak. Sekali lagi manuver para elit dalam membuat aliansi, negosiasi dan posisi akan sangat menentukan siapa yang akan mengendalikan pemerintahan baru.

Ketiga, sumber daya politik yang dapat dimanipulasi oleh manuver elit begitu kaya. Siapa lawan siapa kawan dapat berubah secara cepat sekali dan diluar dugaan. Dengan jumlah suara, politik aliran, jenis kelamin, label status quo, ketaatan agama, tawaran kursi menteri, catatan masa silam dan hubungan pribadi dapat menjadi isu untuk mendapatkan dukungan atau untuk melemahkan lawan.

Hasil akhir politik menjadi tidak pasti dan sulit diduga. Selalu terbuka kemungkinan, misalnya, Golkar bergabung dengan PPP dan PAN serta partai islam lainnya untuk mencalonkan Habibie atau Amien Rais sebagai presiden. Terbuka pula kemungkinan, karena tidak dapat menggolkan Megawati, akhirnya PDI-Perjuangan bersama koalisinya mencalonkan Try Sutrisno atau Gus Dur. Mungkin pula tokoh non partai seperti Emil Salim dan Wiranto menjadi alternatif akibat adanya deadlock. Untuk mengontrol manuver elit ini agar tidak terlalu liar, yang cenderung mengabaikan pilihan rakyat melalui pemilu dan merusak, perlu dilakukan apa yang disebut dengan elite settlement. Yaitu para elit ini perlu duduk di satu meja untuk bernegosiasi, menjembatani perbedaan, mencari solusi bersama dan membagi kekuasaan. Setidaknya, elit yang harus terlibat adalah lima pimpinan partai terbesar: Megawati, Matori Abdul Djilil, Akbar Tandjung, Amien Rais dan Hamzah Haz. Dua Kesepakatan dapat dihasilkan melalui elite settlement ini, pertama, kesepakatan untuk menjalankan agenda reformasi dalam pemerintahan baru kelak. Kedua, kesepakatan untuk membagi kekuasaan dimana pihak yang berada di urutan tertinggi diberikan hak pertama untuk memilih jabatan politik.

Misalnya, ada lima jabatan yang akan dinegosiasikan: Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua MA dan Ketua DPA, partai pemenang dipersilahkan memilih satu dari lima jabatan itu. Setelah itu, partai pemenang kedua memilih satu dari sisanya. Dan seterusnya, sampai akhirnya partai kelima juga memperoleh satu dari lima jabatan itu.

Melalui aturan main ini, manuver elit akan berakhir dengan win-win solution, yang akan mengurangi konflik elit yang sangat berbahaya di era krisis ekonomi. Kedaulatan rakyat dalam pemilu juga tidak diabaikan karena partai pemenang diberi hak pertama memilih.

ALIANSI PDI-PERJUANGAN DAN GOLKAR?

HASIL pemilu 1999 sudah dapat dipastikan. PDI-Perjuangan berada pada posisi pertama perolehan kursi, kemudian diikuti oleh partai Golkar. Daripada saling berhadap-hadapan, bersaing memperebutkan kursi presiden, jauh lebih produktif jika dua partai terbesar ini duduk dalam satu meja dan membentuk pemerintahan bersama.

Dibandingkan partai lain, basis massa dan platform dua partai terbesar ini sangatlah dekat. Mereka sama-sama berbasiskan massa yang plural dan asas kebangsaan. Namun pemerintahan PDI-Perjuangan dan Golkar hanya akan menjadi kuat jika mereka memnuhi tiga prinsip; prinsip reformasi, acceptability dan fairness.

Indonesia memerlukan pemerintahan baru yang kuat. Situasi ekonomi dan politik masih sangat labil. Ia masih diwarnai oleh kondisi transisi. Sistem politik dan ekonomi lama di era orde baru sudah kehilangan legitimasinya. Namun sistem politik dan ekonomi baru belum pula kukuh mengakar.

Pemerintahan baru juga menghadapi krisis ekonomi yang belum selesai. Ketidakpuasan tingkat kehidupan meluas tidak hanya dikalangan bawah namun juga di kalangan elit. Dikalangan bawah, naiknya jumlah pengangguran dan harga bahan pokok menjadi pangkal kekecewaan yang siap diledakkan kapan saja. Sementara dikalangan elit, mereka mendapatkan jatah kue ekonomi yang jauh lebih kecil. Mereka pun merasa tidak aman dikejar-kejar oleh berbagai malpraktek bisnis yang mungkin mereka lakukan di era Orde Baru.

Pemerintahan baru yang kuat paska pemilu 1999 akan lebih mungkin terbentuk jika PDI-Perjuangan dan Golkar bersatu, ketimbang kedua partai itu bersaing dan berkonflik. Sumber daya politik kedua partai itu hampir sama besarnya. Untuk sumber daya massa, PDI-Perjuangan lebih unggul. Namun untuk sumber daya uang dan elit, Golkar lebih banyak. Jika kedua partai itu saling berhadapan dan bermanuver, pertarungan politik akan sangat melelahkan dan berbahaya pula. Akan jauh lebih produktif jika dua partai terbesar itu beraliansi dan menyatukan sumber daya untuk membentuk pemerintahan bersama.

Namun benar pula, sekedar bersatu saja tidak juga akan menjamin kelanggengan aliansi. Untuk kuat dan bertahan lama, pemerintahan baru aliansi PDI-Perjuangan dan Golkar mesti memenuhi tiga prinsip.

Pertama, prinsip reformasi. Yang menjadi fundamen dari seluruh proses transisi politik adalah lahirnya gerakan reformasi yang menjatuhkan Soeharto. Tanpa gerakan reformasi itu, tidak akan ada pemilu demokratis 1999 dan tidak akan ada pula partai lain seperti PAN, PKB dan sebagainya. Tanpa gerakan reformasi, Golkar juga tidak akan dipimpin oleh Akbar Tandjung dan PDI-Perjuangan akan tetap menjadi partai underground yang tidak diizinkan ikut pemilu.

Singkat kata, semua elit yang menang pemilu saat ini berhutang budi kepada gerakan reformasi. Karena berhutang budi, mereka jangan mengkhianati gerakan reformasi itu. Spirit reformasi harus menjadi pedoman pemerintah baru. Agenda reformasi harus pula menjadi pegangan kebijakan pemerintah baru.

Selama ini, label reformis dan status quo digunakan secara salah. Label itu diberikan kepada partai. Partai PDI-Perjuangan, misalnya, dilabel reformis, sementara Golkar dilabel status quo. Padahal banyak agenda Golkar yang lebih reformis ketimbang partai reformis itu sendiri. Misalnya kebijakan pemerintah Habibie(yang notabene adalah Golkar) atas Timor-Timur dan independensi Bank Indonesia sangat reformis. Sementara sikap Megawati atas Dwi Fungsi ABRI berbau status Quo. Label reformis dan status quo harus diberikan kepada tipe rejim. Status quo ditujukan kepada tipe rejim otoritarian ala Orde Baru, sementara Reformasi ditujukan kepada tipe rejim demokrasi yang hendak ditegakkan. Adapun agenda reformasi itu adalah, seperti yang sudah banyak dikumandangkan: penghapusan dwi fungsi ABRI, amandemen konstitusi, anggota parlemen yang semuanya dipilih, negara yang netral terhadap pluralitas agama dan otonomi daerah yang luas.

Pemerintahan baru hanya akan kuat jika mereka menjalankan agenda reformasi itu. Jika tidak, pemerintahan baru itu akan diturunkan kembali ditengah jalan. Kekuatan ekstra parlementer, yang dimotori gerakan mahasiswa akan terus hidup dan akan menentang pemerintahan baru yang mengkhianati agenda reformasi.

Mungkinkah pemerintahan PDI-Perjuangan dan Golkar menjalankan agenda reformasi? Dengan terus dikontrol, agenda itu mungkin saja dijalankan. Dalam sejarah ada contoh pemerintahan Afrika Selatan saat itu partai yang dipimpin Nelson Mandela, ANC, bersama partai rasialis yang dikalahkannya, National Party, membentuk pemerintahan bersama. Sangat mencengangkan, ternyata partai rasialis National Party mampu berubah dan turut menjalankan agenda demokrasi serta menentang rasialisme itu sendiri yang dulu menjadi program partai itu.

Kedua adalah prinsip acceptability. Pemerintahan baru itu hanya kuat jika mereka di dukung oleh mayoritas pemilih. Jika hanya PDI-Perjuangan dan Golkar saja yang memerintah, ada banyak segmen

masyarakat yang belum terwakili. Total kursi dua partai itu tidak melampaui angka 70%.

Pemerintahan dua partai teratas itu akan jauh lebih kuat jika juga mengajak beberapa partai lain sebagai mitra junior. Partai yang diajak haruslah partai yang mewakili segmen pemilih. Yang belum terwakili oleh dua partai teratas itu adalah segmen islam tradisional, kaum liberal dan islam politik, islam tradisional diwakili oleh PKB, sebagai partai yang berbasis NU. Kaum liberal diwakili oleh PAN. Sedangkan islam politik diwakili oleh PPP.

Tiga partai itu, PKB, PAN dan PPP mesti diajak dalam pemerintahan baru, prinsip kabinet para ahli harus tetap menjadi trade mark pemerintahan baru. Hanya mereka yang ahli dibidangnya saja yang mesti duduk di kabinet mengingat beratnya tugas pemerintahan itu. Pemerintahan baru itu berarti adalah pemerintahan lima partai besar, dimana PDI-Perjuangan dan Golkar dalah mitra senior, sedangkan tiga partai lainnya, yang lebih kecil adalah, mitra junior.

Ketiga, prinsip fairness. Pemerintahan baru hanya didukung secara internal oleh aktivis di partai itu jika memenuhi prinsip fairness. Partai yang memperoleh kursi lebih banyak mendapatkan porsi kekuasaan yang juga lebih besar. Jika prinsip fairness ini tidak dipenuhi, aliansi politik dua partai terbesar itu akan jatuh di tengah jalan. Banyak pihak yang tidak puas yang akan membuat ulah. Ini akan mengganggu proses reformasi secara keseluruhan.

Ada empat posisi utama yang dapat dibagi oleh dua partai terbesar itu. Yaitu Presiden dan Wakil Presiden, serta ketua MPR dan ketua DPR. Presiden adalah posisi yang paling prestisius. PDI-Perjuangan yang memenangkan pemilu tentu menghendaki jabatan itu. Sementara Habibie dari Golkar tidak mungkin diberi jabatan baru yang lebih rendah dari presiden karena saat ini Habibie sudah menjadi presiden.

Pembagian kekuasaan dua partai terbesar itu dapat berlangsung seperti ini. Presiden adalah Megawati(PDI-Perjuangan), sementara

ketua MPR adalah Habibie(Golkar). Akbar Tandjung selaku ketua Golkar dapat menjadi wapres atau ketua DPR, semetara satu fungsionaris PDI-Perjuangan dapat menjadi wapres atau ketua DPR. Jika Akbar Tandjung menjadi wapres, ia menjadi ketua DPR. Jika ia yang menjadi wapres, Akbar Tandjung yang menjadi ketua DPR. Tapi, PPP dan PAN dapat diberi beberapa pos menteri yang penting.

Jika tiga prinsip diatas dipenuhi, pemerintahan baru aliansi PDI-Perjuangan dan Golkar dapat membawa Indonesia selamat menuju demokrasi. Yang dibutuhkan selanjutnya oleh aliansi ini adalah pasukan PR(public relation) untuk menjelaskan ke publik tentang pentingnya dan strategisnya aliansi dua partai terbesar itu. Namun jika tiga prinsip diatas tidak dipenuhi, pemerintahan aliansi PDI-Perjuangan dan Golkar dapat menjadi rejim status quo baru. Rejim itu tidak akan kalah bahayanya dibandingkan Orde Baru yang sudah tumbang.

Apa yang diungkapkan di atas adalah kondisi ideal secara teoritis. Namun tentu saja realitas politik dapat membuahkan aliansi partai politik dan hasil yang berbeda sama sekali. Unsur surprise dalam politik praktis, sebagaimana dalam nasib manusia, selalu datang.

PENUTUP

TRANSISI KE DEMOKRASI YANG TIDAK TUNTAS

SETELAH jatuhnya Soeharto, kemana sistem politik Indonesia menuju? Pemilu yang sudah diselenggarakan dan partai pemenang yang sudah diumumkan barulah langkah awal. Setelah lebih dari setahun gerakan reformasi berjalan, apa yang terjadi? Apa yang telah kita capai dan apa yang gagal diperjuangkan? Banyak pencapaian yang menggembirakan, namun banyak pula kegagalan yang memprihatinkan.

Satu yang paling mengkhawatirkan adalah adanya kemungkinan masa transisi yang kita jalani sekarang menjadi permanen dan tidak tuntas. Masa transisi ini memang tidak membawa kita mundur kebelakang, namun tidak juga membawa kita maju ke depan untuk menuju sistem demokrasi yang sesungguhnya.

Jelaslah sistem politik paska Soeharto tidak dapat lagi dikategorikan sebagai sistem otoriter sebagaimana yang terjadi selama Orde Baru. Namun sistem itu tidak dapat pula dikategorikan sebagai sistem demokrasi murni. Dimasa transisi ini, sistem politik kita hanya

memenuhi kriteria, dalam bahasa Larry Diamond, electoral democracy atau demokrasi yang sangat terbatas. Yang kita khawatirkan jika electoral democracy inilah yang menjadi masa depan dan terminal politik Indonesia. Catatan penutup ini mencoba menganalisa kriteria electoral democracy, variabel apa yang menyebabkan Indonesia hanya berhenti di tahap itu dan bagaimana caranya keluar dari jebakan demokrasi yang sangat terbatas tersebut.

Dalam demokrasi yang terbatas, pemilu yang jujur dan adil dengan sistem multi partai memang terjadi. Pers dan kehidupan politik masyarakat memang relatif bebas. Namun tetap ada halangan yang membuat sistem demokrasi ini cacat.

Pertama, masih adanya kekuatan politik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah, padahal kekuatan politik itu tidak dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Untuk kasus di Indonesia, kekuatan itu adalah militer.

Dalam sistem demokrasi murni, karena kedaulatan ada di tangan rakyat, mereka yang diberikan otoritas mengambil kebijakan politik adalah individu atau kelompok yang rakyat pilih dalam pemilu. Militer tidak ikut pemilu. Bahkan dalam bagan politik modern, militer adalah unsur pelaksana kebijakan politik yang seharusnya netral dan absen dalam pengambilan keputusan politik. Masih berperannya militer dalam politik memberikan cacat dalam mekanisme demokrasi karena adanya kelompok yang tidak ikut pemilu tetapi menentukan secara politik. Kedua, adanya exclusion atau diskriminasi atas ideologi masyarakat. Dalam demokrasi murni, semua ideologi masyarakat diberikan perlakuan yang sama. Ideologi itu dianggap bagian dari cita-cita politik kelompok masyarakat. Negara bersifat netral dan tidak memiliki ideologi kecuali aturan main kompetisi yang bersifat demokratis. Ideologi mana yang mendominasi pemerintahan harus dipilih oleh rakyat itu sendiri melalui pemilu, yang dapat berubah-ubah setiap pemilu. Namun di Indonesia saat ini,

masih ada perlakuan yang tidak equal atas keberagaman ideologi itu, pernyataan pedas presiden Habibie atas bahaya KOMAS (Komunisme, Marhaenisme dan Sosialisme) bukanlah hanya kepleset (slip of tongue) tetapi mewakili segmen elit kekuasaan tertentu. Dengan sendirinya, kelompok masyarakat yang percaya kepada cita-cita ideologi itu sudah mengalami teror mental.

Dinegara demokrasi murni seperti di Amerika Serikat atau Eropa, apalagi dinegara mantan komunis itu sendiri, ideologi komunis dibiarkan tumbuh sama seperti ideologi lainnya. Namun dalam pemilu, rakyat memilih dan ideologi komunis terbukti tidak laku bahkan di kandangnya sendiri seperti di Rusia atau di Eropa Timur. Tetapi ideologi komunis itu dikalahkan melalui prosedur demokratis bukan oleh diskriminasi yang bersifat sistemik.

Ketiga, adanya exclusion atau perlakuan yang minor terhadap etnik minoritas, dalam hal ini non pri (warga keturunan cina). Dalam sistem demokrasi murni, kelompok minoritas dilindungi dan diberikan hak yang sama dengan kelompok mayoritas. Namun dalam realitas politik, kelompok non-pri di Indonesia sangat tidak nyaman hidup dalam era reformasi. Dalam berbagai kejadian, mereka menjadi korban dan kompensasi dari kemarahan publik. Tidak heran kita melihat banyaknya eksodus kelompok non-pri keluar negeri pada masa-masa awal reformasi.

Yang dikhawatirkan jika kita akan hidup permanen dengan tiga cacat demokrasi diatas. Gerakan reformasi yang dimulai tahun 1998 memang cukup berhasil membawa keluar negara kita dari sistem otoriter, namun tidak cukup kuat untuk menepis tiga cacat itu. Masa transisi yang diduga hanya bersifat sementara, kita khawatir jika ternyata berlangsung beberapa dekade.

Pertanyaannya, mengapa tiga cacat demokrasi itu masih tumbuh? Apa yang salah dengan gerakan reformasi sehingga ia tidak cukup kuat untuk langsung membawa Indonesia menuju sistem demokrasi

murni? Apa yang belum dilakukan yang membuat kita akan terbenam hanya dalam sistem electoral democracy atau demokrasi yang sangat terbatas itu?

Penyebabnya ada dalam sejarah bangsa kita sendiri. Bangsa kita tumbuh dalam banyak trauma politik yang dalam. Sejak Proklamasi Kemerdekaan, berbagai gerakan separatis dan percobaan menegakkan negara agama terjadi berulang kali. Ini pula yang membuat militer merasa terpanggil untuk masuk ke dunia politik, menjaga kesatuan negara dan melindungi negara berubah menjadi negara agama. Militer di Indonesia merasa punya misi yang khusus, sebagaimana layaknya militer di Turki yang bertugas menjaga keberlangsungan negara Turki yang sekuler.

Namun kemudian, misi militer itu kebablasan. Militer masuk secara masif tidak saja kedalam sektor politik tetapi juga kedalam sektor ekonomi. Begitu banyak keuntungan dan privilege yang diterima, sehingga menyulitkan kelompok militer itu untuk keluar dan memotong aneka keuntungan posisi mereka selama ini. Kombinasi antara high politics(menjaga persatuan negara dan “bukan negara agama”) dan low politics(menjaga kepentingan politik dan bisnis kelompok mereka sendiri), yang membuat militer di Indonesia tidak kunjung menjadi tentara profesional yang tidak berpolitik.

Sementara ideologi komunis memberikan traumanya tersendiri. Pergolakan ideologi dan politik di tahun 1960-an yang melibatkan kelompok komunis, menyebabkan terbunuhnya ratusan ribu penduduk. Kengerian mayoritas penduduk Indonesia atas komunisme hampir sama dengan kengerian warga Jerman atas Nazisme. Sebagian dari kengerian itu bersifat riil, namun sebagian lagi dikonstruksi secara sengaja sebagai bagian dari pertarungan politik.

Etnis Cina(non-pri) juga mempunyai riwayat trauma yang sama. Di era kolonialisme Belanda sampai dengan rejim Orde Baru, pengusaha dari etnis Cina mendapatkan perlakuan istimewa dalam hal bisnis. Mayoritas dari konglomerat yang bermasalah, yang turut

membangkrutkan orde baru berasal dari etnik non-pri. Yang kemudian berlaku adalah prinsip “karena nila setitik rusak susu sebelanga.” Publik mengarahkan kemarahannya kepada seluruh etnik non-pri.

Jika negara kita masih hidup dengan tiga cacat demokrasi di atas, gerakan reformasi tidak dapat dikatakan berhasil. Tiga cacat itu membuat prinsip equal opportunity, perlakuan yang sama atas pluralitas ideologi dan etnik(ras, agama) belum sepenuhnya terlaksana. Sementara prinsip kedaulatan rakyat(militer tidak ikut berpolitik karena tidak ikut pemilu) juga belum sepenuhnya terselenggara.

Untuk keluar dari jebakan demokrasi yang sangat terbatas ini, diperlukan para inovator politik(political entrepreneur) yang mampu bermanuver secara canggih. Dengan menuver itu, sang inovator diharapkan berhasil mendapatkan dukungan rakyat banyak dan merubah peta kekuatan politik. Diyakini bahwa demokrasi murni bukanlah hasil otomatis dari pembangunan ekonomi atau suburnya kelas menengah. Yang jauh lebih penting, demokrasi murni itu adalah hasil rakitan(craftmanship) dari para inovator politik.

Namun kehadiran dan manuver si inovator itu kini belum terlihat. Yang terjadi adalah kompetisi personal diantara kekuatan pro-reformasi itu sendiri. Setelah lebih dari beberapa tahun usia gerakan refromasi, kita kembali tertegun. Ternyata jalan menuju tanah harapan, yaitu demokrasi murni, masih panjang dan berliku.

DAFTAR PUSTAKA

- Diamond, Larry et, al, Consolidating the Third Wave Democracies(USA: The John Hopkins University, 1977).
- Dye, Thomas R and Harmon Zeigler, The Irony of Democracy (USA: Brooks/ColenPublishing Company, 1990).
- Friedman, Milton, Freedom and Capitalism(USA: University of Chicago, 1982).
- Gray, John, Liberalism: Essay in Political Philosophy(London: Routledge, 1990).
- Hutington, Samuel P, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century(USA: University Of Oklahoma Press, 1993).
- Krugman, Paul, "Myth of Asia's Miracle," dalam Pop Internationalism (London: The MITT Press, 199).
- Letwich, Arian, "Bringing politics back In: Toward a Model of Development State ," Jounal of development Studies, Vol.31, No, 3, February 1995).
- Liddle, William R, Leadership and Culture(USA: Allen and Unwin pty, LTD, 1996).
- Linz, Juan J, And Alfred Stephan, Problems of Democratic Transition and Consolidation(USA: The John Hopkins University Press, 1996).
- _____, and Arturo Valenzuala, The Failure of Presidential Democracy(USA ; The John Hopkins University Press 1994).
- Lipset, Seymour, , Political Man: Social Base of Politics 9 New York Anchor, 1963).
- O'Donnel, Guilemo and Philipe C, Schmitter, Transition from Authoritarian Rule: tentativeConclusion About uncertain Democracy(USA: The John Hopkins University Press, 199).

Ravitch, Diane(ed, The Democracy Reader(USA: Harper Perennial, 1992).

Robbets, Kenneth M, , “Neoliberalism and Transformation of populism in latin America: Peruvian Case ,” world politics 48, 1, 1996).

Robertson, David, A Dictionary of Modern Politics (Philadelphia:Taylor and Francis, 1985).

Sandel, Michael, Liberalism and It’s Critics(USA: New York University Press, 1984).

Shigart, Mattew, “Of Presidents and Parliaments ,” east European Constitutional Review 2, 199).

Tarrow, Sidney, Power In Movement(Cambridge University Press, 1998).